

**ANALISIS REALISASI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk**

**Cabang Malang Kawi**

Oleh

**CAHYO HADI PUTRANTO**  
**MINAT SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**  
**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**  
**MALANG**  
**2013**

**ANALISIS REALISASI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk**

**Cabang Malang Kawi**

Oleh

**CAHYO HADI PUTRANTO**

**0910440039-44**

**MINAT SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Sarjana Pertanian Strata satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS PERTANIAN**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

**MALANG**

**2013**

## PERNYATAAN

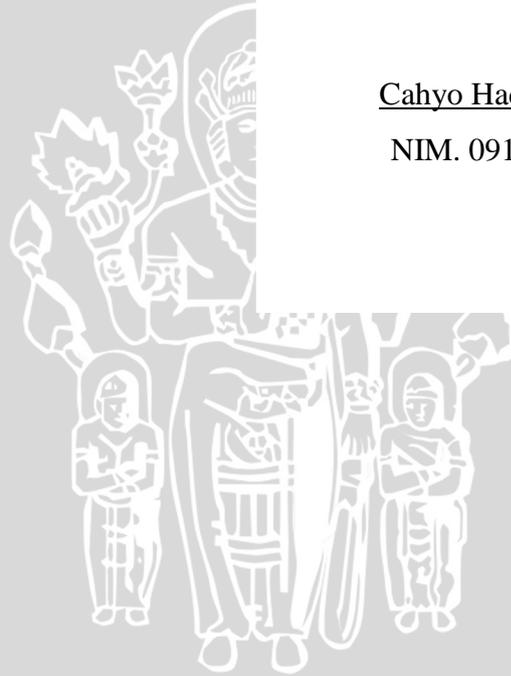
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Desember 2013

Cahyo Hadi Putranto

NIM. 0910440039

UNIVERSITAS



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul : **ANALISIS REALISASI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E) Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi**

Nama Mahasiswa : Cahyo Hadi Putranto  
 NIM : 0910440039-44  
 Program Studi : Agribisnis  
 Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian  
 Minat : Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat  
 Menyetujui : Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Mangku Purnomo, SP., M.Si., Ph.D  
 NIP. 19550626 198003 1 004

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS  
 NIP. 19540705 198103 2 003

Mengetahui

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian  
 Ketua

Dr. Ir. Syafril, MS

NIP. 19580529 198303 1 001

Tanggal Persetujuan : .....



**LEMBAR PENGESAHAN**

Mengesahkan

**MAJELIS PENGUJI**

Penguji I

Mangku Purnomo, SP., M.Si., Ph.D  
NIP. 19550626 198003 1 004

Penguji II

Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS  
NIP. 19540705 198103 2 003

Pemnguji III

Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS  
NIP. 19550626 198003 1 003

Penguji IV

Fitria Dina Riana, SP., MP  
NIP. 19750919 200312 2 003

Tanggal Lulus : .....

## RINGKASAN

**CAHYO HADI PUTRANTO. 0910440039. Analisis Realisasi Dan Dampak Sosial Ekonomi Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi. Dibawah Bimbingan Mangku Purnomo, SP., M.S., P.hD dan Dr. Ir Yayuk Yuliati MS.**

Kegiatan usahatani merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut tergambarkan melalui penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, sumber devisa serta sumber pendapatan dan pelestarian lingkungan. Namun sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan sumber modal yang minim. Bagi sebagian besar petani, modal merupakan pembiayaan yang cukup sulit ditanggulangi. Oleh karena itu pemerintah berupaya menyediakan sumber modal yang mudah dijangkau dan diakses oleh petani melalui kredit. Salah satu modal kredit yang disediakan oleh pemerintah adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengidentifikasi jenis usaha yang dibiayai Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi (2) Mengidentifikasi proses mekanisme realisasi pelaksanaan dan tahap penyaluran sampai dengan pengembalian dana pinjaman Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi (3) Menganalisis apakah dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi berpengaruh secara sosial maupun ekonomi petani.

Pendekatan penelitian ini menggunakan *non probability* dan penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Data akan dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif dan kuantitatif dengan analisis usahatani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dibiayai KKP-E oleh BRI Malang Kawi disalurkan melalui KUD untuk petani tebu, Kelompok Tani untuk petani apel dan kentang dan individual untuk petani salak. Untuk mekanisme realisasi KKP-E baik keterangan fersi Bank dan responden untuk semua komoditas memiliki banyak kesamaan dalam memberikan keterangan. Setelah dianalisis untuk usaha tani setelah mengakses KKP-E pendapatan petani meningkat tajam namun untuk petani tebu peningkatan pendapatan cenderung kecil setelah mengakses KKP-E.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyarankan agar perusahaan meratakan penyaluran KKP-E untuk petani dengan komoditas lain, perusahaan juga hendaknya perusahaan terus melakukan survey lapang, baik sebelum dan sesudah penurunan dana ke petani. Dengan dilakukan survey yang berkesinambungan maka perusahaan akan mengetahui dana kredit tersebut apakah sudah tepat bagi petani, baik tepat waktu, sasaran, penggunaan dan pengembalian. Sehingga perusahaan bisa mengontrol penyaluran dana sehingga tidak terjadi kredit macet.

## SUMMARY

**CAHYO HADI PUTRANTO. 0910440039. Actual analysis and social economic impact Farmer Access to Credit Food Security and Energy (KKP-E) Case Study PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang Kawi. Supervised By Mangku Purnomo, SP., M.S., P.hD and Dr. Ir Yayuk Yuliati MS.**

---

One sector which has a strategic role in the Indonesian economy is the agricultural sector. Agricultural sector can be seen from the contribution of the agricultural sector in employment, a provider of food, industrial raw materials, feed and bioenergy, as well as the source of foreign exchange income and preservation of the environment. But most farmers in Indonesia are small farmers with minimal capital resources. For most farmers, the financing of capital is quite difficult to overcome. Therefore, the government seeks to provide a source of capital that is easily accessible to farmers through credit. One type of distribution of capital who farmers can access is credits food security and energy (KKP-E)

The purpose of this study was: (1) Identify the types of business loans that financed Food Security and Energy (KKP-E) by PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang Kawi (2) Identify the mechanism of realization and distribution stages to refund loans Credit Food Security and Energy (KKP-E) by PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang Kawi (3) analyze whether funds Credit Food Security and Energy (KKP-E) by PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang Kawi influential socially and economically farmers.

The approach this research using non probability and determining sample has been taken on research uses purposive sampling method. Data will be analyzed in qualitative with descriptive analyze and quantitative analysis with Counting the income of farmers before and after access KKP-E

From the overall results indicate that the type of KKP-E funded effort by BRI Malang Kawi channeled through cooperatives for sugarcane farmers, groups of farmer apples and potatoes farmers and for individual farmer to farmers barking. The mechanism of realization of KKP-E by bank specification and farmers specification for all commodities have a lot of similarities in providing information. After accessing KKP-E income of all farmers increased sharply but for sugarcane farmers tend small increase in income after accessing KKP-E

Based on the results of research researchers suggested that distribution company Who has spread out KKP-E for farmers and other commodities, the company has also put companies continue to survey spacious, both before and after experienced funds to the farmers. To be a recent survey continuous food companies will know whether credit funds have the right to farmers, both on time, the target, the use of and return. So that the company can control distribution of fund so that there was no credit crunch.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Realisasi dan Dampak Sosial Ekonomi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi penyaluran, tahapan penyaluran dan turunya dana, penyaluran dana dari kelompok ke anggota sampai dengan pengembalian dana modal kredit dari pemerintah yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi serta menganalisis pengaruh akses KKP-E terhadap produksi dan pendapatan petani jika di bandingkan dengan sebelum mengakses kredit KKP-E tersebut. Penyusunan naskah skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pelajaran yang penulis dapatkan terutama pengalaman, ilmu dan pengembangan diri penulis. Penulis juga menyadari dalam setiap proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan begitu banyak bantuan, saran, dukungan dan kritik yang sangat membangun, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis tidak lupa ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Bapak Agus Kuncoro selaku Account Officer PT BRI Cabang Malang Kawi yang telah berkenan membimbing dan membantu selama proses penelitian berlangsung.
2. Bapak Mangku Purnomo, SP., M.Si.,P.hD selaku Dosen Pembimbing pertama Skripsi dan Dr. Ir Yayuk Yuliati, Ms. Selaku dosen pembimbing pendamping skripsi untuk bantuan, saran dan kritik - kritik yang membangun kemajuan penulis yang diberikan selama proses penelitian serta penyusunan skripsi.
3. Karyawan dan staff kerja BRI Cabang Malang Kawi yang telah turut membantu dalam penelitian sealama kegiatan penelitian berlangsung.

4. Bapak Dr. Ir. Syafril, Ms selaku ketua jurusan Sosial Ekonomi Pertanian atas waktu yang selalu diberikan kepada penulis untuk membantu penyelesaian birokrasi penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, kakak serta semua saudara penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual.

Penulis menyadari sepenuhnya bila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun serta sumbangan pemikiran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi rekan-rekan mahasiswa, perusahaan tempat penulis melaksanakan penelitian, masyarakat umum, serta berbagai pihak yang lainnya sekedar sebagai bahan ilmu pengetahuan.

Malang, November 2013

Penulis



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Cahyo Hadi Putranto merupakan anak kedua dari 2 bersaudara yang dilahirkan pada tanggal 10 november 1990 di desa Dawuhan Lor kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang oleh pasangan suami istri dari Bapak Satriyo Puguh dan Ibu Mariyani. Pendidikan pertama yang penulis lalui adalah di taman kanak-kanak di TK Darma Wanita pada tahun 1995 sampai 1997. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar di SDN Dawuhan Lor 05 pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2003. Tingkat pendidikan selanjutnya yang penulis rasakan adalah masuk ke Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Sukodono pada tahun 2003 sampai tahun 2006 dan kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Lumajang pada tahun 2006 sampai 2009. Kemudian penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Strata 1 (S1) di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur pada tahun 2009 melalui jalur PSB (Penerimaan Siswa Berprestasi) pada Fakultas Pertanian dengan program studi Agribisnis.

Selama menempuh studi di Brawijaya, penulis pernah mengikuti organisasi kampus yakni sebagai anggota dari Permaseta (Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian) dan kegiatan kepanitiaan kampus seperti Inagurasi angkatan 2009 pada tahun 2009 dan PLA (Pendidikan Dan Pelatihan Anggota Permaseta) pada tahun 2010. Penulis juga aktif dalam kegiatan akademis dan menjadi asisten praktikum untuk mata kuliah Sosiologi Pertanian pada tahun 2009 sampai tahun 2012 serta asisten praktikum Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis pada tahun 2013.

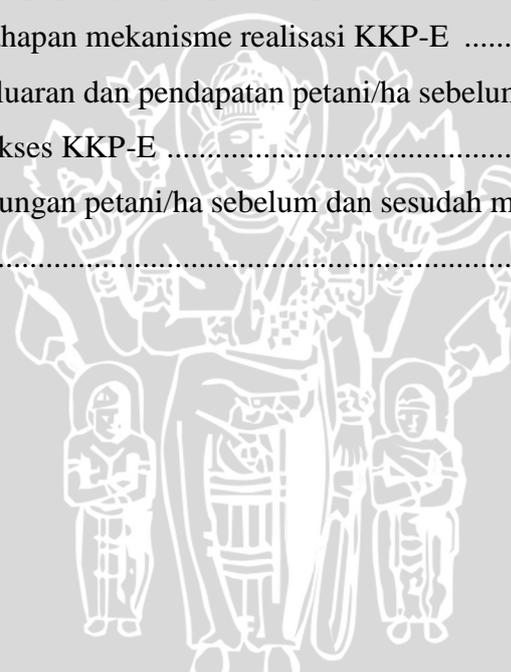
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>SUMMARY</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Tinjauan Tentang Bank .....	10
2.2.1 Jenis-jenis Bank .....	11
2.3. Tinjauan Tentang Kredit .....	14
2.3.1 Pengertian Kredit .....	14
2.3.2 Unsur-unsur Kredit .....	15
2.3.3 Fungsi Kredit .....	16
2.3.4 Jenis Kredit Perbankan Secara Umum .....	16
2.3.5 Teori Kredit .....	18
2.4 Macam-macam Kredit BRI .....	20
2.5 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi .....	22
2.5.1 Usaha dan Komoditas yang Dibiayai KKP-E .....	22
2.5.2 Persyaratan Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKP-E .....	23
2.5.3 Kewajiban Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKP-E .....	24
2.5.4 Fitur Kredit KKP-E .....	26
<b>III KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	27
3.1 Kerangka Pemikiran .....	27
3.2 Hipotesis .....	30
3.3 Batasan Masalah .....	30
3.4 Defini Operasional dan Pengukuran Variabel .....	31
3.4.1 Defenisi Operasional .....	31
3.4.2 Pengukuran Variabel .....	32

<b>IV METODE PENELITIAN</b> .....	34
4.1 Metode Penentuan Lokasi .....	34
4.2 Metode Pentuan Responden .....	34
4.3 Metode Pengumpulan Data .....	35
4.4 Metode Analisis data .....	36
<b>V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
5.1 Profil Perusahaan .....	40
5.1.1 Sejarah Berdirinya BRI .....	40
5.1.2 Aspek Kegiatan BRI .....	41
5.1.3 Gambaran Umum BRI Malang Kawi .....	43
5.2 Karakteristik Responden .....	45
5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .	45
5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	47
5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bercocok Tanam .....	50
5.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
5.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Menerima KKP-E .....	54
5.3 Jenis Usaha Yang Dibiayai KKP-E BRI Cabang Malang Kawi .	55
5.4 Mekanisme Realisasi KKP-E BRI Cabang Malang Kawi .....	58
5.4.1 Mekanisme Realisasi KKP-E .....	58
5.4.2 Perbandingan Mekanisme Realisasi KKP-E .....	80
5.5 Dampak Sosial Ekonomi KKP-E .....	84
5.5.1 Dampak Ekonomi KKP-E .....	84
5.5.2 Dampak Sosial KKP-E .....	90
<b>VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	93
6.1 Kesimpulan .....	93
6.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>LAMPIRAN</b> .....	97

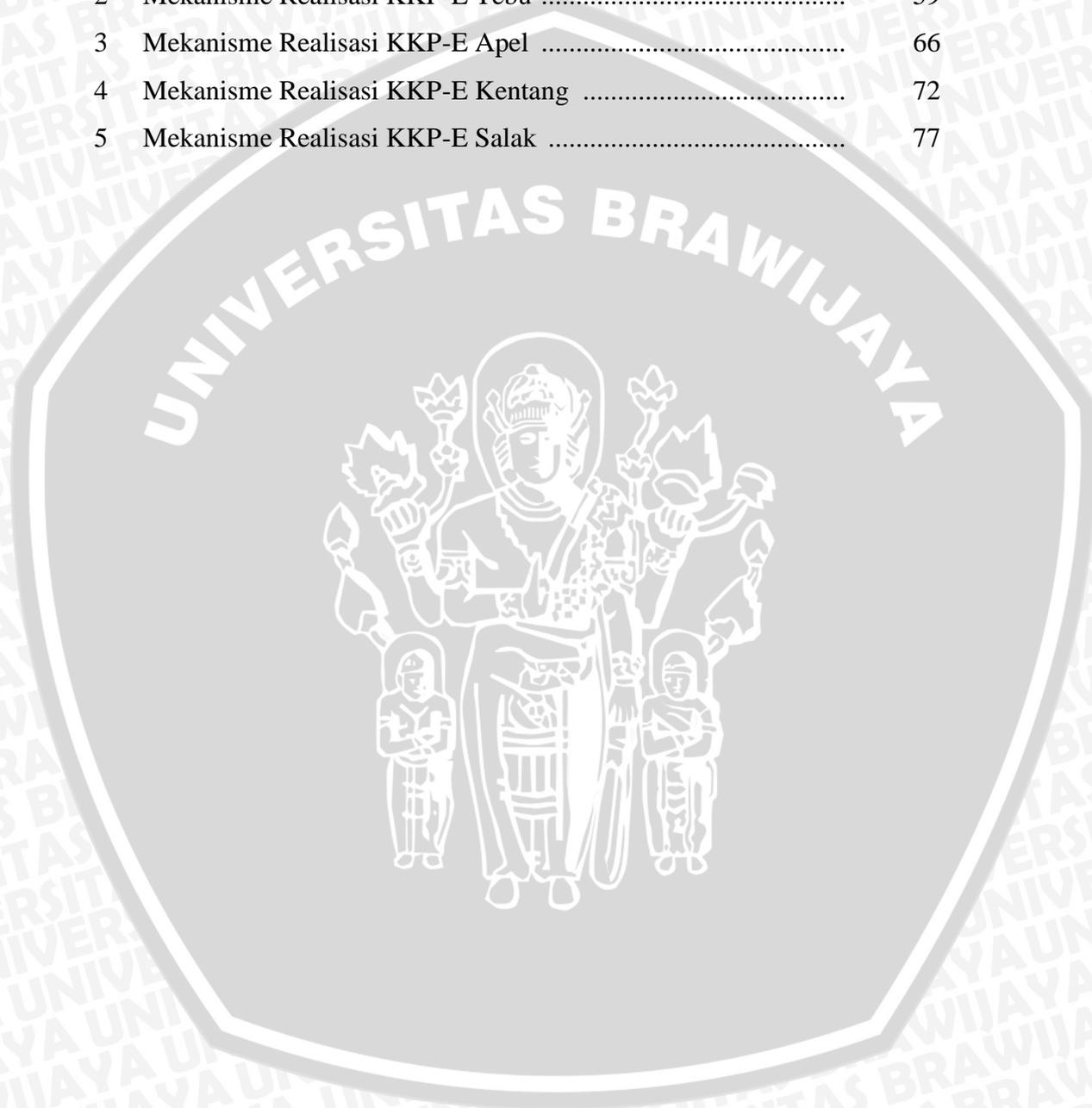
## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1	Variabel dan indikator skala pengukuran variabel penelitian ....	33
2	<i>Sampling frame</i> penelitian .....	35
3	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin .....	46
4	Karakteristik responden berdasarkan usia .....	47
5	Karakteristik responden berdasarkan lama bercocok tanam .....	51
6	Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan .....	52
7	Karakteristik responden berdasarkan frekuensi menerima KKP-E	54
8	Persentase Pinjaman KKP-E BRI Cabang Malang Kawi .....	56
9	Rincian dana dan pupuk yang diperoleh petani tebu / ha .....	64
10	Perbandingan tahapan mekanisme realisasi KKP-E .....	80
11	Rata-rata pengeluaran dan pendapatan petani/ha sebelum dan sesudah Mengakses KKP-E .....	85
12	Rata-rata keuntungan petani/ha sebelum dan sesudah mengakses KKP-E .....	87



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman	Teks	
1		Kerangka praktis .....	29
2		Mekanisme Realisasi KKP-E Tebu .....	59
3		Mekanisme Realisasi KKP-E Apel .....	66
4		Mekanisme Realisasi KKP-E Kentang .....	72
5		Mekanisme Realisasi KKP-E Salak .....	77



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman	Teks
1	Kuisisioner Penelitian .....	97
2	Struktur Organisasi BRI Cabang Malang Kawi .....	106
3	Data Responden .....	107
4	Simulasi Angsuran KKP-E Apel .....	108
5	Simulasi Angsuran KKP-E Salak .....	109
6	Rincian Biaya produksi Dan Hasil Produksi Petani Sebelum dan Sesudah Mengakses KKP-E .....	110
7	Pengeluaran dan Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah Mengakses KKP-E .....	115



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan usahatani merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Peran strategis dari sektor pertanian dapat tergambarkan secara nyata melalui kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, sumber devisa negara, serta sumber pendapatan dan pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Sektor pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja dan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Kegiatan usahatani secara umum membutuhkan beberapa input seperti lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan modal. Sebagian besar rata-rata pemilikan lahan usahatani di Indonesia didominasi oleh petani kecil dengan luas lahan yang relatif kecil dan sempit. Bahkan sebagian dari petani kecil itu sendiri tidak memiliki lahan garapan sendiri sehingga petani harus menjadi penyewa atau melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan bahkan menjadi buruh tani. Dengan lahan yang relatif kecil, kebanyakan para petani kecil mengandalkan tenaga kerja dari keluarga mereka untuk menggarap lahan yang mereka miliki atau lahan yang mereka sewa. Berbeda dengan petani yang termasuk dalam golongan sedang dan petani besar, dengan kondisi lahan yang terbilang cukup besar mereka dapat menggunakan tenaga luar keluarga. Meskipun demikian pada keadaan tertentu petani kecil juga harus menggunakan tenaga luar keluarga sehingga petani kecil, sedang, maupun petani besar memerlukan modal yang cukup besar dalam penggarapan lahan yang mereka lakukan. Sedangkan modal merupakan faktor input yang sangat penting bagi petani karena modal sangat dibutuhkan untuk menyewa lahan, membayar tenaga kerja maupun membeli sarana produksi yang mereka butuhkan untuk bercocok tanam.

Bagi sebagian besar petani, modal merupakan pembiayaan yang sangat sulit untuk ditanggulangi khususnya dalam pengembangan usahatani di tingkat perdesaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang sayaka

dkk 2010, menjelaskan bahwa akses petani dalam sumber-sumber permodalan sangat terbatas terutama terhadap sumber-sumber permodalan yang resmi seperti Bank dll, sehingga para petani lebih cenderung memilih untuk mendapatkan modal dari sumber-sumber permodalan non resmi karena para petani mendapatkan akses yang lebih mudah meskipun dengan bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber permodalan yang resmi. Hal ini terjadi karena pada umumnya hanya petani dengan pemilikan luas areal lahan yang lebih besar yang lebih beruntung mendapatkan modal dari sumber-sumber permodalan resmi dari pemerintah. Sedangkan sebagian besar petani yang ada di Indonesia sendiri adalah petani kecil dengan luas lahan yang kecil pula. Jika luas lahan usahatani yang dijadikan acuan dalam mendapatkan modal yang bersumber dari lembaga keuangan resmi, maka dapat dipastikan sebagian besar petani tidak akan dapat mengakses bantuan permodalan dari usaha permodalan resmi itu sendiri. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengelola usahatani terutama petani kecil dengan luas lahan yang kecil dan sempit.

Masalah lain yang sering dijumpai dalam pembiayaan permodalan pertanian adalah tingkat pengembalian kredit yang umumnya rendah dan sering menimbulkan kredit bermasalah dalam pelunasan peminjaman modal tersebut. Hal tersebut terjadi karena penghasilan usaha tani yang mereka peroleh jauh lebih kecil dibanding kebutuhan rumah tangga mereka sehingga hanya sebagian kecil yang dapat dialokasikan untuk membayar kredit dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mengingat bisnis di bidang pertanian memiliki resiko yang tinggi baik dari gangguan alam, serangan hama dan penyakit serta fluktuasi harga yang sangat signifikan, sudah tidak heran lagi jikalau banyak petani yang bermasalah dalam proses pengembalian kredit yang mereka lakukan. Sedangkan disisi lain, persyaratan pengajuan kredit yang tidak sederhana membuat sebagian besar petani tidak dapat memanfaatkan akses kredit yang disediakan oleh pemerintah.

Jenis-jenis pembiayaan pertanian itu sendiri memiliki beberapa model pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keteraturan dan kemajuan masyarakat. Model merupakan salah satu bentuk acuan baku bagi

masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanpa acuan baku, aktivitas petani dalam proses peminjaman maupun pengembalian kredit akan berjalan cenderung tidak berpola. Selain itu, ketiadaan acuan baku juga mempersulit masyarakat untuk mengevaluasi langkah-langkah untuk memperbaiki langkah yang sebelumnya telah terlaksana termasuk dalam hal pertanian. Jenis-jenis atau model-model kredit program untuk pembiayaan pertanian yang saat ini diluncurkan kementerian pertanian adalah pembiayaan yang berfungsi sebagai pelaksanaan penyiapan kerjasama dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan usaha pertanian (saptomo, imam teguh. 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyatna (2003) di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa, petani khususnya petani kecil lebih mudah mengakses permodalan ke kreditur informal dengan bunga relatif lebih tinggi. Sedangkan petani kaya dan pedagang saprodi dan produk pertanian lebih mudah mengakses permodalan dengan kredit ke lembaga keuangan formal dengan bunga yang relatif rendah.

Bank merupakan salah satu lembaga formal pemerintah yang sampai dengan saat ini selalu menyediakan sumber modal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat baik untuk masyarakat secara umum maupun pelaku usaha, termasuk di dalamnya pelaku usaha sektor pertanian. Sumber modal yang disalurkan oleh lembaga formal seperti Bank merupakan upaya untuk mendorong kinerja masyarakat untuk dapat meningkatkan produktifitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun secara berkelompok melalui penyaluran kredit. Pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam alokasi pemberian kredit untuk sektor pertanian yakni dengan memberikan program kredit bersubsidi kepada pelaku usaha sektor pertanian dengan perantara Bank. Alokasi kredit yang diberikan pemerintah melalui pembentukan program kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E). KKP-E merupakan kredit program dari pemerintah yang berlaku mulai tahun 2007 yang ditujukan untuk membantu permodalan bagi pelaku usaha sektor pertanian dengan suku bunga yang bersubsidi dengan tujuan menarik minat pelaku usaha sektor pertanian untuk lebih memilih meminjam kredit dari lembaga formal perbankan di bandingkan dengan meminjam dari lembaga non formal lainnya. Penyaluran kredit ini di

perantara oleh Bank yang tentunya harus memperhatikan perekonomian masyarakat. Salah satu Bank yang memperhatikan perekonomian masyarakat terutama perekonomian petani dan pelaku usaha di bidang agribisnis adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan dalam kaitannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat termasuk untuk para petani melalui program kredit dari pemerintah yakni melalui program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Dimana unit usaha ini dijadikan sentra untuk memperoleh dana yang dibutuhkan petani sebagai modal dalam sistem budidaya yang dilakukan oleh petani.

Pada kenyataannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih belum bisa merealisasikan perannya sebagai lembaga formal penyedia dana kredit bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) lebih menfokuskan fungsinya sebagai lembaga yang berperan penyedia jasa tabungan, transfer sejumlah uang tertentu dan asuransi bagi nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaporan industry keuangan mikro Indonesia tahun 2009, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa tingkat akses petani terhadap kredit yang diberikan Bank Rakyat Indonesia hanya sebesar 13% saja dari total kredit yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dimana 13% dari kredit yang dapat diakses petani merupakan semua jenis kredit dari kredit yang diberikan oleh BRI termasuk didalamnya Kredit Ketahanan pangan dan Energi (KKP-E).

Pada kenyataannya sumber modal yang berasal dari KKP-E (kredit ketahanan pangan dan energi) hanya dapat diakses oleh masyarakat tertentu saja walaupun bisa diakses oleh petani hanya petani dengan lahan yang besar saja yang berkesempatan untuk dapat mengakses sumber permodalan tersebut. Padahal tidak dapat dipungkiri lagi bahwa modal merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan di Indonesia. Relatif sedikitnya para pelaku usaha sektor pertanian yang mengakses kredit dari lembaga formal pemerintahan seperti KKP-E (kredit ketahanan pangan dan energi) disebabkan oleh adanya resiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan kredit yang ketat, kelemahan manajemen usahatani yang umumnya berskala mikro dan kecil, dan keterbatasan kompetisi lembaga formal permodalan yang didirikan pemerintah juga merupakan

penyebab sulitnya akses petani terhadap sumber permodalan yang ada di sektor pertanian seperti KKP-E (kredit ketahanan pangan dan energi)

### 1.2 Rumusan Masalah

Negara Indonesia adalah negara pertanian, dan sektor pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pada dasarnya pertanian yang dilakukan hanya semata-mata untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan pangan saja. Tetapi untuk sekarang ini pertanian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja tetapi sudah diusahakan untuk dijual sehingga dapat memperoleh keuntungan. Namun besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh petani tergantung dengan faktor produksi yang mereka gunakan dalam bercocok tanam, apabila semua faktor produksi yang dibutuhkan terpenuhi kemungkinan besar para petani akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Faktor produksi dalam kegiatan usaha tani terdiri dari lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan modal. Dari semua faktor tersebut modal merupakan hal yang sangat utama dalam kegiatan bercocok tanam, karena dengan modal yang cukup para petani akan dapat memperoleh lahan, tenaga kerja, bibit dan pupuk dengan mudah.

Masalah utama dalam kegiatan usaha tani adalah banyak tersedianya modal dari berbagai sumber lembaga baik dari lembaga formal maupun non formal dengan berbagai cara pembayaran, agunan, dan proses pencairan yang beragam yang banyak ditawarkan kepada petani maupun pelaku usaha sektor pertanian lainnya. Namun dibalik tersedianya berbagai macam modal tersebut tidak semua bisa diakses oleh petani dan cenderung memberatkan petani. Oleh karena itu pemerintah berupaya menyediakan sumber modal dengan tingkat suku bunga yang dapat dijangkau oleh petani yang disalurkan melalui Bank perantara penyedia dana modal. Salah satu jenis penyaluran modal melalui kredit yang disediakan oleh pemerintah adalah kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) yang disalurkan melalui lembaga penyedia modal formal dari pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Secara umum jenis usaha yang dapat dibiayai melalui KKP-E oleh BRI terdiri dari 7 jenis usaha yakni kredit untuk usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, ansisntan, perikanan dan kemitraan. Dimana dari 7 jenis usaha tersebut memiliki jenis pembiayaan, plafon kredit, jangka waktu peminjaman, agunan, suku bunga dan syarat peminjaman kredit yang berbeda-beda.

Sedangkan pada kenyaaanya tidak semua petani dapat menikmati dana tersebut, petani tetap kesulitan untuk dapat mengakses sumber modal dari pemerintah yang tersedia. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan pertanian 2009 dapat diketahui bahwa realisasi penyaluran dana KKP-E mencapai 6,3 triliun rupiah dengan maksimum peminjaman petani ke BRI sebesar 15 juta rupiah dengan luas lahan maksimum 2 ha dan periode peminjaman selama 12 bulan. Sedangkan dalam beberapa kasus implementasi penyaluran KKP-E dihadapkan dengan keharusan berkelompok dengan luasan areal tertentu menjadi suatu problema tersendiri bagi petani dengan areal kecil sehingga berpotensi menjadikan kegagalan baik dalam pengertian tidak tepat sasaran atau hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.

Melihat hal tersebut, maka masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini :

1. Apa saja jenis kredit pertanian yang dibiayai melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi?
2. Bagaimana proses mekanisme realisasi pelaksanaan dan tahap penyaluran sampai dengan pengembalian dana pinjaman Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi?
3. Apakah dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi berpengaruh secara sosial maupun ekonomi petani?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi jenis usaha yang dibiayai Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi.
2. Mengidentifikasi proses mekanisme realisasi pelaksanaan dan tahap penyaluran sampai dengan pengembalian dana pinjaman Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi.
3. Menganalisis apakah dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi berpengaruh secara sosial maupun ekonomi petani

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang social ekonomi pertanian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah pusat dan daerah.  
Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai penyaluran perkreditan yang dikeluarkan yang dapat diakses oleh petani agar tepat sasaran dan dapat membantu perekonomian petani
  - b. Bagi petani  
Adanya informasi akan proses penyaluran KKP-E yang tersedia sehingga diharapkan akan mempermudah akses petani terhadap sumber modal yang tersedia tersebut

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi dan salah satu sumber informasi penting bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan topik kajian, peneliti merasa perlu menggambarkan landasan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat akurat dan signifikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Bambang sayaka dan Rudi suarja rivai (2011) Peningkatan Akses Petani Terhadap Kredit Pangan dan Energi menjelaskan bahwa keragaan penyaluran KKP-E cukup baik karena melalui plafon yang sudah ditetapkan. Disamping itu jumlah kredit macet tergolong kecil, walaupun demikian akses petani terhadap kredit program tersebut relatif sulit karena bank mempunyai persepsi bahwa usaha tani relatif beresiko kecuali petani tebu.

Ashari (2009) Optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di indonesia menjelaskan bahwa realisasi penyaluran KKP-E sampai dengan tahun 2008 di BRI mencapai 6,3 triliun, dari total dana yang terealisasi penyerapan terbesar digunakan untuk pengembangan budidaya tebu, disusul dengan pengembangan peternakan dan pengembangan padi, jagung dan kedelai. Dimana untuk maksimum peminjaman sebesar 15 juta perorang dan kepemilikan lahan maksimum sebesar 2 ha.

Ade supriatna (2003) Akseibilitas petani kecil pada sumber kredit pertanian di tingkat desa menggambarkan bahwa program pemerintah KKP merupakan kombinasi antara skim kredit lembaga formal (bunga rendah) dengan lembaga informal (prosedur mudah dan agunan sertifikat tanah cukup berasal dari pengurus kelompok tani). Dari berbagai lembaga permodalan yang ada, skim kredit program (KKP) merupakan skim kredit yang paling sesuai dengan karakteristik petani kecil. Lembaga ini menerapkan suku bunga cukup rendah antara 18 sampai 24 persen per tahun, anggunan sertifikat dapat diwakili milik pengurus kelompok, kredit diberikan dalam bentuk uang pinjaman, kredit dikembalikan musiman setelah panen dan permohonan kredit dilakukan oleh pengurus kelompok tani langsung dari Bank yang ditunjuk.

Hastuti Dkk (2002) Pendanaan UsahaTani Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP) menggambarkan bahwa realisasi Penyerapan KKP untuk tanaman pangan di tiga wilayah penelitian masih sangat rendah. Meskipun terdapat beberapa bank pelaksana tetapi yang sudah merealisasikan penyaluran kredit hanya BRI. Di Sulawesi Selatan sampai Maret 2001 baru disalurkan Rp1,51 milyar atau 2,17% dari plafon Rp69,774 milyar. Dari realisasi tersebut Rp1,19 milyar diantaranya disalurkan di Kabupaten Sidrap. Di Jawa Timur terserap Rp1,29 milyar atau 0,5% dari plafon Rp257,38 milyar. Khusus di Kota Kediri baru disalurkan Rp204 juta. Di Jawa Barat plafon KKP tanaman pangan Rp162,25 milyar, dan yang direalisasikan di Subang mencapai Rp807 juta. Informasi lengkap tentang KKP tidak banyak diketahui, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat tani. Di tingkat petani, informasi tentang KKP hanya sampai kelompok tani. Sedangkan pendekatan bank pelaksana dalam menyalurkan KKP kepada petani bervariasi antar wilayah dimana penyakuran KKP dari bank pelaksana diberikan kepada koperasi atau kelompok tani bisa dalam bentuk uang maupun sarana produksi.

## 2.2 Tinjauan Tentang Bank

Pada dasarnya lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah Bank. Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan atautakah badan hukum. Jika melihat definisi Bank, maka lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Di dalam undang-undang perbankan yang lama maupun yang terbaru, pengertian bank pada umumnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu menghilangkan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha.

Menurut Dendawijaya, Lukman (2005) menjelaskan bahwa aktivitas perbankan adalah menghimpun dana masyarakat secara luas yang dikenal dengan istilah kegiatan menghimpun dana (funding). Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank, dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

### 2.2.1 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda, yusi 2009, dapat diketahui bahwa jenis-jenis bank secara umum dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan penentuan harga.

#### 1. Dari segi fungsi, Bank dibedakan menjadi:

##### a. Bank Umum.

Adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah

##### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah tertentu saja.

2. Dari segi kepemilikan, Bank dapat dibedakan menjadi:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank ini merupakan jenis Bank dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya bank itu dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta nasional. Dalam bank swasta nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

c. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

d. Bank campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dari segi status, Bank terbagi menjadi:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi Bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan rnasih dalam batas-batas Negara.

4. Dari segi penentuan harga, Bank dibendakan menjadi :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, menggunakan dua metode yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank dapat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya - biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- 2) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahab)
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarahwaiqtina)

## 2.3 Tinjauan Tentang Kredit

### 2.3.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal kredit, mulai dari kredit barang pecah belah yang dijajakan oleh tukang kredit dari rumah ke rumah atau kredit bentuk uang yang diberikan oleh tukang-tukang ijon. Dalam skala yang lebih luas lagi juga dikenal kredit yang yang di berikan oleh perusahaan dan perbankan. Kemudian kita juga mengenal setiap terjadi transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran dan cicilan dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar. Para pengambil kredit juga sudah paham bahwa dalam cicilan kredit sudah mengandung pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah dengan sebutan debitur dan pihak pemberi kredit (bank) disebut dengan kreditur atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana.

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan besarnya keuntungan bank penyalur kredit. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai proses pengendalian kredit macet.

Ramhadi Halim (2006) menjelaskan bahwa kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan kepada si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjam pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan nilainya dapat diukur

dengan uang, misalnya bank membiaya kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan dan unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Menurut Muhammad Djumhana dalam Ramhadi halim 2006 unsur-unsur kredit adalah

1. Kepercayaan, disini berarti bahwa si pemberi kredit yakin prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasidengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang dapat menimbulkan risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan

### 2.3.3 Fungsi Kredit

Kredit merupakan salah satu produk utama dalam kegiatan perbankan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Menurut Djohan Warman (2000) fungsi-fungsi kredit dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

### 2.3.3 Jenis-jenis Kredit Perbankan Secara Umum

Menurut Djohan Warman (2000) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank umum yang dilihat dari berbagai segi adalah:

#### 1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

- a. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek \ pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya (seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi).

#### 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari tujuannya adalah :

- a. Kredit produktif, yaitu digunakan untuk meningkatkan usaha, produksi atau investasi (digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa)
- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

### 3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktunya adalah :

- a. Kredit dan jaminan, Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang di keluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan Si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa barang jaminan tertentu atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

### 4. Dilihat dari Segi Sektor Usaha.

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika diihat dari sektor usaha sebagai berikut.

- a. Kredit pertanian, merupakan merupakan kredit yang yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang rela tif pendekmisalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang seperti peternakan sapi atau kambing.
- c. Kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengolahan industri kecil, menengah, maupun industri besar.
- d. Kredit pertambangan yaitu, jenis kredit uantuk usaha tambang yang di biyai nya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
- e. Kredit Pendidikan, merupakan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa ya ng sedang belajar.

- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor usaha lainnya

### 2.3.4 Teori Tentang Kredit

Teori kredit yang sering digunakan dalam menganalisa suatu kredit adalah Teori kelayakan kredit dari calon debitur. Dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C Menurut Muljono, Teguh Pujo (2001) adalah sebagai berikut:

#### 1. *Character* (watak)

Analisis ini untuk mengetahui watak yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah, integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

#### 2. *Capital* (modal)

Analisis ini berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban (untuk perusahaan).

#### 3. *Capacity* (kemampuan)

Adalah penilaian terhadap calon debitur dan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi utang pokok dan bunga.

#### 4. *Collateral* (jaminan)

Berdasarkan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mengandung risiko.

#### 5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam, dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit).

Menurut Muljono, Teguh Pujo (2001) Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

#### 1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

#### 2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.

#### 3. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi sektor lainnya.

#### 4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

#### 5. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Seperti modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

## 7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau maupun jaminan asuransi.

### 2.4 Macam-macam Kredit BRI

Menurut Muljono, Teguh Pujo (2001) dalam kegiatannya menyalurkan kredit kepada debitur, BRI memiliki jenis-jenis kredit yang dapat digunakan oleh para debitur. Kredit yang disediakan oleh BRI dalam menyalurkannya kepada para debitur seperti, Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP), Kredit Pensiun (KRESUN), Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Multi Guna (KMG).

#### 1. Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP)

Kredit jenis ini disalurkan oleh BRI kepada para pekerja yang memiliki gaji tetap yang berada di bawah suatu instansi pemerintah baik pusat, daerah, dan perusahaan swasta. Para golongan yang dapat mengajukan kredit ini seperti PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI, POLRI, dan pegawai swasta yang telah diangkat sebagai pegawai tetap.

Pemberian KRETAP ini dilakukan kepada pegawai dimana dalam pengajuannya terlebih dahulu mendapat rekomendasi dan adanya perjanjian kerjasama antara BRI dengan pimpinan instansi atau perusahaan pegawai bekerja. Kredit ini dapat diajukan pada semua kantor cabang dan kantor cabang pembantu BRI.

Angsuran yang harus dibayar oleh para debitur sebelumnya dilakukan kerjasama dengan instansi untuk pemotongan gaji para debitur yang mengajukan kredit di BRI. Kredit ini diberikan dalam bentuk persekot dengan angsuran secara tetap pokok dan bunga setiap bulannya.

#### 2. Kredit Pensiun (KRESUN)

Kredit pensiun merupakan bentuk kredit yang diberikan kepada para pensiunan PNS, BUMN, BUMD, TNI, POLRI, dan karyawan swasta yang

memiliki Yayasan Dana Pensiun. Kredit ini juga bisa diajukan oleh para janda atau istri para pensiunan. Pembayaran kredit sebelumnya dilakukan kerjasama dengan lembaga pensiun dan BRI. Angsuran kredit dibayarkan setiap bulannya dengan cara pemotongan gaji pensiun.

### 3. Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

Kredit umum pedesaan adalah salah satu kredit produktif yang ada di BRI. Kredit ini biasanya dilayani oleh BRI unit, namun ada juga kantor cabang yang melayani KUPeDES. Kredit ini memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha mikro yang layak.

### 4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Penyaluran kredit dilakukan di BRI unit. Kredit ini diberikan oleh BRI tanpa adanya agunan, hal ini karena KUR merupakan program pemerintah.

### 5. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit jenis ini diperuntukkan bagi kreditur yang ingin memiliki kendaraan bermotor. BRI terlebih dahulu memberikan kendaraan yang diinginkan kemudian kreditur membayar cicilan dan bunga setiap bulannya untuk pembayaran kendaraan tersebut.

### 6. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit pemilikan rumah merupakan suatu jenis kredit yang diperuntukkan bagi perseorangan, profesional maupun wiraswasta baik pembelian, membangun ataupun renovasi rumah.

### 7. Kredit Multi Guna (KMG)

Kredit multi guna merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan kepada individu yang berpenghasilan tetap ataupun tidak tetap untuk berbagai keperluan yang tidak dapat dilayani dengan SIM KKB/KPR/lainnya.

## 2.5 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, kacang tanah dan atau sorgum, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam buras dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai. Berdasarkan buku pedoman teknis KKP-E yang diterbitkan oleh Direktorat pembiayaan pertanian kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E, adalah kredit investasi dan/ atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

### 2.5.1 Usaha dan Komoditas Yang Dibiayai KKP-E

Berdasarkan buku pedoman teknis KKP-E yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian tahun 2012 dapat

1. Petani, dalam rangka pengembangan tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, koro dan pembenihan (padi, jagung dan kedelai)
2. Petnai, dalam rangka pengembangan tanaman bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nanas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, apel dan melinjo.
3. Petani, dalam rangka pengembangan tebu, pemeliharaan teh, kopi arabika, kopi robusta dan lada.
4. Peternak, dalam rangka pengembangan peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan babi.
5. Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koprasi dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai

6. Kelompok tani, dalam rangka pengadaan atau peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, tebu dan peternakan meliputi traktor, power thresher, alat tebang, corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu, biodigester, mesin pembibitan, alat tanam biji-bijian, mesin panen, mesin penggilingan padi, mesin pengupas kacang tanah, mesin penyusut singkong, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan dan kapras tebu.

Sedangkan berdasarkan permenkue 2010 tentang perubahan KKP-E dijelaskan bahwa untuk kegiatan KKP-E dapat mendanai kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pengembangan tanaman pangan
2. Pengembangan tanaman hortikultura
3. Pengembangan tanaman perkebunan
4. Pengadaan pangan seperti gabah, jagung, kedelai, dan perikanan
5. Peternakan
6. Penangkapan dan pembudidayaan ikan, dan
7. Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha

### **2.5.2 Persyaratan Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKP-E**

Berdasarkan buku pedoman teknis KKP-E yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian tahun 2012 dapat dijelaskan untuk penerima KKP-E adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Petani penerima KKP-E sebagai berikut :
  - a. Petani/peternak/pekebun mempunyai identitas diri.
  - b. Petani/peternak/pekebun dapat secara individu dan atau menjadi anggota Kelompok Tani.
  - c. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap).
  - d. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/ keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.

- e. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 100 juta per petani/ peternak/ pekebun.
  - f. Bagi petani/peternak/pekebun yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan persyaratan lain sesuai ketentuan Bank Pelaksana.
  - g. Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
  - h. Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis atau Penyuluh Pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E
2. Persyaratan Kelompok Tani penerima KKP-E sebagai berikut :
- a. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri dan atau bekerjasama dengan mitra usaha. Apabila kelompok tani bekerjasama dengan Mitra Usaha agar membuat kesepatan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra.
  - b. Kelompok tani telah terdaftar pada Balai Penyuluhan Pertanian/ Dinas Teknis terkait setempat.
  - c. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP-E.
  - d. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara.
  - e. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.
3. Persyaratan Koperasi Penerima KKP-E adalah sebagai berikut:
- a. berbadan hukum
  - b. memiliki pengurus yang aktif
  - c. memiliki anggota yang terdiri dari petani/ peternak/ pekebun
  - d. memiliki usaha di sektor pertanian

### **2.5.3 Kewajiban Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKP-E**

#### **1. Kewajiban Petani Penerima KKP-E**

- a. Petani/ peternak/ pekebun yang mengajukan kredit secara individu perlu menyusun rencana kebutuhan usahanya yang disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat/ penyuluh pertanian.

- b. Petani/ peternak/ pekebun yang menjadi anggota kelompok tani menghadiri musyawarah kelompok tani dalam penyusunan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) untuk mengajukan kebutuhan kredit.
- c. Menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E
- d. Menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus kelompok tani.
- e. Memanfaatkan KKP-E sesuai peruntukan dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya dari dinas teknis
- f. Membayar kewajiban pengembalian KKP-E sesuai jadwal

## 2. Kewajiban Kelompok Tani Penerima KKP-E

- a. Menyediakan formulir RDKK
- b. menyeleksi petani anggota calon penerima KKP-E
- c. Menyusun RDKK bersama anggotanya dan disahkan oleh pejabat yang dibeai kuasa oleh dinas teknis setempat/ penyluh pertanian.
- d. permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri, RDKK yang sudah disahkan langsung diajukan kredit kepada Bank berdasar kuasa dari anggota kelompok.
- e. Bagi kelompok tani yang mengajukan langsung kredit ke Bank, kelompok tani menandatangani akad kredit dengan pihak Bank.
- f. menerima dan menyalurkan dana kepada kelompok
- g. melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok
- i. Melakukan penagihan kepada anggota kelompok dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggungjawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada pihak Bank.

## 3. Kewajiban Koperasi Penerima KKP-E

- a. Menyeleksi kelompok tani anggota koperasi sebagai calon peserta KKP-E
- b. Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani
- c. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan Kelompok Tani

- d. Pengurus Koperasi mengajukan permohonan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana dan dilampiri rekapitulasi RDKK yang telah disahkan pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/Penyuluh Pertanian
- e. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana
- f. Menerima dan menyalurkan KKP-E dari Bank Pelaksana kepada anggotanya melalui Kelompok Tani
- g. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana
- h. Mengawasi penggunaan kredit petani /kelompoktani anggotanya
- i. Melakukan penagihan kepada kelompok tani dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana
- j. Memberikan bukti pelunasan kredit dari Bank kepada Kelompok Tani Dalam hal koperasi sebagai penerima kredit pengadaan pangan, koperasi mengajukan dan menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksan dan mengembalikan kredit sesuai jadwal.

#### **2.5.4 Fitur kredit KKP-E**

1. Limit kredit maksimal Rp. 50 juta
2. Jangka waktu kredit modal kerja sesuai siklus usaha dan tidak dapat diperpanjang dan jangka waktu kredit investasi sesuai siklus usaha dan maksimum 5 tahun.
3. Suku bunga lebih ringan dari kredit umum karena mendapat subsidi dari pemerintah

### III. KERANGKA PEMIKIRAN

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam kegiatan usahatani selain ketersediaan lahan dan tenaga kerja, ketersediaan modal merupakan faktor input yang sangat penting bagi petani karena modal sangat dibutuhkan untuk menyewa lahan, membayar tenaga kerja maupun membeli sarana produksi yang mereka butuhkan untuk bercocok tanam. Salah satu modal yang dapat diperoleh oleh petani adalah modal yang di dapat dari lembaga keuangan resmi pemerintah seperti bank. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapang para petani masih kesulitan mengakses kredit yang diberikan karena pihak bank sering menganggap bahwa kegiatan usahatani tidak dapat memberi keuntungan yang maksimal bagi pelaku usahatani. Dengan demikian hal utama yang membatasi akses petani untuk dapat memperoleh kredit dari pihak bank adalah masalah layak atau tidaknya mengambil kredit yang diberikan serta sulitnya petani kecil memperoleh akses informasi untuk mengambil kredit.

Dalam analisis kelayakan bagi calon debitur dalam hal ini petani, biasanya pihak bank akan melakukan analisis terhadap calon debitur yang akan mengambil kredit tersebut. Biasanya pihak bank akan menganalisis modal atau kekayaan petani yang akan mengambil kredit sebagai jaminan bahwa pihak debitur akan dapat mengembalikan kredit yang dipinjam dari pihak perbankan. Hal tersebut tentunya akan menjadi kendala bagi petani untuk dapat mengakses kredit dari perbankan mengingat kebanyakan tingkat skala usaha yang petani lakukan relative kecil yang diperkirakan hanya dapat memberikan hasil untuk kebutuhan sehari-hari saja sehingga terdapat anggapan bahwa kebanyakan petani akan kesulitan dalam pengembalian kredit yang akan mereka ambil. Hal yang seperti demikianlah yang menjadi salah satu faktor penyebab akses petani terhadap kredit dari bank kecil selain dari faktor kurangnya informasi dan faktor lainnya. Oleh karena itu lembaga-lembaga permodalan terutama lembaga permodalan resmi pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan kredit program pemerintah untuk membantu mengatasi masalah permodalan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha pertanian. Pihak BRI meyakini bahwa sebagian besar unit kerjanya tersebar di daerah perdesaan dengan kebanyakan nasabah bekerja

disektor pertanian. Melihat kondisi tersebut maka pihak BRI dapat memperhatikan kesejahteraan nasabahnya dengan menyediakan plafon dana khusus untuk nasabah yang bekerja disektor pertanian. Plafon dana tersebut dapat petani akses dengan mengambil kredit yang dinamakan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dimana plafon dana tersebut telah memperoleh subsidi dari pemerintah.

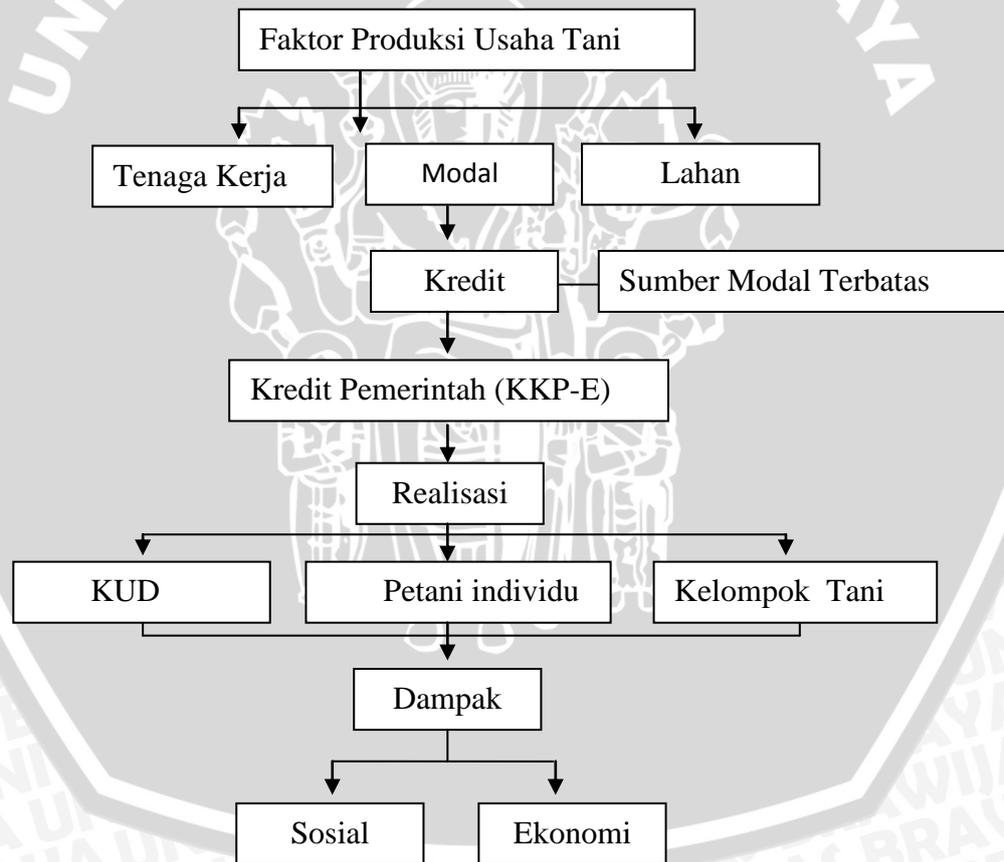
Pada kenyataannya penurunan dana KKP-E ini memiliki prosedur yang cukup menyulitkan petani dengan bantuan dinas teknis setempat dan tidak langsung disalurkan ke petani. Prosedur lain yang dirasa cukup memberatkan petani dalam mengakses dana KKP-E ini adalah terlalu banyaknya syarat yang harus diajukan pihak petani untuk memperoleh pinjaman dana KKP-E. Adanya syarat yang mengharuskan petani menjadikan tanah bersertifikat / BPKB menjadi agunan sulit dipenuhi oleh petani.

Dimana untuk mengajukan dana KKP-E ke pihak BRI, petani yang tergolong dalam kelompok tani diwajibkan untuk menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang disusun berdasarkan RKU (rencana Kebutuhan Usaha). RKU merupakan rencana kebutuhan yang harus dibuat oleh petani individu yang menjadi anggota kelompok tani tertentu yang berisi list kebutuhan apa saja yang akan diperlukan selama bercocok tanam mulai dari persiapan tanam sampai dengan pasca panen. dari kumpulan RKU inilah dibentuk RDKK yang nantinya akan dibuat oleh kelompok tani dan harus disahkan oleh diknas teknis setempat.

Selain itu proses pencairan dan pengajuan dana KKP-E sendiri dirasa cukup menyulitkan pihak petani hal ini dikarenakan proses pencairan dan proses pengajuan tidak langsung ke kelompok tani maupun petani itu sendiri melainkan harus melalui pihak lain seperti KUD maupun Koperasi. Dengan adanya perantara sebagai media yang menjembatani antara pihak petani dengan pihak BRI dirasa cukup menyulitkan petani karena petani harus membuat surat kuasa yang harus disahkan oleh diknas teknis setempat sebagai bukti dari pihak petani yang harus diajukan ke BRI saat KUD/ koperasi mengajukan dana pinjaman ke BRI. Hal tersebut dinilai cukup mempersulit dan memperlama proses peminjaman dana KKP-E yang disediakan oleh BRI.

Lebih parahnya lagi pengajuan dana tidak akan turun apabila petani maupun kelompok tani tidak memiliki avalis. Avalis merupakan lembaga yang berperan sebagai pihak penjamin dari petani untuk saat mengajukan dana KKP-E. Peran avalis ini merupakan peran penentu untuk turunnya dana pinjaman karena pihak BRI tidak ingin mengambil resiko apabila terjadi kemacetan pengembalian dana dari petani, maka pihak avalislah yang akan menanggung beban dari macetnya pengembalian dana. Pihak avalis merupakan pihak yang terbentuk dengan kesepakatan antara petani, KUD atau koperasi dengan diknas teknis setempat.

Untuk dapat mengetahui realisasi lebih lanjut mengenai plafon KKP-E dan menganalisis berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam penyaluran plafon dana tersebut dapat kita lihat kerangka gambar pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Praktis

### 3.2 Hipotesis penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis yang tertera di atas, maka untuk hipotesis yang akan diajukan adalah: Diduga setelah petani mengakses dana KKP-E, maka produksi dan pendapatan meningkat dibandingkan dengan sebelum mengakses dana KKP-E.

### 3.3 Batasan Maslah

1. Penelitian ini hanya dilakukan kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKP-E ( Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi.
2. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah mengenai jenis usaha pertanian yang dapat dibiayai KKP-E ( Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), proses pelaksanaan dan tahap penyaluran sampai dengan pengembalian dana pinjaman Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, dan pengaruh KKP-E ( Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) terhadap produksi dan pendapatan petani
3. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti hanya dibatasi pada pendapat responden mengenai proses pelaksanaan dan tahap penyaluran sampai dengan pengembalian dana pinjaman Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, dan pengaruh KKP-E ( Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) terhadap produksi dan pendapatan petani
4. Penelitian ini terbatas pada nasabah yang mengakses KKP-E ( Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi, administrasi kredit KKP-E dan dinas teknis terkait yang membantu dalam proses pecairan dana KKP-E oleh BRI Cabang Malang Kawi.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.4.1 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk menetapkan konsep yang akan dipakai untuk menggambarkan fenomena yang akan diteliti. Agar konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan dengan menurunkan variabel, yaitu sesuatu yang memiliki nilai. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu ditetapkan definisi operasional, beberapa konsep definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Realisasi merupakan suatu kondisi real yang terjadi di lapang mengenai penyaluran dana kredit dari Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, cabang Malang Kawi
2. Akses merupakan suatu bentuk dari suatu pencapaian terhadap modal yang diinginkan dari Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, cabang Malang Kawi
3. Nasabah merupakan orang yang menggunakan layanan jasa keuangan dari Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang Kawi
4. Petani adalah orang yang bekerja dalam bidang usaha pertanian unuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bercocok tanam di lahan pertanian
5. Kelompok tani merupakan kumpulan dari beberapa orang yang bekerja dalam bidang usaha pertanian unuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bercocok tanam di lahan pertanian.
6. Kredit adalah adalah penyerahan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan dan wajib untuk dikembalikan atas dasar kepercayaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.
7. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan kredit program pemerintah bersubsidi untuk petani yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang Kawi
8. Pengaruh adalah efek yang timbul dan terjadi dari suatu hal yang akan merubah suatu keadaan sebelumnya
9. Produksi merupakan hasil dari pengelolaan dari suatu kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat

10. Pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh petani kecil sebagai hasil kerja kerja keras dalam bidang usahatani
11. Dinas teknis merupakan suatu lembaga yang membantu dalam proses pengajuan yang mengesahkan RDKK dan RKU oleh petani
12. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) merupakan list dana yang dibuat oleh kelompok tani sebelum melakukan kegiatan bercocok tanam meliputi kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan dan berapa besar biaya yang dibutuhkan selama bercocok tanam.
13. RKU (Rancangan Kebutuhan Usaha) merupakan list dana yang dibuat oleh petani individu sebelum melakukan kegiatan bercocok tanam meliputi kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan dan berapa besar biaya yang dibutuhkan selama bercocok tanam.
14. Avalis merupakan lembaga yang menjadi penjamin pihak petani maupun kelompok tani kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, cabang Malang Kawi.
15. Realisasi akses petani terhadap kredit Ketahanan Pangan dan Energi dalam hal ini adalah kondisi real yang terjadi dilapang mengenai suatu pencapaian petani yang bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap peminjaman sejumlah uang dari program pemerintah yang bersubsidi untuk petani yang disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi dengan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut sesuai waktu dalam kesepakatan yang berlaku antara petani yang menggunakan jasa pelayanan keuangan dengan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang Kawi.

#### **3.4.2 Pengukuran Variabel**

pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah mekanisme realisasi dan perubahan sosial ekonomi petani setelah mengakses Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dari Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang Kawi. Pengukuran Indikator mekanisme realisasi dan perubahan sosial ekonomi petani dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Variabel dan indikator skala pengukuran penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala pengukuran
1	Mekanisme realisasi	Proses permohonan KKP-E	1. Sangat mudah 2. Mudah 3. Susah 4. Sangat susah
		Putusan dan pencairan dana	1. Sangat mudah 2. Mudah 3. Susah 4. Sangat susah
		Pengembalian pinjaman	1. Sangat mudah 2. Mudah 3. Susah 4. Sangat susah
2	Perubahan sosial	Kerukunan petani	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun
		Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun
		Aktifitas sosial	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun
		Kualitas kesehatan	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun
		Kemampuan menyekolahkan anak	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun
		Kemampuan menabung	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun
		Skill usaha	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun
Jaringan usaha	1. Meningkat 2. Tetap 3. Menurun		
3	Perubahan ekonomi	Produksi	1. sangat meningkat 2. meningkat 3. kurang meningkat 4. tetap
		Pendapatan	1. sangat meningkat 2. meningkat 3. kurang meningkat 4. tetap

## IV. METODE PENELITIAN

### 4.1 Metode Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau *purposive* yaitu berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun dan Effendi, 1995). Penelitian dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero Tbk Cabang Malang Kawi sebagai pihak penyedia dana KKP-E, KUD gondang legi sebagai penyalur dana dari pihak BRI ke kelompok tani maupun petani individu yang mengakses KKP-E serta di kota Batu dan Kepanjen sebagai lokasi maupun rumah nasabah yang mengakses KKP-E secara individu. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi merupakan salah satu Bank Cabang Malang yang cukup besar yang menyediakan dana plafon KKP-E untuk petani dengan luas cakupan daerah yang cukup luas. Dimana Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang Kawi menyalurkan plafon dana KKP-E ke kelompok tani maupun dengan petani individu melalui KUD maupun koperasi yang tersebar di beberapa kecamatan di kota Malang. Sedangkan KUD gondang legi, kota Batu dan Kepanjen dipilih berdasarkan pertimbangan dan informasi pihak BRI Cabang Malang Kawi akan sebaran lokasi nasabah yang mengakses dana KKP-E dari BRI Cabang Malang Kawi.

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei - Juni 2013. Data - data yang diperlukan sebagai bahan penelitian diambil sesuai dengan kondisi di lapang pada rentang waktu penelitian tersebut

### 4.2 Metode Penentuan Responden

Pendekatan penentuan sampling dibedakan menjadi 2 yaitu *non probability* dan *probability*. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *non probability* yaitu suatu pendekatan dengan cara pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu dan tidak semua populasi diteliti melainkan hanya sebagian dari total populasi yang ada yang dianggap

dapat mewakili dari keseluruhan populasi. pemakaian metode ini dengan pertimbangan bahwa terlalu luasnya populasi yang harus diteliti dan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian hanya menggunakan sebagian responden yang akan digunakan sebagai sampel penelitian.

Populasi dari responden dalam penelitian ini merupakan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi baik dari pelaksana administrasi kredit, dinas terkait yang membantu proses pelaksanaan KKP-E serta petani yang mengakses KKP-E. Populasi penelitian untuk petani terdiri dari petani Tebu, Apel, Salak, dan Kentang. Karena terlalu luasnya populasi dalam penelitian maka sampel penelitian hanya menggunakan beberapa sampel saja dari total populasi yang tersedia. Petani yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian dapat dilihat pada *sampling frame* dibawah ini.

Tabel 2. *Sampling frame* penelitian

No	Petani	Populasi (orang)	Sampel (orang)
1.	Tebu	6.000	24
2.	Apel	20	8
3.	Kentang	10	4
4.	Salak	1	1
Jumlah		6.031	37

Berdasarkan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yang dilakukan dalam penelitian maka sampling dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pelaksana administrasi (AO Program) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Malang Kawi.
2. Dinas teknis terkait yang membantu proses penurunan dana KKP-E ke petani.
3. 37 petani yang dapat dilihat pada tabel 2.

#### 4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah:

1. Dokumentasi, maksudnya adalah bahwa data yang dikumpulkan tersebut melalui iteratur-literatur yang ada dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

## 2. Studi Lapangan (*Study Field*), yang terbagi menjadi:

- a. Observasi, biasa disebut dengan pengamatan langsung adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan mata atau melihat secara langsung tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewguide* (panduan wawancara).
- c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan langsung dari narasumber sampel yakni 100% dari populasi nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi yang mengakses sumber permodalan KKP-E yang berprofesi sebagai petani.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber melainkan dari studi literatur, buku maupun data statistik yang sudah ada.

### 4.4 Metode Analisis Data

#### 1. Analisis Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan

dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri (Bungin, B. 2007).

Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan metode deskriptif analisis ini penelitian akan menggambarkan realisasi penyaluran, tahapan penyaluran dan turunya dana, penyaluran dana dari kelompok ke anggota sampai dengan pengembalian dana modal kredit dari pemerintah yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi. Dimana kredit tersebut berupa Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) kepada petani yang menyangkut akses petani terhadap sumber modal tersebut. Data bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan realisasi akses petani terhadap sumber modal, khususnya akses petani terhadap sumber modal KKP-E (kredit ketahanan dan pangan dan energi) yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi.

## 2. Analisis Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antarvariabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. (Marzuki, C. 1999)

Analisis Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung nilai produksi (ton), biaya produksi (Rp), dan pendapatan (Rp) serta keuntungan (Rp) petani sebelum dan sesudah mengakses dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi.

Dimana menurut Karyanto 2008 menjelaskan bahwa produksi per hektar (P) merupakan produksi yang dihasilkan dari hasil usahatannya setiap hektar. Untuk menghitung rumus produksi per hektar digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{Q}{L}$$

Dimana : P = produksi perhektar (kg/ha)  
 Q = Jumlah produksi total (kg)  
 L = Luas usaha yang diusahakan (ha)

Sedangkan biaya produksi merupakan jumlah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida dan upah tenaga kerja. Untuk mengetahui biaya produksi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$TC = \sum_{i=1}^n P_{X_i} \cdot X_i$$

dimana : TC = biaya produksi total  
 $P_{X_1} \cdot X_1$  = Biaya bibit  
 $P_{X_2} \cdot X_2$  = Biaya pupuk  
 $P_{X_3} \cdot X_3$  = Biaya pestisida  
 $P_{X_4} \cdot X_4$  = Biaya tenaga kerja (upah)

Total penerimaan sendiri merupakan hasil kali antara produksi dengan harga tingkat harga yang berlaku dipasaran. Untuk menghitung total penerimaan digunakan rumus sebagai berikut :

$$TR = P \cdot P_y$$

Dimana : TR = Total penerimaan  
 P = produksi  
 $P_y$  = harga yang berlaku

Sedangkan keuntungan sendiri merupakan hasil dari total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran. Dimana untuk menghitung keuntungan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\pi = TR - TC$$

Dimana :  $\pi$  = keuntungan

TR = total penerimaan

TC = total pengeluaran



## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Profil Perusahaan

#### 5.1.1 Sejarah Berdirinya BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama “De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Dendawijaya, Lukman (2005) menjelaskan bahwa pada periode setelah kemerdekaan RI, disebutkan bahwa BRI adalah Bank pertama pemerintah, hal ini didasarkan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 1946 Pasal 1. Dalam masa peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI pada tahun 1948, kegiatan BRI terhenti sementara waktu dan mulai katif kembali tahun 1949 yakni setelah perjanjian Renville berlangsung dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI. Kemudian berdasarkan penetapan presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan kedalam Bank Indonesia (BI) dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Satu bulan kemudian keluarlah penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural. Berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang undang-undang pokok perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang bank sentral mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor

Indonesia. Selanjutnya berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Menurut Djohan Warman (2000) sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu 100% milik pemerintah Indonesia. Akhirnya pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menjual 30% saham BRI, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk., yang sampai saat ini nama tersebut masih digunakan.

### 5.1.2 Aspek Kegiatan BRI

BRI adalah suatu unit yang melaksanakan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang bertanggungjawab kepada Kantor BRI Unit yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Unit tersebut melakukan tugasnya. Menurut Ramhadi Halim (2006) dalam menjalankan usahanya, unit kerja Bank BRI berada dibawah *supervisor* Kantor Cabang yang merupakan *profit center* selayaknya suatu unit usaha. Adapun kegiatan yang dilakukan Bank BRI Unit adalah:

1. Melayani produk dana dan jasa Bank BRI seperti Giro, Deposito, Tabungan, Transfer dan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melayani pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melayani permohonan dan memutus pinjaman sesuai wewenang (pendelegasian wewenang untuk memutus kredit) yang diberikan.
4. Melakukan kegiatan administrasi lainnya termasuk pembukuan, nota pembukuan, bukti pembukuan dan pelaporan unit kerja.
5. Melakukan kegiatan pengimputan data nasabah secara *on-line* melalui sistem BRINETS, agar data nasabah dapat diakses secara langsung dan ditransit ke *host* (kantor pusat).
6. Melakukan transaksi tunai, pemindahbukuan, dan kliring.

Adapun produk dan jasa Bank BRI merupakan sumber-sumber dana Bank BRI. Dimana pengertian sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dan untuk membiayai operasinya, dan hal itu sesuai dengan fungsi bank. Produk dan jasa Bank BRI Unit adalah giro, deposito, tabungan, transfer. Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek (surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek), bilyet giro (surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Menurut Indara Bastian (2004) Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara-syarat tertentu yang disepakati. Pengertian transfer atau pengiriman uang adalah kegiatan penyelesaian permohonan pemindahan uang/dana dari satu kantor cabang bank ke kantor cabang lainnya atau bank korespondennya di luar negeri yang dilakukan melalui sarana komunikasi yang telah dilengkapi dengan berbagai alat pengaman, diawali dengan permohonan transfer dari nasabah, diteruskan bank dengan instruksi untuk membayar sejumlah tertentu kepada orang yang disebutkan namanya dalam transfer tersebut serta pembayaran kepada nasabah.

### 5.1.3 Gambaran umum BRI Malang Kawi

#### 1. Gambaran umum perusahaan

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi terletak di jalan Kawi nomer 20-22 Malang dan merupakan salah satu dari 3 Cabang Bank terbesar yang ada di kota Malang, Jawa Timur. Lokasi BRI Cabang Malang Kawi terasa sangat strategis karena terletak di kota Malang yakni dekat dengan Alun-alun Kota Malang. Selain itu lokasi BRI Cabang Malang Kawi juga terletak di dekat area dinas lainnya seperti Perhutani serta dekat dengan tempat pembelanjaan di kota Malang seperti MOG (Malang Olimpik Garden) dan dekat dengan Stadion Gajahyana sehingga tidak akan sulit untuk mencari BRI Malang Kawi itu sendiri. Untuk bangunan dari BRI Malang Kawi ini terbilang cukup besar dengan bangunan berlantai 4 serta terdapat tulisan BRI Malang Kawi di bagian depan sehingga Bank ini tidak sulit untuk ditemukan.

Pada awalnya BRI cabang yang ada di Malang hanya ada 1 yakni BRI Cabang Malang Kawi, namun melihat kondisi Kota Malang yang cukup besar maka BRI pusat memberikan keputusan untuk membagi wilayah kerja BRI di kota Malang menjadi 3 bagian utama. Dimana untuk setiap bagian yang ada di kota Malang masing-masing di atur oleh BRI Cabang dan setiap Cabang memiliki unit kerjanya masing-masing. BRI Cabang yang ada di Malang selain BRI cabang Malang kawi ada BRI Cabang Martadinata dan Sutoyo dimana untuk setiap BRI cabang memiliki unit kerja yang berbeda dan memiliki wilayah kerja yang berbeda pula. Untuk aspek kegiatan yang dilakukan oleh BRI Cabang Malang Kawi sampai saat ini berupa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, memberi pinjaman dan lain-lain yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan warga kota Malang.

#### 2. Struktur organisasi

Struktur organisasi di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi selalu mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya rotasi pegawai yang sudah di tentukan oleh BRI Pusat dari Jakarta. Melihat kondisi tersebut, dalam penyusunan struktur organisasi di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi tidak mencantumkan nama agar PT Bank

Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi tidak perlu merubah dan membuat struktur organisasi yang baru lagi pada saat terjadi rotasi kepegawaian. Melihat kondisi seperti demikian PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi hanya menampilkan struktur organisasi secara umum saja. Dimana untuk struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang Kawi telah terlampir pada lampiran 2.

### 3. Visi dan Misi BRI Cabang Malang Kawi

BRI Cabang Malang Kawi merupakan salah satu Bank nasional yang terkemuka tertuma di kota Malang. Bank ini merupakan Bank yang memiliki tujuan kedepan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi BRI Malang Kawi sendiri. Untuk visi misi BRI Malang Kawi adalah sebagai berikut:

Visi :

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi :

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan

## 5.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah karakteristik responden untuk petani yang mengakses KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dimana petani yang mengakses dana tersebut adalah petani Tebu, Apel, Kentang dan Petani Salak. Dalam karakteristik ini akan digambarkan secara umum bagaimana karakteristik responden dilihat dari segi jenis kelamin responden, usia responden, lama bercocok tanam, tingkat pendidikan serta frekuensi menerima pinjaman KKP-E. Secara lebih terperinci karakteristik responden adalah sebagai berikut:

### 5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan aspek yang selalu berkaitan dengan gender hal ini dikarenakan jenis kelamin secara sengaja atau tidak sengaja selalu mengacu pada deferensiasi peran sosial yang menempel erat pada kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik seseorang. Dalam sektor pertanian seseorang yang memiliki kemampuan fisik lebih yang biasanya dimiliki oleh laki-laki akan menempatkan seorang laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang lebih kasar. Sedangkan kemampuan non fisik seperti ketelitian pada seorang perempuan akan menempatkan seorang perempuan pada pekerjaan yang membutuhkan fisik lebih minim dalam artian dalam kegiatan usaha tani seorang wanita tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bersifat kasar namun seorang perempuan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih membutuhkan ketelitian.

Dengan menganalisis responden dilihat dari jenis kelamin maka kita akan lebih mengetahui siapa saja yang memiliki peran lebih dalam kegiatan usaha tani untuk petani yang mengakses KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Tabel 3 berikut merupakan karakteristik responden dilihat dari aspek jenis kelamin responden.

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

jenis Kelamin	Petani							
	Tebu		Apel		Kentang		Salak	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
laki-laki	24	100	7	87,5	4	100	1	100
perempuan	-	-	1	12,5	-	-	-	-
jumlah	24	100	8	100	4	100	1	100

Sumber data : data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa hampir semua reponden baik petani tebu, petani apel, petani kentang dan petani salak lebih didominasi oleh laki-laki. Namun untuk petani apel masih ditemukan 1 responden petani apel yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut dikarenakan responden yang dijadikan sampel penelitian adalah petani pemilik lahan yang menerima KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Dari sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Dari hasil penelitian di lapang dapat dijelaskan para laki-laki adalah kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka meskipun sebageian responden juga mengakui bahwa lahan pertanian yang dimilikinya merupakan hasil dari warisan orang tua responden.

Sebagian responden menjelaskan juga bahwa pekerjaan kasar sebagai petani memang seharusnya dilakukan oleh laki-laki sedangkan perempuan lebih baik mengurus rumah tangga. Responden juga menjelaskan bahwa memang ada petani perempuan, namun posisi petani perempuan di lahan kebanyakan adalah buruh tani bukan petani pemilik lahan dan hanya sedikit perempuan yang berstatus sebagai pemilik lahan. Pemilik lahan perempuan biasanya tidak ingin bersusah payah untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan budidaya sendiri. Para pemilik lahan perempuan lebih suka untuk menyewakan lahan mereka ke petani lain, baik dengan disewakan sepenuhnya maupun dengan cara bagi hasil dengan petani lain. Dengan keadaan tersebut petani perempuan dalam hal ini adalah pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa perlu bersusah payah dengan melakukan pekerjaan kasar. Dalam budidaya apel dan kentang, para buruh perempuan akan mengerjakan pekerjaan yang tidak terlalu kasar dan membutuhkan tenaga yang lebih besar seperti kegiatan pemanenan. Namun hal tersebut berbeda pada budidaya tebu dan salak. hampir seluruh responden menjelaskan bahwa buruh tani untuk semua kegiatan budidaya sampai dengan

pengangkutan dilakukan sepenuhnya oleh laki-laki. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan budidaya sampai dengan pengangkutan diperlukan tenaga yang cukup besar sehingga buruh tani laki-laki yang akan mengerjakan kegiatan tersebut.

Dilihat dari persentase jenis kelamin responden dan dari hasil keterangan responden, dapat diketahui bahwa untuk kegiatan usaha tani lebih didominasi oleh laki-laki karena sebagian besar kegiatan usaha tani bersifat kasar dan membutuhkan banyak tenaga. Meskipun ditemukan satu petani perempuan yang memiliki lahan yang dijadikan sebagai responden, petani tersebut hanya berstatus pemilik lahan yang menyewakan lahan pertanian yang dimilikinya ke orang lain. Sedangkan untuk proses budidaya yang terjadi di lahan responden tersebut, responden tidak mengetahui secara terperinci. Responden hanya mengetahui bahwa lahan miliknya di tanami pohon apel dan pada saat musim panen apel responden akan mendapatkan sebagian apel hasil panen dan uang dari hasil penjualan apel dari lahan responden.

### 5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia menunjukkan tingkat kematangan seorang petani baik dari segi pengalaman bertani, kemampuan bertani dan besarnya tenaga seorang petani pada saat proses budidaya. Dalam karakteristik responden berdasarkan usia ini akan dilihat dalam 5 katagori usia yakni usia kurang dari 19 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun serta usia lebih dari 50 tahun.

Dimana untuk karaketristik responden petani tebu, apel, kentang, dan salak berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia (tahun)	Petani							
	Tebu		Apel		Kentang		Salak	
	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)
>19	1	4,17	-	-	-	-	-	-
20-30	4	16,67	-	-	-	-	-	-
31-40	9	37,5	2	25	4	100	-	-
41-50	6	25	5	62,5	-	-	-	-
<50	4	16,67	1	12,5	-	-	1	100
jumlah	24	100	8	100	4	100	1	100

Sumber data : Data primer dioalah tahun 2013

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa untuk karakteristik responden berdasarkan usia baik untuk petani tebu, petani apel, petani kentang dan petani salak dari semua katagori usia memiliki perbedaan persentase jumlah responden unruk setiap katagori usia. Untuk reponden dengan katagori usia kurang dari 19 tahun dari keempat petani dengan komoditas yang berbeda hanya ada satu orang petani dengan usia dibawah 19 tahun yakni petani tebu. Persentasi petani dengan katagori usia dibawah 19 tahun pada petani tebu hanya sebesar 4,17% saja dari total responden petani tebu. Untuk katagori usia dibawah 19 tahun ini hanya ada 1 petani saja, hal ini menunjukkan dari semua responden untuk semua komoditas yang dibiayai KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) untuk kelompok umur dibawah 19 tahun sangat sedikit. Sedikitnya responden yang berumur dibawah 19 tahun tersebut dikarenakan adanya persyaratan dari pihak Bank yang menyatakan bahwa untuk semua pengajuan kredit harus memenuhi syarat umur minimal 21 tahun. Satu orang responden tersebut yang berumur dibawah 19 tahun memperoleh kredit karena dalam dokumen RDKK (Rencana Definitis Kebutuhan Kelompok Tani) yang diajukan untuk syarat pengajuan pinjaman mengisi umur responden yang seharusnya 19 tahun menjadi 22 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran mengenai syarat oleh calon debitur pada saat pengajuan pinjaman.

Sedangkan untuk kelompok umur 20-30 tahun hampir sama dengan kelompok umur dibawah 19 tahun. Semua responden dari petani dari 4 komoditas pertanian tersebut hanya ada 4 petani saja dimana petani tersebut adalah responden dari petani tebu. Dilihat dari keseluruhan petani tebu untuk semua kelompok umur responden, untuk kelompok umur ini memiliki persentase sebesar 16,67%. Pembiayaan untuk petani tebu masih diberikan untuk kelompok umur ini meskipun hanya 16,67% saja dari total responden petani tebu. Pihak Bank masih mau memberikan pembiayaan kepada kelompok umur ini meskipun pihak Bank memiliki asumsi bahwa untuk kelompok umur ini masih kurang banyak pengalaman dan kurang matang dalam budidaya. Pembiayaan tersebut dilakukan oleh pihak Bank, dikarenakan pihak Bank merasa tidak beresiko untuk memberikan pinjaman, karena responden merupakan petani tebu yang dana pinjaman dijamin akan dikembalikan oleh PG (Pabrik Gula) yang menaungi

petani tersebut. Berbeda halnya dengan petani apel, kentang dan salak, meskipun petani dari 4 komoditas tersebut memiliki kisaran kelompok umur yang sama, pihak Bank tidak akan memberikan pinjaman. Kebijakan Bank tersebut didasarkan alasan selain kurang matangnya kematangan pada kelompok umur ini baik secara kemampuan dan pengalaman, untuk petani dengan 3 komoditas tersebut tidak memiliki jaminan yang kuat. Jaminan yang diberikan oleh petani apel, kentang, dan salak tersebut kurang kuat dikarenakan tidak adanya avalis (lembaga yang menjamin pinjaman responden akan kembali ke pihak Bank) sehingga pihak Bank menganggap akan lebih berisiko untuk meminjamkan kredit kepada pihak yang tidak memiliki lembaga untuk menjamin mereka.

Apabila dilihat dalam tabel 4 untuk kelompok usia 31-40 tahun untuk semua petani kecuali petani salak sudah menerima pinjaman kredit dari pihak Bank. Petani tebu untuk kelompok ini yang mendapat pinjaman sebanyak 9 orang dari total responden atau sebesar 37,5% dari total responden. Petani apel yang memperoleh pinjaman sebanyak 2 orang dari total responden atau sebesar 25%, sedangkan untuk petani kentang semua responden yang memperoleh pinjaman KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) tergolong dalam kelompok umur ini. Hal tersebut didukung dengan asumsi dari pihak Bank yang menyatakan bahwa calon debitur yang potensial adalah calon debitur dengan usia antara 30 sampai 40 tahun. Calon debitur dengan kelompok usia tersebut cenderung lebih matang dalam hal kemampuan, skill, dan tanggung jawab atas apa yang mereka ajukan ke pihak Bank.

Responden dengan kelompok usia 41-50 tahun yang masih mendapatkan pinjaman adalah responden dari petani tebu dan petani apel. Jumlah responden petani tebu untuk usia ini adalah 6 orang atau sebesar 25% dari total responden petani tebu, dan 62,5% untuk petani apel. Pembiayaan untuk responden di kelompok usia ini untuk petani tebu dikarenakan untuk petani tebu tidak ada resiko bagi Bank. Untuk petani apel, pembiayaan untuk usia responden terbanyak adalah untuk kelompok usia ini. Menurut keterangan responden, petani yang memiliki kedudukan cukup tinggi dalam kelompok tani adalah petani dengan usia 41-50 tahun oleh karena itu kelompok usia ini yang paling banyak mendapatkan pinjaman.

Untuk kelompok usia diatas 50 tahun yang mendapat pinjaman adalah petani tebu, apel, dan salak. Petani tebu yang memperoleh pinjaman sebanyak 4 orang atau sebesar 16,67% dari total responden, 12,5% untuk petani apel dan 100% untuk petani salak. Sama dengan alasan sebelumnya, untuk petani tebu akan dibiayai untuk semua kelompok umur dikarenakan pemberian pinjaman ke petani tebuk tidak memiliki resiko. Untuk petani apel tetap diberikan pinjaman untuk usia ini pada 1 orang saja karena kedukan satunya-satunya petani apel yang mengajukan kredit ini dengan umur diatas 50 tahun adalah ketua gabungan kelompok tani (gapoktan) sehingga pihak bank merasa tidak perlu kuatir untuk memberikan pinjaman ke responden. Asumsi dari bank adalah ketua gapoktan merupakan oarang yang paling berpengaruh dalam gapoktan petani apel didaerah tersebut dan banyak oarang yang percaya pada beliau sehingga pihak Bank juga percaya untuk memberikan pinjaman kepada responden. Sedangkan untuk petani salak sampai dengan saat ini hanya ada satu orang saja yang dibiayai KKP-E oleh BRI dan pembiayaan salak ini masih tergolong baru. Petani salak tersebut mendapat pinjaman dikarenakan petani salak tersebut sebelum berprofesi sebagai petani merupakan pegawai BRI yang sudah dikenal dikalangan BRI. Kondisi demikian yang menjadikan alasan bahwa responden dengan usia diatas 50 tahun ini masih diberikan pinjaman oleh pihak BRI.

### **5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bercocok Tanam**

Lamanya bercocok tanam seorang petani dapat dijadikan ukuran seberapa besar pengalaman petani dalam kegiatan budidaya. Dalam penelitian ini lamanya bercocok tanam petani akan dikategorikan menjadi 5 katagori yakni kurang dari 5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun, dan lebih dari 21 tahun.

Dimana untuk karakteristik responden petani tebu, petani apel, petani kentang dan petani salak dilihat dari lama bercocok tanam dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Karakteristik responden berdasarkan Lama bercocok tanam

Lama bercocok tanam (tahun)	Petani							
	Tebu		Apel		Kentang		Salak	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
>5	5	20,83	-	-	-	-	1	100
6-10	3	12,5	-	-	-	-	-	-
11-15	3	12,5	-	-	4	100	-	-
16-20	2	8,33	1	12,5	-	-	-	-
<21	11	45,83	7	87,5	-	-	-	-
jumlah	24	100	8	100	4	100	1	100

Sumber data: data primer, diolah tahun 2013

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa untuk semua petani responden dari empat komoditas yang berbeda memiliki pengalaman yang bervariasi. Untuk lama bercocok tanam petani yang kurang dari 5 tahun hanya dimiliki oleh petani tebu dan petani salak. Petani tebu yang memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun ada 5 orang dari total responden petani tebu atau sekitar 20,83% sedangkan untuk petani salak yang hanya 1 responden saja juga memiliki pengalaman bercocok tanam kurang dari 5 tahun. Petani salak yang memiliki pengalaman bertani yang kurang lama ini dikarenakan petani salak tersebut baru terjun ke dunia pertanian setelah beliau pensiun dari pekerjaan sebelumnya.

Pengalaman bercocok tanam untuk kisaran 6 sampai 10 tahun hanya dirasakan oleh petani tebu saja dengan jumlah petani yang memiliki pengalaman bercocok tanam kategori ini hanya sebanyak 3 orang saja dari total responden petani tebu. Sedangkan petani tebu yang memiliki pengalaman bercocok tanam sekitar 11 sampai 15 tahun juga hanya 3 orang atau sebesar 12,5% dari total responden petani tebu. Berbanding terbalik dengan petani kentang, semua responden petani kentang memiliki pengalaman bercocok tanam antara 11-15 tahun. Petani kentang tersebut menjelaskan bahwa mereka baru memiliki pengalaman bercocok tanam antara 11-15 tahun dikarenakan mereka banyak yang melanjutkan studi dulu sampai menjadi sarjana.

Untuk pengalaman bercocok tanam anatar 16-20 tahun hanya ada pada petani tebu dan apel. Petani tebu yang memiliki pengalaman bercocok tanam kategori ini hanya 2 orang atau 8,33% dari total responden petani tebu sedangkan

petani apel hanya 12,5% atau 1 orang dari total responden petani apel. Berdasarkan data petani responden yang memiliki pengalaman bertani lebih dari 21 tahun lebih dominan dibandingkan dengan katagori pengalaman bertani yang lain. Untuk katagori ini hanya dialami oleh petani tebu dan petani apel saja. petani tebu yang memiliki pengalaman bertani katagori ini sebesar 45,83% artinya hampir separuh responden petani tebu memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun. Untuk petani apel sendiri 7 diantaranya atau sekitar 87,5% dari total responden petani apel memiliki pengalaman bercocok tanam lebih dari 21 tahun.

#### 5.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan ukuran dasar untuk melihat kemampuan responden secara akademis. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin besar pula jiwa intelektual yang dimilikinya. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini di bagi dalam 5 katagori yakni : tidak lulus SD (Sekolah dasar), lulus SD, lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama), lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) dan lulus kuliah. Dimana untuk karakteristik responden berdasarktingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	Petani							
	Tebu		Apel		Kentang		Salak	
	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)
Tidak lulus SD	6	25	1	12,5	-	-	-	-
Lulus SD	14	58,33	-	-	-	-	-	-
Lulus SMP	1	4,12	1	12,5	-	-	-	-
Lulus SMA	3	12,5	5	62,5	1	25	-	-
Lulus Kuliah	-	-	1	12,5	3	75	1	100
jumlah	24	100	8	100	4	100	1	100

Sumber data : data primer, diolah tahun 2013

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa karakteristik responden beragam untuk setiap petani. Untup petani tebu dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SD dengan persentase sebesar 58,33% berikutnya untuk terbanyak kedua adalah tidak lulus SD dengan persentase sebesar 25%. Untuk tamatan SMP memiliki presentasi sebesar 4,12% dan untuk tamatan SMA sebesar 12,5%. Berdasarkan

tabel tidak ditemukan responden dengan lulusan kuliah. Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar reponden petani tebu memiliki pendidikan terakhir tamatan SD. Setelah lulus SD sebagian besar responden memilih untuk membantu oarang tua responden untuk bercocok tanam tebu dilahan sehingga responden tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu pengalaman responden sudah cukup lama dalam bercocok tanamn dikarenakan responden lebih memilih membantu orang tua di lahan dibandingkan dengan meneruskan sekolah.

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa untuk petani apel yang tidak tamat SD, tamatan SMP, dan tamat Kuliah masing-masing memiliki presentasi sebesar 12,5% dari total responden. Untuk presentasi terbesar yakni sebesar 62,5% adalah petani dengan lulusan SMA. Dari tabel 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah lulusan SMA. Meskipun responden sebagian besar lulusan SMA responden sudah mulai membantu orang tuanya bertani Apel dari SD setelah pulang sekolah. Sehingga setelah responden sekolah responden biasanya akan membantu orang tua responden untuk bertani. Dengan demikian responden memiliki cukup banyak pengalaman selama bertani apel ini.

Untuk pendidikan terakhir responden petani kentang, dari 4 responden 3 diantaranya lulusan kuliah dan 1 responden lulusan SMA. Melihat karakteristik lulusan responden yang sebagian besar adalah lulusan kuliah dengan presentasi sebesar 75%, tidak heran petani kentang disini cukup sukses. Pengaruh kuliatas pendidikan yang responden jalani sangat besar terutama untuk kesuksesan responden. Oleh karena itu kualitas kentang hasil produksi responden merupakan kualitas ekspor sehingga harga kentang responden lebih tinggi dibandingkan dengan harga kentang lainnya. Sedangkan untuk petani salak sendiri memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi yakni lulusan kuliah. Hal tersebut dikarekan responden petani salak sebelumnya bekerja di Bank sehingga tingkat pendidikan responden sangat diperhatikan oleh bank sebagai syarat diterima bekerja di bank.

### 5.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Menerima KKP-E

Dengan melihat frekuensi responden yang menerima KKP-E maka akan diketahui petani dari komoditas apa saja yang sering memperoleh pinjaman dana sehingga kita dapat melihat sudah berapa lama KKP-E disalurkan untuk komoditas pertanian. Untuk semua responden menjelaskan bahwa mereka baru pertama kali memperoleh pinjaman KKP-E. Untuk itu perlu diketahui berapa perbandingan persentasi petani sampel yang mengakses KKP-E. Dimana karakteristik responden berdasarkan frekuensi responden menerima KKP-E dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Karakteristik responden berdasarkan frekuensi menerima KKP-E

No	Petani	Frekuensi menerima KKP-E	Jumlah penerima	Persentasi penerima (%)
1.	Tebu	1	24	64,8
2.	Apel	1	8	21,6
3.	Kentang	1	4	10,8
4.	Salak	1	1	2,7
Jumlah			37	100

Sumber data : data primer, diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa semua responden baik petani tebu, petani apel, petani kentang maupun petani salak baru menerima satu kali KKP-E. Untuk petani apel, dan petani kentang dan pada awalnya tidak mengetahui adanya KKP-E dikarenakan kurang adanya informasi dan sosialisasi KKP-E ini sehingga mereka baru mendapatkan pinjaman untuk pertama kalinya. Untuk petani salak sebelumnya responden sudah mengetahui tentang adanya KKP-E ini saat masih bekerja di Bank, namun responden baru bisa mengakses setelah responden sudah pensiun dan berkerja di sektor pertanian. Petani salak ini juga baru pertama kalinya memperoleh pinjaman KKP-E ini. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya frekuensi responden menerima pinjaman KKP-E ini dikarenakan responden kurang mengetahui informasi dan kurang menyebarnya sosialisasi KKP-E ke petani-petani yang ada.

### 5.3 Jenis Usaha Yang Dibiayai KKP-E BRI Cabang Malang Kawi

Secara garis besar jenis usaha yang dapat dibiayai KKP-E melalui BRI terdiri dari 6 jenis usaha yakni kredit untuk usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, ansintan, dan perikanan. Untuk tanaman pangan lebih difokuskan untuk pembiayaan Padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah, perbenihan padi, perbenihan jagung, perbenihan kedelai. Untuk penyaluran dana KKP-E untuk subsektor hortikultura BRI memfokuskan untuk pembiayaan Bawang, cabe, kentang, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberry, mangga, durian, jeruk, dan apel. Untuk KKP-E perkebunan lebih difokuskan untuk pembiayaan Budidaya tebu, teh, kopi robusta, kopi arabika. Sedangkan pembiayaan KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) peternakan akan difokuskan untuk pembiayaan Sapi, kambing, kerbau, ayam, itik, burung puyuh. Untuk KKP-E ansintan atau pengadaan dan peremajaan alat dan mesin sampai dengan sekarang masih difokuskan untuk pembiayaan Traktor, thresher, alat tebang, corn sheller, mesin pembibitan, mesin pengayak padi bermotor, mesin penggiling padi, mesin perontok polong kacang, tanah, alat pembuat alur, (harus kelompok/koperasi). Sedangkan untuk sektor perikanan KKP-E dari BRI dapat membiayai pengajuan kredit untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Untuk penangkapan ikan meliputi kegiatan usaha penangkapan dgn menggunakan alat tangkap pancing, jaring dan pukat beserta turunannya. Sedangkan Pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan usaha pembudidayaan udang, bandeng, kerapu, kakap, nila, gurame, patin, lele, ikan mas, dan rumput laut.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak AO (*account officer*) BRI Cabang Malang Kawi yang menangani masalah KKP-E, dapat diketahui bahwa BRI Cabang Malang Kawi telah melakukan pembiayaan KKP-E untuk sektor peternakan dan pertanian. Dimana pembiayaan KKP-E untuk sektor peternakan sampai saat ini masih dilakukan untuk pembiayaan sapi perah. Sedangkan untuk sektor sektor pertanian pihak BRI dapat memberikan pembiayaan untuk sektor tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura saja. Dimana untuk proses penyaluran KKP-E untuk sektor pertanian dibagi menjadi 3 proses penyaluran, yakni :

1. KKP-E melalui KUD
2. KKP-E melalui Kelompok tani
3. KKP-E individual

Untuk KKP-E yang disalurkan melalui KUD terfokus untuk tanaman perkebunan yakni untuk petani Tebu saja. Sedangkan KKP-E yang disalurkan melalui Kelompok Tani diberikan untuk petani hortikultura, yakni diberikan kepada petani Apel dan Kentang. Untuk KKP-E individual sendiri tergolong masih baru dilaksanakan oleh pihak BRI Cabang Malang Kawi sendiri. Petani yang dapat mengakses KKP-E individual ini adalah petani Salak.

Sedangkan prosentase peminjaman KKP-E sektor Pertanian yang dilakukan di BRI Cabang Malang Kawi dapat dilihat dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Persentase Peminjaman KKP-E di BRI Cabang Malang Kawi

No	Proses penyaluran	Yang dibiayai	Jumlah penyalur	Jumlah petani pengakses (orang)	Persentase (%)
1.	Melalui KUD	Tebu	22 KUD	6.000	99,48
2.	Melalui Kelompok Tani	Apel	2 kelompok	20	0,33
		Kentang	1 kelompok	10	0,17
3.	Individual	Salak	1 orang	1	0,02
Jumlah				6.031	100

Sumber : keterangan AO (*account officer*) BRI Cabang Malang Kawi

Berdasarkan tabel 8 yang tertera di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan KKP-E BRI Cabang Malang Kawi untuk sektor pertanian didominasi oleh pembiayaan untuk KKP-E tanaman Tebu yang disalurkan melalui KUD dengan tingkat persentase petani pengakses sebesar 99,48% dari total petani yang mengakses dana KKP-E tersebut. Sedangkan urutan berikutnya ditempati oleh KKP-E dengan penyaluran melalui kelompok tani. Berdasarkan tabel 2 di atas untuk penyaluran KKP-E melalui kelompok tani terdiri dari 2 jenis pembiayaan yakni untuk pembiayaan tanaman Apel dengan tingkat prosentase petani yang mengakses sebesar 0,33% dan di ikuti oleh petani Kentang dengan

tingkat prosentase petani yang mengakses sebesar 0,17% dari total petani yang mengakses dana KKP-E dari BRI Cabang Malang Kawi tersebut. Sedangkan untuk KKP-E individual menempati urutan terendah. Hal ini dikarenakan untuk KKP-E individual BRI Malang Kawi masih tergolong baru dan baru berjalan pada tahun 2013. Berdasarkan data diatas jumlah petani individu yang mengakses KKP-E individu sampai dengan saat ini masih 1 orang saja, dimana 1 Orang tersebut hanya memiliki prosentasi sebesar 0,02% dari total 6.031 orang.

Pembiayaan KKP-E terbesar diberikan ke petani tebu dikarenakan pihak Bank tidak memiliki resiko dari pemberian pinjaman ke petani tebu. Pemberian pinjaman ke petani tebu tidak beresiko dikarenakan pada awalnya pihak Bank pusat sudah mengadakan Perjanjian dengan pihak RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) yang merupakan perusahaan inti yang membawahi Pabrik Gula (PG) di Indonesia. Dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pihak Bank akan memberikan pinjaman dengan bunga ringan yakni dengan memberikan pinjaman kredit yang sudah diprogram pemerintah dalam hal ini KKP-E yang akan diberikan kepada petani-petani yang terikat oleh pabrik gula di seluruh Indonesia. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pemberian kredit kepada petani tebu tidak semata-mata diberikan begitu saja namun harus ada jaminan bahwa dana yang dipinjamkan akan kembali ke pihak Bank, maka dalam perjanjian ditentukan lembaga penjamin pinjaman (avalis) adalah PG (pabrik gula) yang mengikat petani tebu yang dibiayai nantinya. Oleh karena itu seberapa besarpun dana yang dipinjamkan ke petani tebu pihak bank tidak memiliki resiko dikarenakan sudah ada perjanjian tertulis antara BRI pusat dengan RNI serta dengan adanya avalis yang akan menjamin dana pinjaman akan kembali seutuhnya.

Persentasi pembiayaan KKP-E non tebu sangat kecil dikarenakan pembiayaan KKP-E non tebu seperti apel, kentang dan salak masih memiliki resiko. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya pembiayaan KKP-E ini tanpa adanya jaminan meskipun pada prakteknya pihak Bank masih meminta jaminan surat tanah usaha debitur. Selain alasan tidak adanya jaminan yang pasti, belum ada perjanjian tertulis adanya penjamin atau avalis untuk pembiayaan non tebu. Kondisi yang demikian yang menyebabkan persentasi penyaluran KKP-E non tebu jauh lebih kecil dibandingkan dengan KKP-E untuk pembiayaan tebu.

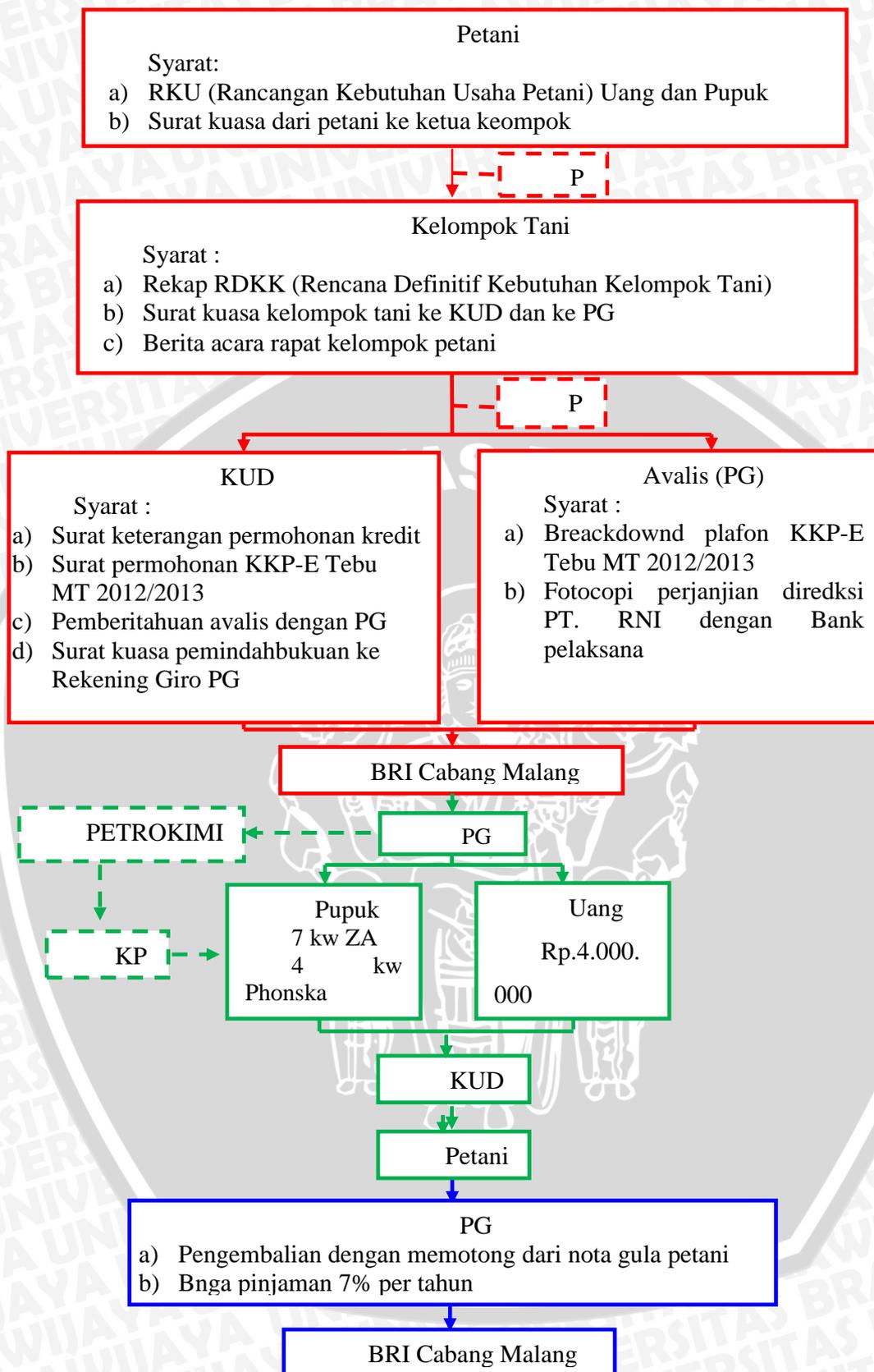
## 5.4 Mekanisme Realisasi KKP-E BRI Cabang Malang Kawi

Mekanisme realisasi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan dan proses dari penyaluran yang terjadi. Setiap tahapan yang terjadi akan memiliki prosedur yang berbeda-beda. Secara garis besar mekanisme realisasi KKP-E untuk semua pembiayaan KKP-E yang dilakukan oleh BRI Cabang Malang Kawi baik untuk KKP-E tebu, apel, kentang dan salak melalui 3 tahapan yang sama. Tahapan mekanisme realisasi KKP-E tersebut terdiri dari proses permohonan kredit, putusan dan pencairan dana serta pengembalian pinjaman. Dari hasil temuan dilapang dapat diketahui bahwa meskipun secara garis besar penyaluran KKP-E melalui tahapan yang sama namun proses yang terjadi di lapang tidak selalu sama untuk setiap pembiayaan. Untuk mekanisme realisasi KKP-E untuk pembiayaan tebu, apel, kentang dan salak adalah sebagai berikut.

### 5.4.1 Mekanisme Realisasi KKP-E

#### 1. Mekanisme Realisasi KKP-E Tebu

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) tebu disalurkan melalui KUD (Koprasi Unit Desa) yang bekerja sama dengan pihak PG (Pabrik Gula) yang berperan sebagai avalis (lembaga yang menjamin kredit). Dengan adanya avalis yang menjamin kredit inilah yang menyebabkan pihak Bank tidak akan ragu menyalurkan sebageian besar plafon dana pinjaman KKP-E ke petani tebu. Alasan lain yang menyebabkan pihak BRI Malang Kawi lebih mengutamakan pembiayaan ke petani tebu adalah dikarenakan pihak BRI pusat sudah bekerja sama dengan pihak RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) untuk penyaluran plafon pembiayaan KKP-E. Proses mekanisme realisasi KKP-E untuk petani tebu mulai dari permohonan sampai dengan pengembalian pinjaman dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gamabar 2. Realisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Tebu

Keterangan gambar :

- Proses permohonan kredit
- Proses putusan dan penurunan dana
- Proses pengembalian dana pinjaman
- Proses mekanisme realisasi
- - - Pihak yang membantu realisasi

Gambar 2 di atas merupakan gambar yang menjelaskan proses mekanisme realisasi KKP-E tebu baik dari proses permohonan, putusan dan penyaluran dana serta proses pengambilan dana pinjaman KKP-E. Berdasarkan gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa untuk proses permohonan KKP-E tebu dilakukan oleh KUD (Koprase Unit Desa) dan PG (Pabrik Gula) sebagai lembaga yang mewakili petani untuk mengajukan pinjaman KKP-E. Perwakilan tersebut dilakukan karena terlalu banyaknya petani tebu yang mengajukan pinjaman sehingga diperlukan lembaga yang mengelola dan mengatur peminjaman KKP-E yang diajukan oleh petani. Namun sebelum pihak KUD dan PG melakukan peminjaman KKP-E ke BRI pihak pemohon kredit atau calon debitur harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain harus dilengkapi oleh petani tebu itu sendiri yang mengajukan pinjaman, persyaratan kelompok tani, persyaratan KUD serta persyaratan untuk PG sebagai avalis KKP-E tebu.

Untuk pengajuan KKP-E tebu ini, petani tebu harus tergolong dalam kelompok tani tertentu dan kelompok tani tersebut harus terdaftar dalam KUD binaan PG. Petani tebu yang akan mengajukan pinjaman KKP-E selain harus terdaftar dalam kelompok tani, petani juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani individu adalah petani tebu individu tersebut harus menyusun RKU (Rancangan Kebutuhan Usaha) untuk musim berikutnya. Dimana penyusunan RKU ini dibagi menjadi 2 bagian yakni penyusunan RKU untuk kebutuhan pupuk dan RKU untuk kebutuhan uang. Untuk pembuatan RKU ini harus didampingi oleh dan disahkan oleh PPL (Penyuluh lapang). Setelah pembuatan RKU uang tunai dan RKU pupuk selesai petani juga harus membuat surat kuasa yang ditunjukkan ke kelompok tani yang diikuti oleh petani tersebut. Dalam surat kuasa tersebut harus ditandatangani oleh petani dan ketua kelompok tani dimana pada saat penandatanganan ini dilakukan di hadapan PPL. Tujuan penandatanganan ini dilakukan di depan PPL adalah untuk pembuktian bahwa surat kuasa tersebut benar-benar dibuat dan disahkan oleh PPL. Setelah pembuatan surat kuasa sudah disahkan oleh PPL berarti proses berikutnya untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Kelompok tani.

Proses lanjutan yang dilakukan oleh kelompok tani ini antara lain adalah melengkapi persyaratan untuk kelompok tani dan pengajuan ke KUD sebagai penyalur KKP-E Tebu dan pengajuan ke PG sebagai avalis KKP-E tebu. Syarat yang harus dilengkapi oleh kelompok tani adalah rekap RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani), surat kuasa ke KUD dan PG serta berita acara rapat anggota kelompok tani. Pembuatan rekap RDKK ini berdasarkan RKU setiap petani yang mengajukan pinjaman, sehingga dalam pembuatan rekap RDKK ini juga ada 2 jenis RDKK yakni rekap RDKK uang tunai dan RDKK pupuk. Sama halnya dengan pembuatan RKU pembuatan RDKK ini juga harus didampingi dan disahkan oleh PPL setempat. Selain itu kelompok tani juga harus membuat surat kuasa untuk KUD dan PG yang harus ditandatangani ketua kelompok, perwakilan KUD dan perwakilan PG yang harus di tandatangani dan disahkan oleh PPL setempat. Proses mekanisme realisasi yang dilakukan oleh kelompok tani ini juga mengahruskan kelompok tani menyertakan berita acara rapat kelompok tani dengan disertai nama anggota. Tujuan penyerahan berkas ini adalah untuk mengetahui bahwa petani yang mengajukan pinjaman kredit ini benar-benar anggota kelompok tani tersebut.

Sebelum pihak KUD dan pihak PG datang ke Bank untuk mengajukan pinjaman, pihak KUD dan pihak Bank juga harus melengkapi persyaratan untuk KUD dan PG. Persyaratan untuk KUD antara lain adalah Surat keterangan permohonan kredit koperasi, surat permohonan KKP-E Tebu MT 2012/2013, surat keterangan avalis dengan PG serta surat kuasa pemindahbukuan ke rekening giro PG. Sedangkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak PG antara lain Breackdown plafon KKP-E Tebu MT 2012/2013, dan fotocopi perjanjian direksi PT. RNI dengan Bank pelaksana. Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi baik untuk persyaratan petani individu, kelompok tani, KUD dan PG, maka sesuai dengan surat kuasa pihak PG dan KUD yang akan mengajukan pinjaman ke Bank.

Setelah proses permohonan dan persyaratan sudah masuk ke Bank, maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Bank adalah pemeriksaan kelengkapan dan usaha calon debitur. Pemeriksaan kelengkapan dan usaha calon debitur ini merupakan hal penting yang harus dilakukan. Pemeriksaan ini nantinya

yang akan menentukan apakah usaha benar-benar sudah sesuai dengan dokumen yang diberikan dan layak untuk mendapatkan pinjaman. Proses ini dilaksanakan setelah proses permohonan sudah masuk ke pihak BRI, pihak BRI akan melakukan pengecekan persyaratan kredit yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman dana. Setelah pengecekan peminjaman dana pihak AO (account officer) program yang menangani pembiayaan KKP-E akan melanjutkan untuk memeriksa usaha calon debitur dalam hal ini memeriksa kebenaran kondisi lahan dan kemungkinan prospek mendatang dari lahan yang diajukan untuk dibiayai melalui KKP-E. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mewawancarai calon debitur maupun dengan mencari informasi dari orang lain yang mengenal debitur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari data yang akurat sesuai dengan RDKK yang dibuat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis usaha calon debitur. Kriteria pemeriksaan tersebut antara lain meliputi :

1. Usaha benar-benar sesuai keterangan yang tercantum di RDKK
2. Domisili calon debitur benar-benar sesuai dengan KTP yang telah diberikan
3. Calon debitur memiliki sifat yang baik
4. Calon debitur memiliki prospek yang baik akan lahan Tebu yang dimiliki

Setelah proses ini dilakukan oleh pihak BRI dan pihak BRI sudah mengetahui calon debitur sesuai dengan kriteria yang ada maka pihak BRI akan memberi keputusan apakah calon debitur ini akan disetujui untuk diberikan pinjaman atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa putusan dan pencairan dana ditentukan oleh survey lapang yang dilakukan oleh pihak Bank.

Sebelum dana diturunkan pihak BRI akan melakukan akad kredit dengan pihak Perwakilan KUD dan perwakilan PG dengan disaksikan oleh ketua atau perwakilan kelompok tani dan perwakilan anggota kelompok tani untuk mengesahkan akad kredit tersebut. Pihak Kelompok Tani maupun anggota Kelompok Tani tidak berhak ikut tandatangan dalam perjanjian akad kredit. Hal tersebut disebabkan penyaluran dana tidak langsung masuk ke rekening kelompok tani maupun ke rekening anggota kelompok tani melainkan masuk melalui PG (avalis).

Proses penurunan dana KKP-E Tebu akan masuk ke rekening PG (avalis) dalam bentuk uang tunai yang kemudian pihak avalis akan menyalurkan ke petani

langsung melalui KUD. Dimana dana yang diterima oleh petani tidak seutuhnya berupa Uang, tetapi berupa uang ditambah pupuk. Untuk pupuk nantinya pihak PG yang akan membelikan ke pihak petrokimia dan nantinya akan disalurkan ke KUD melalui KPTR. Dimana untuk rincian dana uang tunai maupun pupuk yang disalurkan ke petani sepenuhnya diserahkan ke pihak KUD dalam pembagiannya. Untuk pencairan dana KKP-E dalam bentuk uang, melalui beberapa tahapan. Dimana dana dari BRI tidak langsung masuk ke petani melainkan masuk ke PG terlebih dahulu. Setelah dana masuk ke rekening giro PG, pihak PG akan membagikan dana ke KUD-KUD yang bekerjasama dengan pihak PG dalam pengajuan pinjaman KKP-E Tebu tersebut. Setelah dana diplotkan dan di bagikan per KUD dan dana sudah masuk ke rekening KUD, KUD akan membagikan dana ke kelompok tani yang mengajukan KKP-E melalui KUD yang bersangkutan sesuai dengan RDKK yang diterima oleh KUD. Setelah dana masuk ke Kelompok tani, barulah ketua kelompok tani yang akan membagikan dana uang langsung ke anggota kelompok tani sesuai dengan RDKK individual petani masing-masing.

Sedangkan untuk proses pencairan KKP-E berupa pupuk memiliki tahapan yang berbeda dengan pencairan dana uang tunai. Dimana untuk pencairan KKP-E yang berupa pupuk untuk proses pemberian dana berupa pupuk melalui tahap yang berbeda dengan tahap pemberian dana berupa uang yang tertera pada gambar 5. Berdasarkan gambar 6 di atas dapat diketahui bahwa pihak PG mendapat uang tunai dari pihak BRI, kemudian uang tunai tersebut akan dibelikan 7 kw pupuk ZA, 4 kw pupuk Ponska, dan 20 kw pupuk organik untuk setiap petani ke Petrokimia. Pembelian pupuk disesuaikan dengan semua RDKK yang masuk dari semua KUD yang bekerja sama dengan PG untuk meminjam dana KKP-E ke BRI. Setelah pupuk sudah datang ke PG, pihak PG tidak menyalurkan pupuk langsung ke KUD melainkan disalurkan dulu melalui KPTR. Tugas KPTR adalah membagikan sejumlah pupuk untuk setiap KUD sesuai dengan RDKK setiap KUD. Tahap berikutnya, setelah pupuk masuk ke KUD, KUD akan membagikan pupuk yang diperoleh ke kelompok-kelompok tani sesuai dengan jumlah RDKK pupuk masing-masing kelompok tani. Sedangkan

pembagian pupuk ke petani akan dibagikan oleh kelompok tani masing-masing dimana pembagian pupuk ini disesuaikan dengan RDKK petani individual.

Untuk rincian dana dan pupuk yang diperoleh petani yang mengakses KKP-E tebu dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Rincian dana dan pupuk yang diperoleh petani Tebu/ ha

No	Jenis	Keterangan	Banyaknya
1	Uang (dalam juta rupiah)	Uang tunai	4
2	Pupuk (dalam Kwintal)	Pupuk za	7
		Pupuk ponska	4
		Pupuk organik	20

Sumber : data primer, diolah 2013

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui untuk setiap ha lahan yang dimiliki oleh petani, petani akan memperoleh uang sebesar Rp.4.000.000,00 beserta 3 macam pupuk yakni pupuk 7 kw pupuk Za, 4 kw pupuk ponska, dan 20 kw pupuk organik.

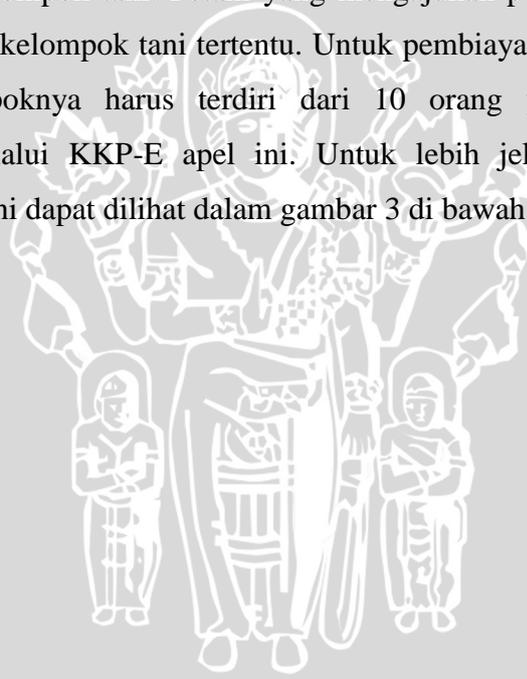
Proses mekanisme realisasi KKP-E tebu yang terakhir adalah pengembalian kredit dari petani ke pihak Bank. Untuk petani tebu yang meminjam dana KKP-E tebu tersebut mengembalikan dana pinjaman ke BRI melalui PG dengan cara pemotongan nota gula hasil giling. Hasil panen tebu dari petani nantinya akan langsung masuk ke pabrik dan pihak pabrik akan mengola gula dan membeli gula tersebut. Setelah gula tersebut dibeli maka petani akan mendapat nota gula yang nantinya bisa ditukarkan ke bagian keuangan pabrik. Namun pihak petani yang meminjam KKP-E akan mendapatkan potongan untuk pelunasan KKP-E ke BRI.

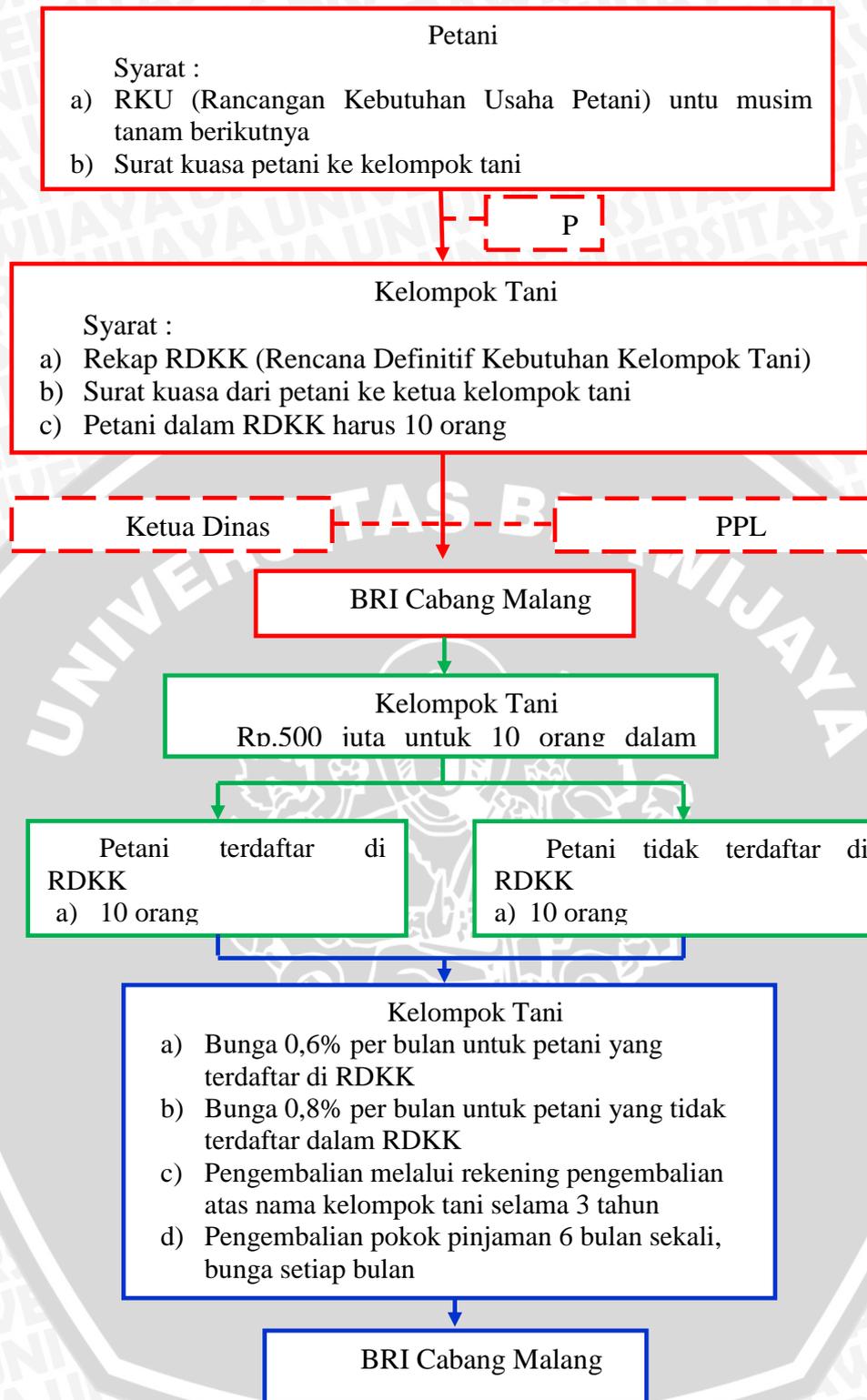
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebagian responden belum tahu berapa besar bunga yang dibayarkan oleh petani ke pihak BRI yang akan terpotong bersama dengan pelunasan nota gula. Namun sebagian responden lainnya mengetahui berapa besar tingkat suku bunga yang akan yang harus dibayarkan petani saat pelunasan KKP-E. Petani akan membayarkan bunga sebesar 7% pertahunnya yang juga akan dipotongkan melalui nota gula. Namun sebagian besar responden tidak menghiraukan seberapa besar bunga yang harus ditanggung karena menurut responden dana pinjaman KKP-E tidak memiliki

resiko bagi responden. Hal ini dikarenakan responden tidak membutuhkan agunan dalam proses pinjaman dan pembayaran dipotong dari nota gula. Responden masih merasa untung meskipun responden tidak tahu jumlah bunga yang harus dibayarkan responden. Karena setiap tahun responden pasti akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tebu ke PG apalagi dengan adanya program KKP-E responden merasa jauh memperoleh untung lebih besar. Hal tersebut karena setiap musim tanam baru dana akan disediakan dari dana KKP-E dan responden tidak perlu mengeluarkan dana lagi.

## 2. Mekanisme Realisasi KKP-E Apel

KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) untuk pembiayaan apel ini disalurkan melalui kelompok tani. Petani yang mengajukan pembiayaan KKP-E ini harus anggota dari kelompok tani tertentu. Untuk pembiayaan KKP-E apel ini dalam setiap kelompoknya harus terdiri dari 10 orang yang mengajukan pembiayaan apel melalui KKP-E apel ini. Untuk lebih jelasnya mekanisme realisasi KKP-E apel ini dapat dilihat dalam gambar 3 di bawah ini.





Gambar 3. Realisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Apel

Keterangan gambar :

- Proses permohonan kredit
- Proses putusan dan penurunan dana
- Proses pengembalian dana pinjaman
- Proses mekanisme realisasi
- - - Pihak yang membantu realisasi

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa untuk KKP-E apel ini mulai dari proses permohonan kredit, proses putusan dan penurunan dana serta proses pengembalian pinjaman harus dilakukan melalui kelompok tani. Hal tersebut dikarenakan penyaluran dana dilakukan secara berkelompok dalam kelompok tani, sehingga petani yang tidak tergolong dalam kelompok tani tidak dapat mengajukan pendanaan KKP-E apel ini. Dimana untuk setiap kelompok tani harus terdiri dari 10 petani yang mengajukan pinjaman. Menurut responden, apabila jumlah petani yang mengajukan kurang dari 10 orang, maka kemungkinan besar pengajuan KKP-E akan ditolak. Hal ini dikarenakan pihak BRI sudah menentukan minimal petani dalam 1 kelompok tani yang boleh mengajukan dana KKP-E adalah 10 orang dan apabila kurang dari itu pihak BRI meminta kelompok tani tersebut mencari anggota lain yang ingin meminjam agar menjadi 10 orang.

Setelah terpenuhi minimal 10 orang yang akan mengajukan pinjaman dana KKP-E ini, 10 orang tersebut harus melengkapi syarat yang nantinya akan diserahkan ke pihak BRI. Syarat yang harus dipenuhi oleh petani secara individual adalah petani harus membuat RKU (Rencana Kebutuhan Usaha) untuk musim tanam berikutnya. Pembuatan RKU ini juga harus didampingi dan disahkan oleh PPL (penyuluh lapang) setempat. Syarat berikutnya yang harus dilengkapi oleh petani adalah petani juga harus membuat surat kuasa yang ditunjukkan ke kelompok tani yang di ikuti oleh petani tersebut. Tidak berbeda dengan petani tebu, dalam surat kuasa yang dibuat petani apel tersebut juga harus ditandatangani oleh petani dan ketua kelompok tani dimana pada saat penandatanganan ini dilakukan di hadapan PPL. Tujuan penandatanganan ini dilakukan di depan PPL adalah untuk pembuktian bahwa surat kuasa tersebut benar-benar dibuat dan disahkan oleh PPL. Setelah pembuatan surat kuasa sudah disahkan oleh PPL berarti proses berikutnya untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Kelompok tani.

Setelah petani mengumpulkan persyaratan individu ke kelompok tani, maka anggota kelompok tani yang mengajukan pinjaman KKP-E akan bekerja sama dengan petani lain untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok tani. Syarat utama kelompok tani adalah membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang disusun berdasarkan RKU yang dibuat oleh petani secara individual. Pembuatan RDKK ini juga harus didampingi dan

disahkan oleh PPL setempat. Setelah pembuatan RDKK sudah selesai maka ketua kelompok tani akan mengajukan pinjaman ke pihak Bank. Dalam pengajuan ini ketua kelompok tani didampingi oleh perwakilan PPL dan ketua dinas pertanian. Fungsi dari PPL dan ketua dinas pertanian yang datang mendampingi ketua kelompok tani ini adalah sebagai saksi bahwa kelompok tani peminjam KKP-E tersebut benar-benar resmi dan sudah ada sebelum ingin meminjam KKP-E dan bukan merupakan kelompok tani bentukan baru yang hanya dibentuk untuk meminjam dana saja.

Setelah proses permohonan dan persyaratan sudah masuk ke Bank, maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Bank adalah pemeriksaan kelengkapan dan usaha calon debitur. Pemeriksaan kelengkapan dan usaha calon debitur ini merupakan hal penting yang harus dilakukan. Pemeriksaan ini nantinya yang akan menentukan apakah usaha benar-benar sudah sesuai dengan dokumen yang diberikan dan layak untuk mendapatkan pinjaman. Proses ini dilaksanakan setelah proses permohonan sudah masuk ke pihak BRI, pihak BRI akan melakukan pengecekan persyaratan kredit yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman dana. Setelah pengecekan peminjaman dana pihak AO (account officer) program yang menangani pembiayaan KKP-E akan melanjutkan untuk memeriksa usaha calon debitur dalam hal ini memeriksa kebenaran kondisi lahan dan kemungkinan prospek mendatang dari lahan yang diajukan untuk dibiayai melalui KKP-E. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mewawancarai calon debitur maupun dengan mencari informasi dari orang lain yang mengenal debitur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari data yang akurat sesuai dengan RDKK yang dibuat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis usaha calon debitur. Kriteria pemeriksaan tersebut antara lain meliputi :

1. Usaha benar-benar sesuai keterangan yang tercantum di RDKK
2. Domisili calon debitur benar-benar sesuai dengan KTP yang telah diberikan
3. Calon debitur memiliki sifat yang baik
4. Calon debitur memiliki prospek yang baik akan lahan apel yang dimiliki

Setelah proses ini dilakukan oleh pihak BRI dan pihak BRI sudah mengetahui calon debitur sesuai dengan kriteria yang ada maka pihak BRI akan memberi keputusan apakah calon debitur ini akan disetujui untuk diberikan

pinjaman atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa putusan dan pencairan dana ditentukan oleh survey lapang yang dilakukan oleh pihak Bank.

Untuk proses penurunan dana yang tertera dalam gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa penurunan dana pada awalnya masuk ke rekening kelompok tani. Setelah dana masuk, pihak kelompok tani akan mengelola pembagian dana pinjaman KKP-E tersebut. Untuk KKP-E Apel ini petani seharusnya mendapat pinjaman sebesar Rp.50.000.000 per petani. Namun kondisi di lapang berbeda dengan seharusnya, dimana kelompok tani tidak hanya menyalurkan dana pinjaman ke petani yang namanya tercantum dalam RDKK saja melainkan juga menyalurkannya ke petani yang namanya tidak tercantum dalam RDKK. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani yang namanya tercantum dalam RDKK tidak membutuhkan pinjaman sebesar itu dan agar tidak ada sisa dana pinjaman yang tidak terpakai sia-sia juga dikarenakan rasa kekeluargaan yang tinggi. Pembagian ke anggota kelompok tani yang lain yang namanya tidak tercantum dalam RDKK karena adanya rasa kepedulian antar anggota kelompok. Menurut sebagian besar responden, mereka tidak mungkin menikmati dana pinjaman sendiri ketika anggota kelompok tani yang lain yang namanya tidak terdaftar dalam RDKK juga membutuhkan dana untuk lahan apel yang dimilikinya. Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa pihak kelompok tani mengelola pembagian pinjaman yang sama antara petani yang namanya tercantum dalam RDKK dan yang tidak tercantum dalam RDKK. Masing-masing petani akan mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam RDKK.

Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembagian dana pinjaman KKP-E Apel ini yang diolah oleh kelompok tani dibagi merata. Tidak hanya anggota kelompok tani saja yang namanya tercantum dalam RDKK yang bisa memperoleh pinjaman KKP-E tersebut tetapi anggota kelompok tani lainnya yang namanya tidak tercantum dalam RDKK juga dapat memperoleh pinjaman dana KKP-E. Dimana untuk pengolaan dan pembagian dana dilakukan oleh Ketua kelompok, sekertaris serta bendahara kelompok tani yang bersangkutan.

pengembalian pinjaman akan dikordinir oleh bendahara kelompok tani. Hal ini berarti semua petani yang mengajukan dana pinjaman akan membayar

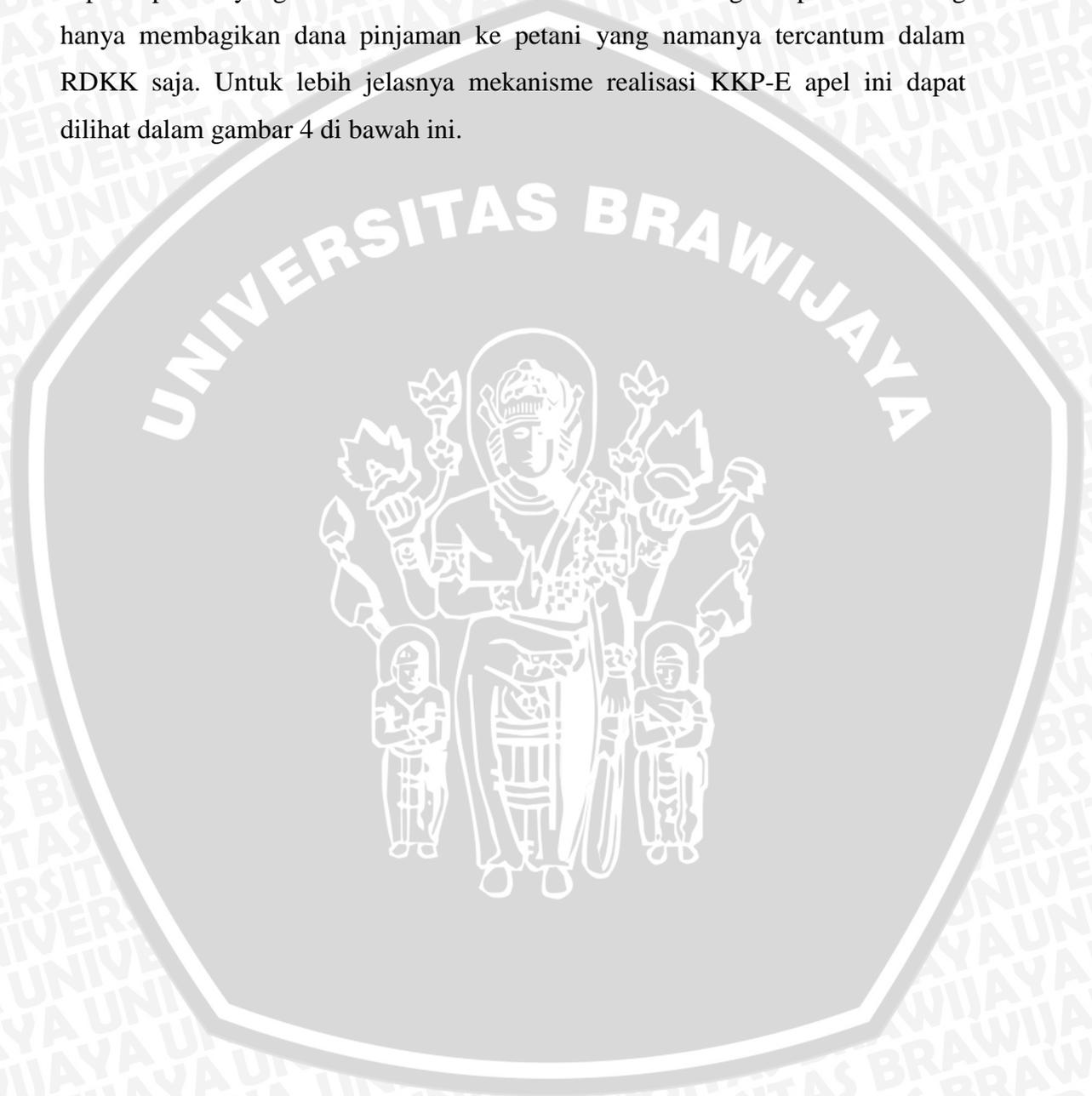
angsuran pinjaman ke bendahara kelompok tani, kemudian oleh bendahara tersebut akan ditabungkan ke rekening pengembalian kelompok tani. Namun dengan kondisi pembagian dana pinjaman yang merata dan tidak hanya untuk anggota kelompok tani yang tercantum dalam RDKK saja maka kelompok tani tersebut mengola pengembalian dana pinjaman tersebut. Dimana kelompok tani memberikan bunga sebesar 0,6% perbulannya untuk anggota kelompok tani yang namanya tercantum dalam RDKK. Sedangkan untuk anggota kelompok tani yang namanya tidak tercantum dalam RDKK dikenakan bunga sebesar 0,8% perbulan dari total uang yang dipinjamnya. Pengelolaan yang demikian sudah disepakati bersama dan disengaja agar setelah pinjaman KKP-E lunas dan habis masa periodenya, pihak Kelompok Tani memiliki uang kas yang nantinya dapat dipergunakan untuk musim tanam selanjutnya. Total uang yang diperoleh kelompok tani dari hasil bunga pinjaman yang menjadi uang kas kelompok tani yang bersangkutan akan di bagikan secara merata kepada anggota kelompok tani setelah pinjaman KKP-E dari BRI telah lunas.

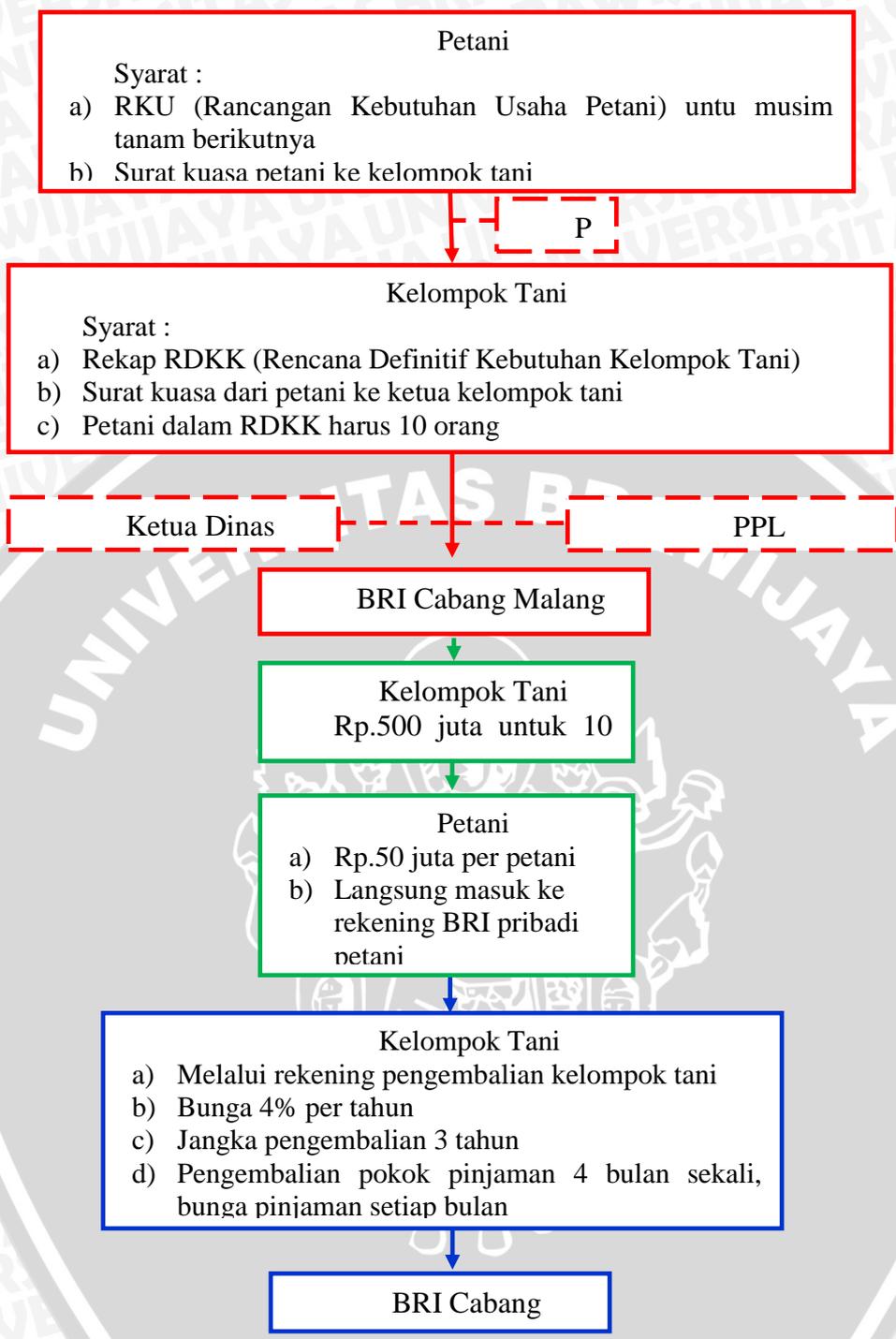
Pengembalian dana dilakukan selama 3 tahun, dimana untuk setiap bulannya setiap kelompok mengembalikan bunga saja sedangkan pengembalian pokok pinjaman dicicil setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan data yang diperoleh bunga tiap bulan semakin lama akan semakin menurun dari pembayaran bunga pada bulan pertama. Untuk lebih jelasnya untuk mekanisme dan simulasi pengembalian pinjaman KKP-E apel dapat dilihat pada lampiran 3.

### 3 Mekanisme Realisasi KKP-E Kentang

KKP-E (Kredit Ketahan Pangan dan Energi) untuk pembiayaan kentang ini hampir samadengan mekanisme realisasi KKP-E apel hal tersebut dikarenakan KKP-E apel dan kentang sama-sama disalurkan melalui kelompok tani. Petani yang mengajukan pembiayaan KKP-E ini juga harus anggota dari kelompok tani tertentu. Untuk pembiayaan KKP-E apel ini dalam setiap kelompoknya harus terdiri dari 10 orang yang mengajukan pembiayaan apel melalui KKP-E apel ini. Hanya saja meskipun sama-sama disalurkan melalui kelompok tani, mekanisme realisasi penyaluran yang terjadi di lapang untuk KKP-E kentang ini berbeda dengan KKP-E apel. Perbedaan tersebut terletak pada proses putusan dan

penurunan dana serta pengembalian dana pinjaman. Perbedaan antara KKP-E apel dan KKP-E kentang adalah meskipun sama-sama dikelola oleh kelompok tani, untuk kelompok tani apel membagi pinjaman dana ke petani yang namanya tercantum dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) dan kepada petani yang tidak tercantum dalam RDKK. Sedangkan petani kentang hanya membagikan dana pinjaman ke petani yang namanya tercantum dalam RDKK saja. Untuk lebih jelasnya mekanisme realisasi KKP-E apel ini dapat dilihat dalam gambar 4 di bawah ini.





Gambar 4. Realisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Kentang

Keterangan gambar :

- Proses permohonan kredit
- Proses putusan dan penurunan dana
- Proses pengembalian dana pinjaman
- Proses mekanisme realisasi
- - - Pihak yang membantu realisasi



Berdasarkan gambar 4 di atas dapat diketahui bahwa untuk KKP-E kentang ini mulai dari proses permohonan kredit, proses putusan dan penurunan dana serta proses pengembalian pinjaman harus dilakukan melalui kelompok tani seperti KKP-E apel. Hal tersebut dikarenakan penyaluran dana dilakukan secara berkelompok dalam kelompok tani, sehingga petani yang tidak tergolong dalam kelompok tani tidak dapat mengajukan pendanaan KKP-E kentang ini. Sama seperti KKP-E apel, KKP-E kentang ini juga untuk setiap kelompok tani harus terdiri dari 10 petani yang mengajukan pinjaman. Apabila jumlah petani yang mengajukan kurang dari 10 orang, maka kemungkinan besar pengajuan KKP-E akan ditolak. Hal ini dikarenakan pihak BRI sudah menentukan minimal petani dalam 1 kelompok tani yang boleh mengajukan dana KKP-E adalah 10 orang dan apabila kurang dari itu pihak BRI meminta kelompok tani tersebut mencari anggota lain yang ingin meminjam agar menjadi 10 orang.

Tidak jauh berbeda dengan KKP-E apel, untuk KKP-E kentang ini setelah terpenuhi minimal 10 petani yang akan mengajukan pinjaman dana KKP-E kentang ini, 10 orang tersebut harus melengkapi syarat yang nantinya akan diserahkan ke pihak BRI. Syarat yang harus dipenuhi oleh petani secara individual adalah petani harus membuat RKU (Rencana Kebutuhan Usaha) untuk musim tanam berikutnya. Pembuatan RKU ini juga harus didampingi dan disahkan oleh PPL (penyuluh lapang) setempat. Syarat berikutnya yang harus dilengkapi oleh petani adalah petani juga harus membuat surat kuasa yang ditunjukkan ke kelompok tani yang diikuti oleh petani tersebut. Tidak berbeda dengan petani tebu, dalam surat kuasa yang dibuat petani apel tersebut juga harus ditandatangani oleh petani dan ketua kelompok tani dimana pada saat penandatanganan ini dilakukan di hadapan PPL. Tujuan penandatanganan ini dilakukan di depan PPL adalah untuk pembuktian bahwa surat kuasa tersebut benar-benar dibuat dan disahkan oleh PPL. Setelah pembuatan surat kuasa sudah disahkan oleh PPL berarti proses berikutnya untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Kelompok tani.

Setelah petani mengumpulkan persyaratan individu ke kelompok tani, maka anggota kelompok tani yang mengajukan pinjaman KKP-E akan bekerja sama dengan petani lain untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok tani. Syarat utama kelompok tani adalah membuat RDKK (Rencana

Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang disusun berdasarkan RKU yang dibuat oleh petani secara individual. Pembuatan RDKK ini juga harus didampingi dan disahkan oleh PPL setempat. Setelah pembuatan RDKK sudah selesai maka ketua kelompok tani akan mengajukan pinjaman ke pihak Bank. Dalam pengajuan ini ketua kelompok tani didampingi oleh perwakilan PPL dan ketua dinas pertanian. Fungsi dari PPL dan ketua dinas pertanian yang datang mendampingi ketua kelompok tani ini adalah sebagai saksi bahwa kelompok tani peminjam KKP-E tersebut benar-benar resmi dan sudah ada sebelum ingin meminjam KKP-E dan bukan merupakan kelompok tani bentukan baru yang hanya dibentuk untuk meminjam dana saja.

Setelah proses permohonan dilaksanakan maka tahapan berikutnya hampir sama dengan tahapan yang dilalui oleh petani tebu dan petani apel. Setelah proses permohonan dan persyaratan sudah masuk ke Bank, maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Bank adalah pemeriksaan kelengkapan dan usaha calon debitur. Pemeriksaan kelengkapan dan usaha calon debitur ini merupakan hal penting yang harus dilakukan. Pemeriksaan ini nantinya yang akan menentukan apakah usaha benar-benar sudah sesuai dengan dokumen yang diberikan dan layak untuk mendapatkan pinjaman. Proses ini dilaksanakan setelah proses permohonan sudah masuk ke pihak BRI, pihak BRI akan melakukan pengecekan persyaratan kredit yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman dana. Setelah pengecekan pinjaman dana pihak AO (account officer) program yang menangani pembiayaan KKP-E akan melanjutkan untuk memeriksa usaha calon debitur dalam hal ini memeriksa kebenaran kondisi lahan dan kemungkinan prospek mendatang dari lahan yang diajukan untuk dibiayai melalui KKP-E. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mewawancarai calon debitur maupun dengan mencari informasi dari orang lain yang mengenal debitur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari data yang akurat sesuai dengan RDKK yang dibuat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis usaha calon debitur. Kriteria pemeriksaan tersebut antara lain meliputi :

1. Usaha benar-benar sesuai keterangan yang tercantum di RDKK
2. Domisili calon debitur benar-benar sesuai dengan KTP yang telah diberikan
3. Calon debitur memiliki sifat yang baik
4. Calon debitur memiliki prospek yang baik akan lahan apel yang dimiliki

Setelah proses ini dilakukan oleh pihak BRI dan pihak BRI sudah mengetahui calon debitur sesuai dengan kriteria yang ada maka pihak BRI akan memberi keputusan apakah calon debitur ini akan disetujui untuk diberikan pinjaman atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa putusan dan pencairan dana ditentukan oleh survey lapangan yang dilakukan oleh pihak Bank.

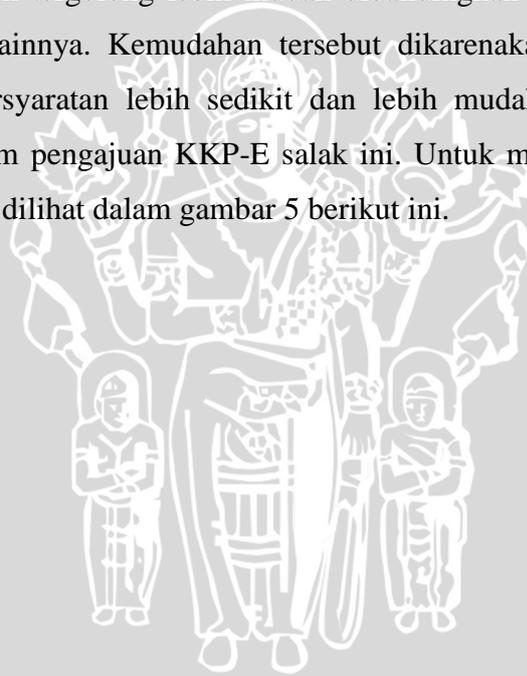
Tahapan berikutnya adalah putusan dan penurunan dana yang dilakukan oleh BRI ke pihak kelompok tani. Penurunan dana tergolong lebih lama dibandingkan dengan penurunan pinjaman yang dilakukan oleh instansi lain yang memberikan pinjaman. Setiap petani yang meminjam dana akan mendapat pinjaman sebesar Rp.50.000.000 dalam 1 kali periode pinjaman yakni selama 3 tahun. Penurunan dana akan langsung masuk ke rekening responden dengan syarat rekening responden adalah rekening dari BRI. Apabila responden tidak memiliki rekening BRI maka responden harus membuat rekening BRI terlebih dahulu. Rekening yang harus dibuat oleh responden boleh dari BRI mana saja dan tidak harus BRI Cabang Malang Kawi. Namun sebelum dana langsung masuk ke rekening petani yang mengajukan dana pinjaman KKP-E, diadakan akad kredit terlebih dahulu antara pihak BRI dengan Kelompok Tani yang bersangkutan. Penandatanganan ini dilakukan di kantor Cabang BRI Malang Kawi. Sedangkan yang bertanda tangan untuk akad kredit itu adalah semua anggota Kelompok Tani yang mengajukan pinjaman KKP-E dan kelompok tani itu sendiri serta kepala dinas pertanian setempat dan PPL setempat. Disini kepala dinas dan PPL setempat berperan sebagai saksi sekaligus mengesahkan bahwa Kelompok Tani yang bertanda tangan dalam akad kredit tersebut benar-benar ada dan bukan kelompok tani yang baru terbentuk hanya untuk mendapatkan pinjaman semata.

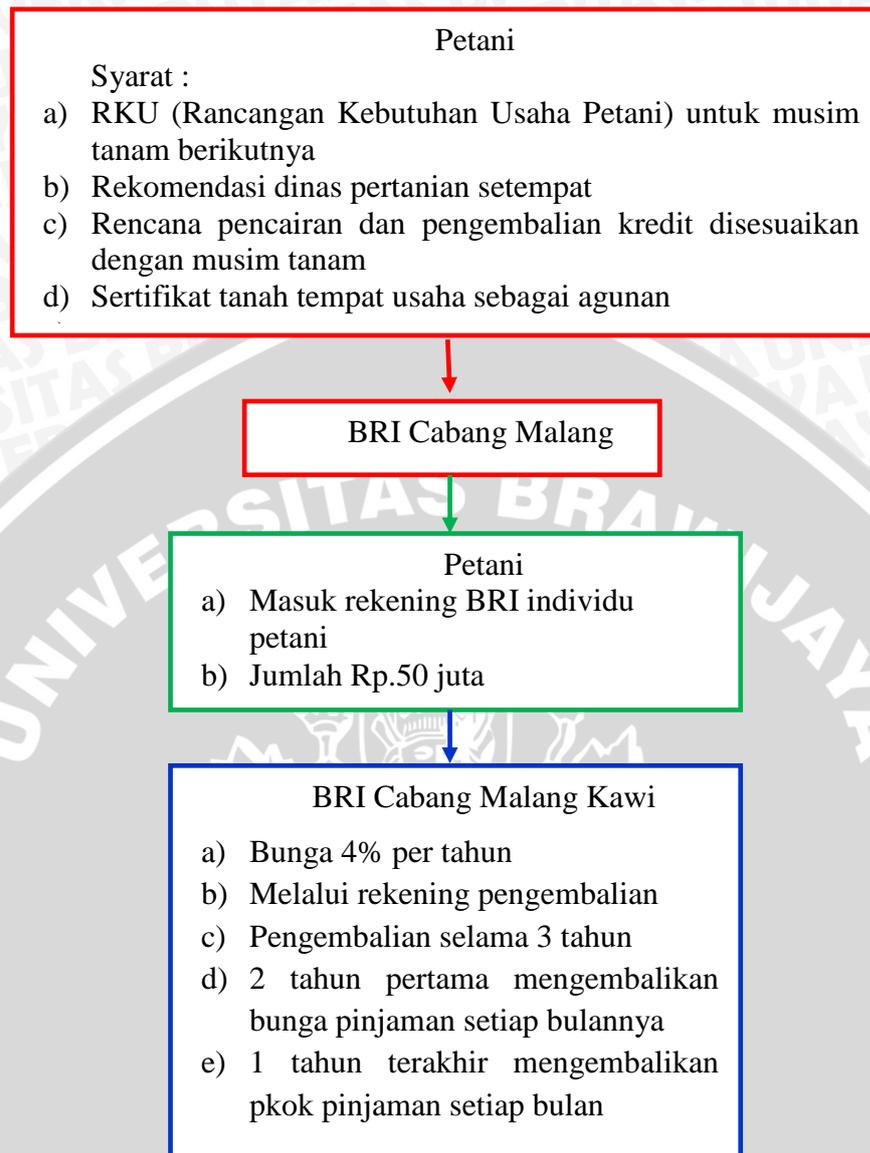
Mekanisme yang terakhir adalah pengembalian pinjaman dana, dimana untuk proses pengembalian dana pinjaman hampir sama dengan KKP-E Apel yakni dilakukan dengan cara mencicil selama 3 tahun sesuai dengan akad kredit. Bunga yang harus dibayarkan oleh petani Kentang ini juga sama yakni sebesar 4%

per tahunnya. Petani yang mengajukan KKP-E Kentang ini akan membayarkan bunga tiap bulannya, dimana bunga akan cenderung menurun setiap bulannya sampai lunas pembayaran bunga lunas. Namun yang menjadi perbedaan anatar KKP-E kentang dengan KKP-E Apel adalah pembayaran untuk pokok pinjaman. Untuk pokok pinjaman akan dibayarkan dan dicicil setiap 4 bulan sekali.

#### 4. Mekanisme Realisasi KKP-E Salak

Untuk pembiayaan KKP-E salak ini disalurkan secara individual yang sampai saat ini BRI Cabang Malang Kawi hanya menyalurkannya pada satu orang saja. Untuk mekanisme realisasi KKP-E salak untuk semua tahapan baik mulai dari proses permohonan, putusan dan pencairan dana sampai dengan tahapan pengembalian pinjaman tergolong lebih mudah dibandingkan dengan pengajuan pembiayaan KKP-E lainnya. Kemudahan tersebut dikarenakan dilakukan oleh individu sehingga persyaratan lebih sedikit dan lebih mudah dan tidak perlu adanya perantara dalam pengajuan KKP-E salak ini. Untuk mekanisme realisasi KKP-E salak ini dapat dilihat dalam gambar 5 berikut ini.





Gambar 5. Realisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Salak

- Keterangan gambar :
- Proses permohonan kredit
  - Proses putusan dan penurunan dana
  - Proses pengembalian dana pinjaman
  - Proses mekanisme realisasi
  - - - Pihak yang membantu realisasi

Berdasarkan gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa proses permohonan kredit ini dilakukan langsung oleh petani secara individu. Dimana syarat yang harus dipenuhi oleh petani salak ini adalah petani harus menyusun RKU (rancangan Kebutuhan Usaha) untuk musim tanam berikutnya, dimana untuk pembuatan RKU ini tidak harus didampingi dan disahkan oleh PPL seperti

pembiayaan KKP-E lainnya. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh petani salak ini adalah adanya rekomendasi dari dinas pertanian setempat. Rekomendasi ini bertujuan bahwa dengan adanya rekomendasi dinas pertanian setempat berarti pihak pertanian setempat menganggap petani layak mendapat pinjaman setelah disesuaikan dengan kondisi lahan petani. Dengan adanya rekomendasi ini pihak Bank tidak akan ragu untuk memberikan pinjaman. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh petani adalah rencana pencairan dan pengembalian kredit yang disesuaikan dengan musim tanam salak dan disesuaikan juga dengan RKU yang dibuat oleh petani. KKP-E salak ini di akses secara individu oleh karena itu pihak Bank meminta surat tanah usaha untuk dijadikan agunan pinjaman dengan tujuan apabila calon debitur petani salak tidak bisa mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tempo yang sudah ditetapkan maka pihak Bank akan melelang tanah usaha calon debitur untuk menutup kerugian Bank.

Sebelum pihak Bank memberikan pinjaman ke petani, pihak bank akan melakukan survey lapang untuk memperoleh kejelasan mengenai calon debitur. Kejelasan tersebut antara lain untuk mengetahui kebenaran domisili responden apakah sudah sesuai dengan fotocopy KTP yang tercantum atau tidak, bagaimana karakter responden serta kebenaran lahan yang di ikutkan KKP-E baik dari segi luasan dan kepemilikan. Pemeriksaan lahan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lahan responden untuk mengetahui prospek dari lahan responden. Untuk mengetahui prospek lahan pihak AO akan melakukan analisis kelayakan yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan AO dalam memutuskan kredit yang diminta oleh petani tersebut. Untuk melakukan analisis kelayakan pihak Bank akan melakukan wawancara dengan petani mengenai kemungkinan penghasilan dari lahan yang dimiliki petani. Karena menurut petani responden lahan salak yang diikutkan KKP-E ini masih tergolong baru dan masih belum produktif sehingga pihak AO akan membandingkan dengan lahan petani responden yang lainnya yang sudah produktif.

Dimana setelah semua data sudah masuk ke pihak BRI dan pihak BRI telah melakukan pemeriksaan terhadap calon debitur, maka pihak BRI akan memberikan putusan mengenai dana KKP-E yang diajukan. Dimana untuk dana KKP-E individual ini bernilai Rp.50.000.000,00 dengan lama pinjaman selama 3

tahun pinjaman. Dana pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening calon debitur sehingga calon debitur harus memiliki rekening dari Bank BRI, karena pihak BRI hanya akan mentransfer ke rekening BRI saja. Seperti halnya KKP-E yang lainnya, KKP-E individual untuk pendanaan salak ini juga akan melakukan akad kredit antara pihak BRI dengan pihak debitur yang mengakses KKP-E untuk pendanaan salak ini sebelum dana masuk ke rekening debitur. Untuk perjanjian akad kredit ini langsung dilakukan oleh debitur dan tidak melalui perantara samasekali. Menurut responden proses ini tergolong mudah karena tidak melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

Untuk proses pengembalian pinjaman dilakukan langsung responden dengan cara menabung di rekening pinjaman. Pengembalian dilakukan selama 3 tahun sesuai dengan akad kredit dengan tingkat suku bunga sebesar 4% pertahunnya. Untuk pengembalian dana pinjaman dilakukan setiap bulannya dimana untuk 2 tahun pertama responden hanya membayarkan bunga saja sedangkan 1 tahun terakhir responden akan membayarkan pokok pinjaman beserta bunga yang harus dibayarkan. 2 tahun pertama responden hanya membayarkan bunga saja karena menurut beliau pada 2 tahun pertama salak masih belum berbuah sehingga dalam akad kredit telah disepakati untuk 2 tahun pertama responden hanya akan membayarkan bunga saja. Sedangkan pada tahun ketiga tanaman salak sudah berbuah sehingga pada tahun ketiga responden akan membayarkan sisa bunga beserta pokok pinjaman.

Untuk bunga yang harus dibayarkan responden selama 3 tahun adalah sebesar Rp.5.075.804 sehingga total biaya yang harus dikembalikan pada tahun ketiga sebesar Rp.55.075.804. Untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 50.000.000 akan dibayarkan pada tahun ketiga, dimana pembayaran ini dicicil perbulan dengan pembayaran pokok perbulan senilai Rp.4.166.667 sedangkan bunga yang harus dibayarkan perbulan mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga tidak tetap dan berubah-ubah. Untuk lebih jelasnya simulasi pengembalian KKP-E salak ini dapat dilihat pada lampiran 4.

#### 5.4.2 Perbandingan Mekanisme Realisasi KKP-E

Setelah mengetahui bagaimana tahapan mekanisme realisasi KKP-E maka peneliti merasa perlu untuk membandingkan dan memberi ranking setiap tahapan KKP-E. Pemberian ranking ini bertujuan untuk melihat mana yang mudah dan mana yang sulit untuk dilakukan oleh petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Perbandingan dan ranking tahapan mekanisme realisasi KKP-E

Petani	Tahapan dan Ranking Mekanisme Realisasi KKP-E					
	Permohonan	Ranking	Penurunan dana	Ranking	Pengembalian dana	Ranking
Tebu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada syarat untuk petani, kelompok tani, KUD dan PG</li> <li>2. Yang mengajukan pinjaman ke Bank adalah KUD dan PG</li> </ol>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan pinjaman dari Bank melalui PG</li> <li>2. Penyaluran pinjaman dari PG ke petani melalui KUD</li> <li>3. Dana yang masuk petani berupa uang dan pupuk</li> </ol>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui rekening PG</li> <li>2. Bunga 7% per tahun</li> </ol>	1
Apel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada syarat untuk petani dan kelompok tani</li> <li>2. Diajukan kelompok tani didampingi oleh PPL dan ketua dinas pertanian</li> </ol>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan pinjaman dari bank melalui kelompok tani</li> <li>2. Dana yang masuk petani hanya berupa uang</li> </ol>	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui rekening kelompok tani</li> <li>2. Bungan 0,6% untuk petani dalam RDKK dan 0,8% petani non RDKK</li> </ol>	4
Kentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada syarat untuk petani dan kelompok tani</li> <li>2. Diajukan kelompok tani didampingi oleh PPL dan ketua dinas pertanian</li> </ol>	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan pinjaman dari bank melalui kelompok tani</li> <li>2. Dana yang masuk petani hanya berupa uang</li> </ol>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui rekening kelompok tani</li> <li>2. Bunga 4% per tahun</li> </ol>	3
Salak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan hanya untuk petani individu</li> <li>2. Diajukan petani individu</li> </ol>	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan langsung ke petani</li> <li>2. Dana berupa uang</li> </ol>	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui rekening petani individu</li> <li>2. Bunga 4% per tahun</li> </ol>	2

Berdasarkan gambar 10 di atas dapat diketahui bahwa untuk mekanisme realisasi KKP-E untuk pembiayaan tebu, apel, kentang, dan salak apabila di bandingkan makan akan ada perbedaan dan ada juga kesamaan yang terjadi di lapang. Untuk proses permohonan KKP-E untuk pembiayaan apel dan kentang cenderung sama. Kesamaan tersebut dikarenakan untuk pembiayaan KKP-E apel dan kentang ini sama-sama disalurkan melalui kelompok tani. Proses permohonan ini diajukan oleh kelompok tani yang didampingi oleh PPL dan ketua dinas pertanian. Pendampingan yang dilakukan oleh PPL dan ketua dinas pertanian ini bertujuan sebagai saksi bahwa kelompok tani peminjam KKP-E tersebut benar-benar resmi dan sudah ada sebelum ingin meminjam KKP-E dan bukan merupakan kelompok tani bentukan baru yang hanya dibentuk untuk meminjam dana saja. Pengajuan permohonan ini harus dilengkapi dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh petani secara individu dan kelompok tani yang dapat dilihat pada mekanisme realisasi KKP-E apel dan kentang di atas. Untuk permohonan petani apel mendapat ranking 2 dan permohonan untuk petani kentang mendapat ranking 3. Hal tersebut berarti untuk permohonan apel tergolong mudah dan untuk petani kentang tergolong susah.

Proses permohonan KKP-E tebu dan salak berbeda dengan proses permohonan KKP-E apel dan kentang. Proses permohonan KKP-E tebu diajukan oleh KUD sebagai pihak yang menyalurkan dana pinjaman dan PG sebagai avalis petani tebu. Dalam pengajuan permohonan ini harus dengan menyertakan perlengkapan syarat yang diperlukan oleh pihak Bank dimana pengajuan KKP-E tebu ini harus melengkapi persyaratan petani secara individu, kelompok tani, KUD dan PG yang dapat dilihat pada mekanisme realisasi KKP-E tebu di atas. Oleh karena itu untuk proses permohonan KKP-E salak mendapat ranking 4 yang berarti pengajuan permohonan KKP-E tebu ini tergolong sangat susah. Sedangkan untuk proses permohonan KKP-E salak diajukan oleh petani secara individual. proses permohonan ini dilakukan oleh petani secara individual tanpa melalui perantara. Dalam mengajukan permohonan pinjaman petani hanya harus melengkapi persyaratan petani secara individual saja yang dapat dilihat pada mekanisme realisasi KKP-E salak di atas. Permohonan KKP-E ini merupakan yang paling mudah dibandingkan dengan permohonan KKP-E lainnya sehingga

untuk permohonan KKP-E kentang ini tergolong paling mudah untuk dilakukan oleh petani.

Untuk tahapan mekanisme realisasi berikutnya adalah putusan dan penurunan dana pinjaman KKP-E. Untuk tahapan putusan dan pencairan dana ini berbeda-beda untuk setiap KKP-E. Penurunan dana KKP-E tebu langsung masuk ke rekening giro PG. Dimana pinjaman yang masuk ke PG berupa uang, namun pihak PG mengeluarkan pinjaman ke petani tebu tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa pupuk. Untuk pupuk pihak PG akan membelikan pupuk ke petrokimia dimana petrokimia akan menyalurkan pupuk ke KPTR (Koprasi Petani Tebu Rakyat). Setelah pupuk masuk ke KPTR maka pihak KPTR akan membagikan pupuk-pupuk tersebut ke KUD dan pihak KUD inilah yang nantinya akan membagikan ke petani. Sedangkan pinjaman dari PG ke petani yang berupa uang langsung disalurkan ke KUD oleh PG dan pihak PG akan menyalurkan langsung pada petani tebu secara individual. Lebih jelasnya untuk penurunan dana pinjaman KKP-E ini dapat dilihat pada mekanisme realisasi KKP-E tebu yang sudah dibahas sebelumnya.

Untuk proses penurunan dana pinjaman KKP-E apel dan kentang sama-sama masuk ke rekening kelompok tani. Dimana untuk dana yang masuk langsung berupa uang. Namun aplikasi di lapang antara KKP-E Apel dan KKP-E kentang berbeda. Penurunan dana yang terjadi di petani apel yang dikelola oleh kelompok tani akan disalurkan ke petani yang namanya tercantum dalam RDKK dan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan uang yang turun dari pihak bank akan di bagi sama rata oleh petani yang tercantum dan tidak tercantum dalam RDKK. Penurunan dana untuk petani apel ini lebih susah sehingga mendapatkan ranking 3 untuk penurunan dana pinjaman. Sedangkan penurunan dana KKP-E kentang yang dikelola oleh kelompok tani hanya disalurkan ke petani yang namanya tercantum dalam RDKK. Sehingga untuk penurunan dana KKP-E kentang lebih mudah di bandingkan dengan KKP-E apel dan mendapatkan ranking 2 yang berarti untuk penurunan dana KKP-E kentang ini tergolong mudah. Untuk proses penurunan dana KKP-E salak langsung masuk ke rekening pribadi petani salak. hal tersebut terjadi karena untuk KKP-E salak ini di akses oleh petani secara individual sehingga petani tidak membutuhkan perantara dalam

penurunan pinjaman KKP-E ini. Penurunan dana yang langsung masuk ke rekening petani secara individual ini dirasa sangat mudah sehingga untuk proses penurunan KKP-E salak ini mendapatkan ranking 1 di bandingkan dengan proses penurunan KKP-E yang lainnya.

Tahapan terakhir mekanisme realisasi KKP-E adalah pengembalian pinjaman ke pihak Bank. Pengembalian pinjaman untuk KKP-E tebu dilakukan oleh PG melalui rekening pengembalian PG dengan bunga pinjaman sebesar 7% per tahunnya. Pengembalian yang dilakukan oleh petani tebu ini ke pihak PG dengan cara memotong hasil penjualan gula ke PG untuk mengembalikan pinjaman ke pihak Bank. Karena pengembalian ini tidak membuat petani susah maka untuk pengembalian dana pinjaman KKP-E tebu ini mendapat ranking 1 yang berarti pengembalian pinjaman sangat mudah. Sedangkan untuk pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh petani apel itu melalui rekening pengembalian kelompok tani mendapat ranking 4 yang berarti sangat sulit. Dimana untuk setiap petani yang meminjam dana KKP-E akan di kelola oleh kelompok tani untuk pengembalian pinjaman. alasan lain pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh petani apel ini mendapat ranking 4 dikarenakan penurunan pinjaman untuk KKP-E apel ini yang dikelola oleh kelompok tani tidak hanya diberikan ke petani yang tercantum dalam RDKK saja, maka untuk bunga pinjaman petani juga dikelola oleh kelompok tani. Untuk petani apel yang meminjam dana KKP-E dan namanya tercantum dalam dokumen RDKK maka kelompok tani akan memberi bunga pinjaman sebesar 0,6% per bulan dan untuk petani yang namanya tidak tercantum dalam RDKK akan dikenakan bunga pinjaman sebesar 0,8% per bulan.

Pengembalian pinjaman dana yang dilakukan oleh petani kentang melalui rekening pinjaman kelompok tani. Petani yang meminjam KKP-E pada saat mengembalikan pinjaman akan dikelola oleh kelompok tani dengan bunga pinjaman yang harus dibayar sebesar 4% per tahun. Untuk pengembalian pinjaman KKP-E kentang mendapat ranking 3 yang berarti sulit. Sedangkan untuk pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh petani salak dilakukan langsung melalui rekening pinjaman atas nama petani secara individual. pengembalian yang dilakukan petani salak mendapat ranking 2. Hal tersebut dikarenakan untuk pengembalian pinjaman KKP-E salak ini di ases secara individu sehingga

pengembalian juga secara individual. Bunga yang harus dibayar oleh petani salak sebesar 4% per tahun. Pengembalian pinjaman petani salak ini tidak lebih mudah bila dibandingkan dengan petani tebu. Hal tersebut terjadi karena petani salak harus membayarkan cicilan pinjaman secara individu dan dilakukan oleh petanisehingga petani harus ke bank untuk mengembalikannya. Sedangkan petani tebu dikelola oleh PG untuk pengembaliannya dan petani tidak harus membayar cicilan pinjaman ke PG, petani hanya menunggu giling gula dan dana pinjaman akan dipotong dari hasil penjualan gula.

### **5.5 Dampak Sosial Ekonomi KKP-E**

Tujuan pemerintah mengeluarkan skim dana untuk sektor pertanian melalui program KKP-E ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan program KKP-E dapat diukur dari dampak petani setelah mengakses pinjaman dana. Dampak peminjaman ini dapat dilihat secara langsung maupun tak langsung. Dampak secara langsung dapat diukur dari tingkat kesejahteraan petani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E dari segi ekonomi petani. Dampak tak langsung dari adanya program KKP-E ini bisa dilihat dari perubahan sosial petani setelah mengakses KKP-E. Untuk dapat mengetahui dampak sosial ekonomi dengan adanya KKP-E disektor pertanian untuk petani tebu, apel, kentang dan salak dapat dilihat dalam urian sebagai berikut.

#### **5.5.1 Dampak Ekonomi KKP-E**

Dampak ekonomi dari peminjaman kredit KKP-E ini tergolong dampak secara langsung dikarenakan peminjaman dana KKP-E akan berpengaruh secara langsung terhadap perubahan produksi dan pendapatan petani setelah mengakses KKP-E. Dampak ekonomi ini hanya dapat dilihat pada petani tebu, apel dan kentang saja. Dampak ekonomi untuk petani salak belum bisa dilihat dikarenakan untuk pembiayaan KKP-E salak yang dilakukan oleh BRI Cabang Malang Kawi masih tergolong baru dan menurut responden yang memeperoleh dana pinjaman ini menjelaskan bahwa lahan salak yang dibiayai oleh BRI dengan KKP-E ini merupakan lahan dengan tanaman yang belum produktif. Responden menjelaskan juga bahwa tanaman salak milik responden merupakan awal tanamn sehingga

untuk melihat pengaruh KKP-E secara ekonomis dapat terlihat setelah tanaman salak produktif yakni setelah salak berumur 3 tahun. Melihat kondisi tersebut peneliti belum bisa menampilkan dampak ekonomis dari adanya program KKP-E ini terhadap petani salak yang mengakses dana KKP-E ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai dampak KKP-E secara ekonomis dapat dilihat berdasarkan besar pengeluaran dan pendapatan sebelum dan sesudah mengakses pinjaman dana KKP-E. Pengeluaran dan pendapatan petani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 7. Untuk melihat pengeluaran petani tebu, apel dan kentang dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Rata-rata Pengeluaran petani/ha sebelum dan sesudah mengakses KKP-E

Keterangan	Petani Tebu (dalam juta rupiah)		Petani Apel (dalam juta rupiah)		Petani Kentang (dalam juta rupiah)	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Bibit	3,786	3,786	1,400	1,400	12,000	12,000
Pupuk	3,410	0,510	1,372	1,372	9,155	9,155
Pestisida	0,444	0,444	3,000	3,000	9,000	9,000
Tenaga kerja	8,583	4,583	1,800	1,800	6,505	6,505
Biaya lain	3,416	3,417	1,450	1,450	1,443	1,44
Cicilan KKP-E	-	7,383	-	8,497	-	6,229
Total biaya	19,639	20,123	9,022	17,519	38,103	44,332

Sumber data : data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa biaya total yang dikeluarkan oleh petani tebu sebelum dan sesudah mengakses KKP-E lebih besar setelah mengakses. Biaya sebelum mengakses dana yang dikeluarkan sebesar Rp.19,639 per hektar sedangkan sesudah mengakses dana yang dikeluarkan menjadi sebesar Rp.20,123 per hektar. Perbedaan pengeluaran ini dikarenakan adanya pembayaran angsuran KKP-E. Dengan adanya KKP-E ini kebutuhan dana petani yang harus dikeluarkan selama produksi bisa teringankan dengan bantuan dana KKP-E sehingga dana yang dikeluarkan setelah mengakses KKP-Epun menjadi lebih kecil dari sebelum mengakses KKP-E untuk biaya produksi. Namun petani sering tidak melihat meskipun petani mengalami penurunan biaya produksi petani juga harus membayarkan pinjaman KKP-E beserta bunganya. Kondisi yang demikian yang jarang di sadari oleh petani,

karena kondisi tersebut malah membuat biaya total yang dikeluarkan petani lebih besar dari sebelumnya.

Sedangkan untuk petani apel, total biaya yang dikeluarkan oleh petani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E berbeda, dimana total biaya yang harus dikeluarkan oleh petanni sebelum mengakses KKP-E sebesar Rp.9,022 sedangkan setelah mengakses KKP-E menjadi sebesar Rp.17,519 hal tersebut dikarenakan petani harus membayar angsuran KKP-E sebesar Rp.8,497 sesuai dengan simulasi angsuran petani apel dalam lampiran 3.

Berdasarkan tabel 11 di atas diketahui total pengeluaran petani kentang selama produksi baik sebelum dan sesudah mengakses KKP-E. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara pengeluaran petani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E. Dimana biaya pengeluaran total sebelum mengakses KKP-E sebesar Rp. 38,103 dan akan menjadi sebesar Rp.44,332 setelah mengakses dana KKP-E. Perbedaan pengeluaran tersebut disebabkan adanya perbedaan biaya angkut dan biaya angsuran KKP-E, perbedaan biaya angkut dapat dilihat pada lampiran 6. Perbedaan biaya total tersebut juga dikarenakan setelah mengakses dana KKP-E petani juga harus mengangsur pinjaman KKP-E ke pihak BRI senilai Rp.6,229

Setelah mengetahui besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh petani baik sebelum dan sesudah mengakses KKP-E, maka kita harus tahu seberapa besar pendapatan petani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E. Tujuan melihat pendapatan ini nantinya akan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan sehingga akan diketahui berapa keuntungan petani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E. Untuk mengetahui lebih jelas pendapatn serta keuntungan petani sebelum dan sesudah mengakses KKP-E dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Rata-rata keuntungan petani/ha sebelum dan sesudah mengakses KKP-E

Keterangan	Petani Tebu (dalam juta rupiah)		Petani Apel ( dalam juta rupiah)		Petani Kentang (dalam juta rupiah)	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
∑ Penerimaan	46,977	48,361	80,000	170,000	64,000	122,000
∑ Pengeluaran	19,730	20,123	9,508	18,004	38,103	44,432
Keuntungan	27,247	28,238	70,492	151,996	25,897	77,568

Sumber data : data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 12 untuk petani tebu ada perbedaan keuntungan petani tebu sebelum dan mengakses KKP-E. Dimana setelah mengakses KKP-E pendapatan petani tebu akan meningkat dibandingkan pada sebelum mengakses KKP-E. Didalam tabel tergambar dengan jelas bahwa rata-rata petani tebu sebelum mengakses KKP-E memiliki keuntungan sebesar Rp.27,247 namun setelah mengakses KKP-E rata-rata pendapatan petani menjadi Rp.28,237 hal tersebut membuktikan bahwa dengan mengakses KKP-E selain akan mempermudah petani dalam memperoleh modal baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pupuk, petani juga akan mengalami peningkatan pendapatan. Namun berdasarkan data yang tertera pada tabel 12 tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum dan sesudah mengakses KKP-E peningkatan pendapatan tidak terlalu besar. Hal tersebut terjadi karena meskipun dalam kegiatan budidaya sering diadakan penyuluhan, kontrol dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUD dan PPL dari pabrik untuk mengecek proses budidaya dan rendemen tebu, petani bersikap kolot.

Dari sebagian besar petani pada saat diberikan penyuluhan dan kontrol mengenai budidaya yang baik dan benar untuk meningkatkan rendemen tebu, para petani sersikap acuh dan tidak mengikuti cara yang diberikan oleh KUD maupun PPL dari pabrik. Mereka lebih cenderung mengerjakan lahan mereka sesuai apa yang pernah dan diajarkan oleh ayah mereka. Sehingga penjelasan untuk memperbesar rendemen tebu dari KUD maupun PPL pabrik jarang diterapkan oleh petani tebu. Meskipun terjadi peningkatan rendemen, peningkatan tersebut sangat minim. Oleh karena itu baik sebelum dan sesudah mengakses KKP-E peningkatan pendapatan mereka tidak terlalu besar. Hal tersebut dikarenakan oleh sikap petani itu sendiri yang kurang mau menerima dan menerapkan teknologi baru yang disosialisasikan oleh KUD maupun PPL pabrik setempat.

Untuk petani apel sebelum dan sesudah mengakses KKP-E petani apel cenderung berusaha untuk meningkatkan kuantitas dari produksi apel mereka. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan produksi dari 10 ton perhektar sebelum mengakses KKP-E menjadi 15 ton perhektar setelah mengakses KKP-E (terlampir pada lampiran 7.4). Peningkatan kuantitas yang diusahakan oleh petani

dikarenakan petani apel mendapat dana pinjaman KKP-E dari BRI sehingga mereka cenderung tidak mengalami kesulitan modal lagi serta peningkatan kuantitas ini diharapkan akan memperlancar mereka untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut ke pihak BRI Cabang Malang Kawi.

Peningkatan produksi ini dapat terjadi karena setelah mengakses KKP-E ini kegiatan kelompok tani lebih aktif dari sebelum mengakses KKP-E. Hal tersebut terbukti dengan lebih dilakukan pertemuan rutin setiap kelompok tani. Bahkan para petani yang tergabung dalam kelompok tani inipun lebih sering mengundang PPL untuk memberikan penyuluhan kepada mereka mengenai teknik budidaya yang baik dan benar dan teknologi baru apa saja yang bisa diterapkan untuk petani apel sehingga dapat meningkatkan produksi mereka. selain itu yang dulunya petani apel ini saat diundang pelatihan oleh PPL dan melakukan survey ke daerah lain menolak untuk mengikuti kegiatan tersebut, setelah mengakses KKP-E mereka lebih aktif dan mau melakukan pelatihan tersebut. Bagi petani apel kegiatan tersebut dulunya hanya membuang waktu dan tenaga, sekarang merupakan kegiatan yang wajib untuk mereka ikuti. Dengan alasan memiliki hutang KKP-E ini serta usaha untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam, para petani lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka anggap hal yang kurang perlu mereka lakukan. Dengan kata lain setelah mengakses KKP-E, petani lebih terbuka untuk menerima pelatihan, sosialisasi dan teknologi baru yang bisa diterapkan ke lahan mereka untuk dapat meningkatkan produksi mereka. dengan harapan peningkatan produksi ini dapat meningkatkan penghasilan mereka dan dengan peningkatan penghasilan, para petani akan dengan mudah mengembalikan pinjaman KKP-E yang mereka gunakan untuk produksi. Hal tersebut membuktikan bahwa setelah mengakses KKP-E, petani akan lebih terbuka untuk menerima teknologi baru dan pelatihan oleh PPL yang dulunya para petani ini menganggap tidak perlu untuk diikuti.

Dari tabel 12 tersebut dapat diketahui bahwa KKP-E ini memiliki pengaruh yang sangat positif untuk petani apel dan dengan adanya pinjaman dana KKP-E ini keuntungan petani juga semakin meningkat dari sebesar Rp.70,492 menjadi sebesar Rp.151,996 setelah mengakses KKP-E untuk musim pertama setelah meminjam dana program KKP-E dari BRI Cabang Malang Kawi.

Untuk petani kentang diketahui bahwa dengan adanya KKP-E ini petani akan semakin giat dalam berproduksi sehingga akan meningkatkan produksi kentang serta meningkatkan keuntungan petani. Petani kentang akan semakin giat dalam melaksanakan kegiatan produksi mereka dikarenakan mereka merasa telah memiliki hutang di Bank sehingga untuk melunasi hutang tersebut petani akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka. Hal tersebut terbukti dengan adanya program KKP-E ini produksi kentang meningkat dari 16 ton per jektar menjadi 18 ton perhektar (terlampir pada lampiran 7.6). Tidak berbeda jauh dengan petani apel, petani kentang setelah mengakses KKP-E akan semakin giat dalam pertemuan rutin kelompok tani serta sering mengundang PPL untuk memberikan sosialisasi. Namun bedanya untuk sosialisasi yang sering diberikan ke petani kentang ini bukan sosialisasi tentang budidaya melainkan penggunaan teknologi baru, seperti sosialisasi penggunaan pupuk baru, dan bibit baru. Petani juga merasa setelah meneirima pinjaman KKP-E ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PPL akan semakin aktif bukan hanya karena sudah diprogram oleh pihak PPL namun juga karena diundang oleh kelompok tani. Dampak positif lain dari KKP-E ini adalah dengan seiring semakin seringnya petani mengundang PPL untuk melakukan sosialisasi, maka kerukunan antar petani semakin meningkat, selain itu petani yang kurang tahu informasi mengenai teknologi baru akan mengetahui dan akan mencobanya untuk peningkatan produksi dari lahan mereka. hal tersebut terbukti, dimana rata-rata petani sebelum mengundang PPL dalam kegiatan sosialisasi hasil produksi mereka mencapai 16 ton per hektar dan setelah sering mengikuti kegiatan soisalisasi yakni setelah mengakses KKP-E, hasil produksi mereka meningkat dengan rata-rata produksi mencapai 18 ton per hektar.

Dengan harga jual yang sama yakni Rp.4.000 per kilonya maka pedapatan petani sebelum mengakses dana KKP-E menjdai Rp.64.000.000 sedangkan setelah mengakses KKP-E menjadi sebesar Rp.122.000.000, pendapatan setelah mengakses KKP-E sdiperoleh dari hasil penjualan sebesar Rp.72.000.000 ditambah dana pinjaman sebesar Rp50.000.000 hal tersebut dapat dilihat pada lampiran 7.6. Berdasarkan tabel 11 keuntungan petani kentang sebelum mengakses KKP-E sebesar Rp.25,897 dan menjadi Rp.77,568 setelah mengakses KKP-E.

### 5.5.2 Dampak sosial KKP-E

Selain KKP-E berdampak langsung terhadap perekonomian petani, KKP-E juga secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi sosial petani. Dampak tidak langsung dari KKP-E ini dipengaruhi oleh faktor perubahan ekonomi yang semakin meningkat setelah mengakses KKP-E. Beberapa dampak tak langsung dalam kehidupan sosial petani adalah:

1. Terciptanya kerukunan antar petani
2. Kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani lain
3. Kemampuan untuk menabung
4. Bertambahnya skill usaha
5. Bertambahnya jaringan usaha

Berdasarkan keterangan responden baik responden petani tebu, petani apel, petani kentang maupun petani salak menjelaskan bahwa terciptanya kerukunan antar petani ini terjadi tanpa mereka sadari. Menurut mereka setelah mengakses KKP-E kerukunan antar petani semakin meningkat terutama antar petani yang sama-sama mengakses KKP-E. Hal ini terjadi karena untuk memperoleh KKP-E harus melalui kelompok dan pengembalian yang dilakukan setiap bulan juga dilakukan secara kelompok. Hal tersebut yang mendorong sering dilakukan diskusi dan pertemuan rutin antar petani maupun antar petani dengan kelompok tani sehingga kegiatan kelompok tani lebih aktif dibandingkan dengan sebelum mengakses KKP-E. Dengan bertambah aktifnya kegiatan kelompok tani tanpa disadari akan membuat anggota kelompok tani semakin rukun dan rasa kekeluargaan antar anggota kelompok tanipun semakin besar.

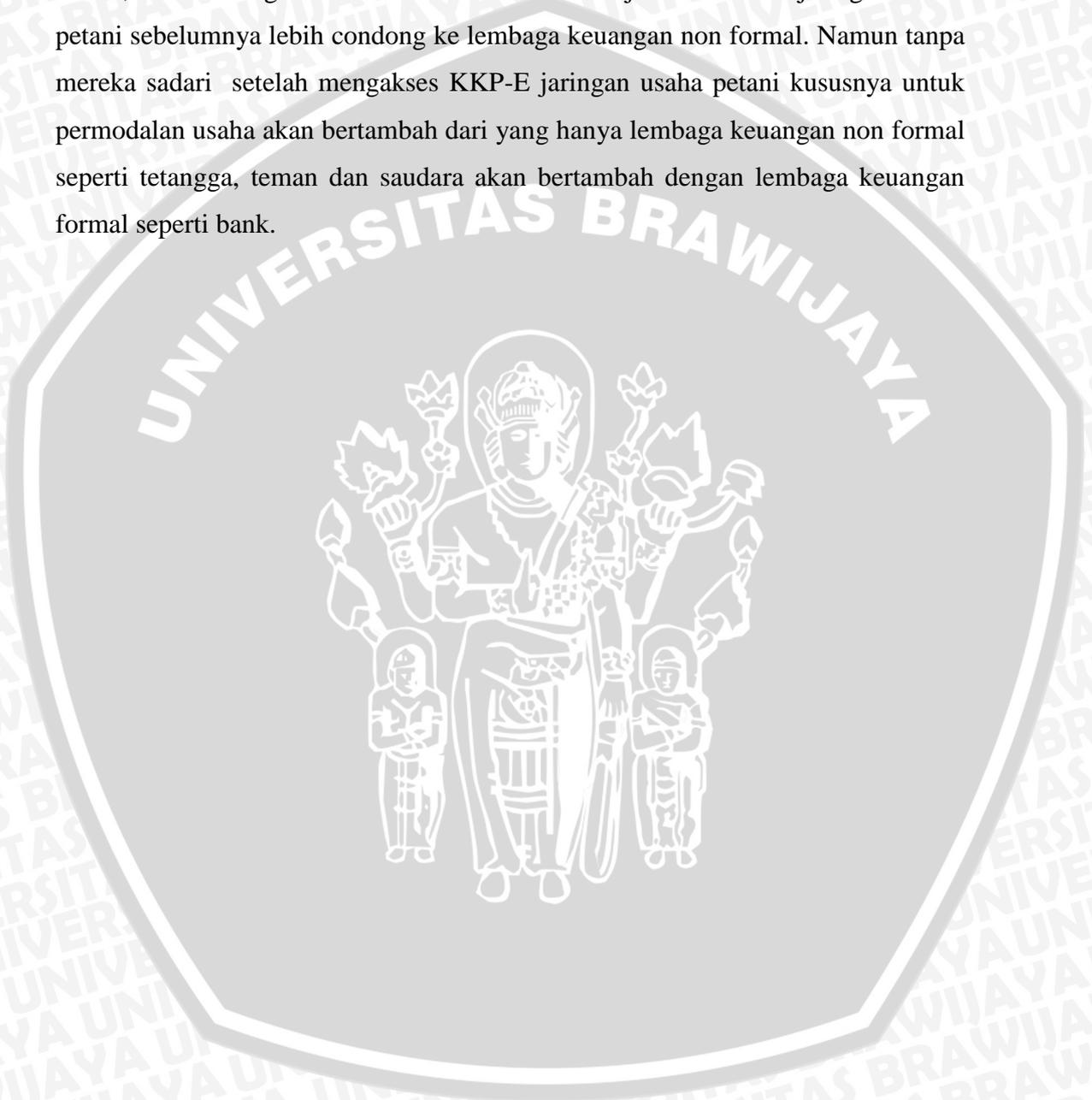
Dampak tidak langsung lainnya dalam kegiatan sosial petani adalah kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani lainnya. Semua responden menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan dana pinjaman KKP-E ini responden akan memiliki modal lebih yang dapat digunakan untuk menyewa pekerja lebih banyak dari pada sebelum meperoleh dana KKP-E. Hal tersebut dikarenakan sebelum menerima bantuan pinjaman KKP-E responden merasa kurang cukup dana untuk menyewa pekerja karena modal yang mereka miliki lebih banyak digunakan untuk kegiatan budidaya seperti membeli bibit dan pupuk

dan untuk pengerjaan lahan. Dengan kondisi keuangan yang minim terutama sebelum memperoleh pinjaman dari Bank, semua responden menjelaskan hanya mampu memperkerjakan petani penggarap yang disesuaikan dengan modal yang mereka miliki. Jika dana petani cukup besar maka petani akan menyewa petani penggarap dengan jumlah yang cukup banyak agar pekerjaan cepat selsai, namun jika kondisi keuangan kurang para petani hanya mampu menyewa petani penggarap dengan jumlah yang sedikit. Namun sejak memperoleh dana KKP-E, semua responden menjelaskan bahwa semua kebtuhan *on-farm* sudah terpenuhi serta dana tersebut dapat digunakan untuk menyewa petani penggarap yang lebih besar dari sebelum meminjam dana KKP-E. Dengan adanya pinjaman tersebut, secara tidak sengaja akan membuat petani yang memperoleh pinjaman akan dapat memiliki kesempatan untu menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani lainnya.

Dampak sosial lainnya setelah mengakses KKP-E secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan petani untuk menabung dan meningkatkan skill usaha petani. Responden petani apel, petani kentang dan petani salak menjelaskan bahwa setelah mengakses KKP-E petani lebih sering mengundang penyuluh-penyuluh untuk memberikan informasi terbaru tentang pertanian. Sedangkan untuk petani tebu selalu diadakan penyuluhan dari penyuluh lapang PG (pabrik gula) yang menaungi petani tebu tersebut. Dengan sering diadakan pertemuan dengan penyuluh secara tidak langsung akan memperluas wawasan petani mengenai sistim budidaya seehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan usaha petani. Kehadiran penyuluh ada kalanya tidak hanya memberikan penyuluhan saja tetapi juga bersama-sama petani mengelola lahan percontohan bagi petani. Dengan adanya lahan percontohan serta adanya informasi pertanian yang menambah wawasan petani tersebut akan membuat petani itu senantiasa mengikuti dan melaksanakan saran dari penyuluh lapang. Hal tersebut akan meningkatkan produksi petani. Semakin meningkat produksi petani makan akan semakin meningkat pula pendapatan petani sehingga petani akan memiliki dana lebih yang dapat ditabungkan.

Dampak sosial lainnya yang secara tidak langsung mempengaruhi perubahan petani adalah bertambahnya jaringan usaha petani. Jaringan usaha bidang pertanian bermacam-macam mulai dari jaringan permodalan, penyediaan bahan

baku pupuk dan bibit sampai dengan pemasaran. Dengan mengakses KKP-E berarti akan menambah satu lagi jaringan usaha untuk permodalan petani. Beberapa responden menjelaskan bahwa sebelum melakukan peminjaman ke Bank responden akan memperoleh modal untuk usaha taninya dari tetangga, teman, dan keluarga mereka. hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan usaha petani sebelumnya lebih condong ke lembaga keuangan non formal. Namun tanpa mereka sadari setelah mengakses KKP-E jaringan usaha petani khususnya untuk permodalan usaha akan bertambah dari yang hanya lembaga keuangan non formal seperti tetangga, teman dan saudara akan bertambah dengan lembaga keuangan formal seperti bank.



## BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa:

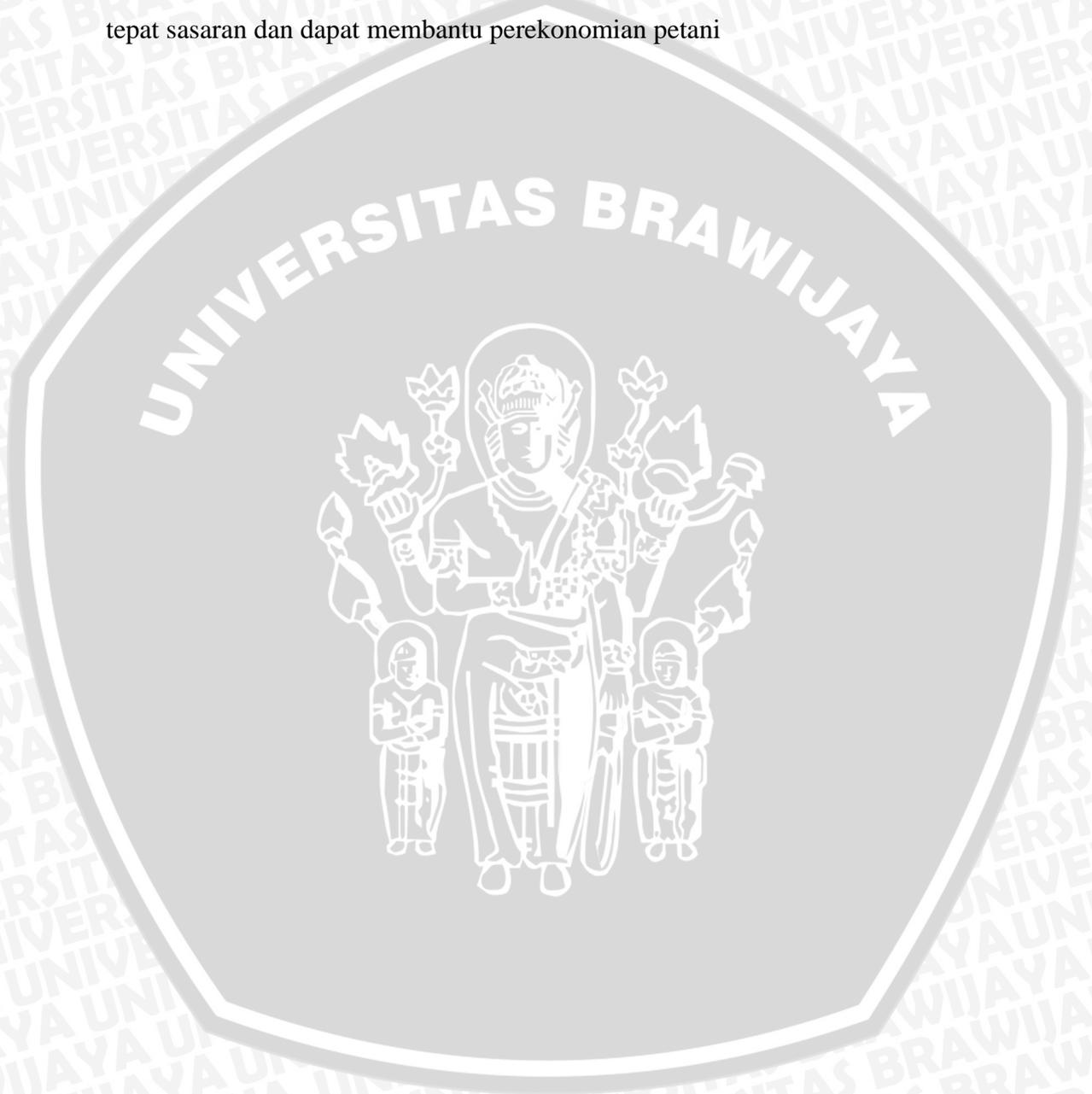
1. Jenis usaha yang dibiayai melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Kawi untuk sektor pertanian disalurkan melalui 3 saluran yakni melalui KUD, melalui Kelompok Tani dan Individual. Untuk penyaluran melalui KUD difokuskan ke petani tebu, untuk penyaluran melalui kelompok tani disalurkan ke petani Apel dan kentang. Sedangkan penyaluran KKP-E individual disalurkan ke petani Salak..
2. Proses mekanisme realisasi penyaluran KKP-E dari BRI Malang kawi secara umum memiliki tahapan yang sama namun terjadi perbedaan realisasi di lapang.
3. Dana KKP-E yang diakses oleh petani memiliki dampak secara sosial dan secara ekonomi.
  - a. Untuk pengaruh secara sosial dari terciptanya kerukunan antar kelompok tani, kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan untuk petani lain, kemampuan untuk menabung, bertambahnya skill dan jaringan usaha.
  - b. Secara ekonomis terjadi peningkatan keuntungan petani, petani tebu dari Rp. 27.237.435/ha menjadi Rp. 28.237.585/ha. Untuk petani apel dari Rp. 70.492.325 menjadi Rp. 151.995.083 dan untuk petani kentang dari Rp. 25.897.000 menjadi Rp. 77.567.473.

### 6.2 Saran

1. Perusahaan sebaiknya lebih meratakan penyaluran KKP-E untuk petani lain sehingga akan lebih banyak petani yang akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pinjaman yang sama.
2. Hendaknya perusahaan terus melakukan survey lapang, baik sebelum dan sesudah penurunan dana ke petani. Dengan dilakukan survey yang berkesinambungan maka perusahaan akan mengetahui dana kredit tersebut apakah sudah tepat bagi petani, baik tepat waktu, sasaran, penggunaan dan

pengembalian. Sehingga perusahaan bisa mengontrol penyaluran dana sehingga tidak terjadi kredit macet.

3. Pihak BRI dapat menggunakan hasil penelitian penelitian ini sebagai media pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai penyaluran perkreditan yang dikeluarkan yang dapat diakses oleh petani agar tepat sasaran dan dapat membantu perekonomian petani



## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2009. Optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di Indonesia. Analisis kebijakan pertanian vol 7 (1): 24-42.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan ; edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Direktorat pembiayaan pertanian. 2012. Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).
- Djohan Warman, 2000. *Kredit Bank*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya
- Ferry N. Idroes dan Sugiarto, 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Hastuti dkk. 2002. Pendanaan UsahaTani Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Lembaga penelitian SMERU
- Indar Bastian, 2004. Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika
- Karyanto. 2008. Kajian Kredit Usaha Tani (KUT) Dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi Vol 16 (12): 2226-2227. Desember 2008
- Laporan industry keuangan mikro Indonesia. 2009. Pendanaan oleh citi foundation sebagai bagian dari kegiatan dari Citi Network Strengthening Program. Banking with the Poor Network
- Marzuki, C. 1999. *Metodologi Riset*. Jakarta: Erlangga.
- Muljono, Teguh Pujo. 2001. *Manajemen Perkreditan (Bagi Bank Komersil)*. Yogyakarta : BPF.
- Peraturan menteri keuangan. No 198 /PMK.05. Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan no 79/ PMK.05/2007 tentang kredit ketahanan pangan dan energi. 2010. Kementerian keuangan
- Ramhadi halim, 2006. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil. Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang
- Saptomo, imam teguh, dkk. 2010. Desain lembaga pembiayaan pertanian nasional subsektor tanaman pangan menggunakan pendekatan interpretative structural modeling (ISM). Jurnal manajemen dan agribisnis vol 7 (2): 84-86. Oktober 2010
- Sayaka, bambang dkk 2010. Peningkatan 20 persen akses petani terhadap berbagai sumber pembiayaan usahatani. Pusat analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kementerian pertanian
- Sayaka, Bambang dan Rivai, Rudi Suarja. 2011. Peningkatan Akses Petani Terhadap Kredit Pangan dan Energi. Pusat analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kementerian pertanian
- Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press

Supriyatna, Ade. 2003. Akseibilitas petani kecil pada sumber kredit pertanian di tingkat desa: studi kasus petani padi Nusa Tenggara Barat. Balai besar pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian Bogor. Bogor.

Undang-undang No 7.1992. Tentang Perbankan

Yolanda, yusi. 2009. Analisis deskriminan dalam klasifikasi pola pengembalian kredit di sektor pertanian



**LAMPIRAN****Lampiran 1. Quisioner penelitian****QUISIONER****1. PENGANTAR**

Melalui kesempatan ini saya mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat meluangkan waktunya untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kuisioner ini dengan sebenarnya. Adapun quisioner ini dibuat oleh peneliti sendiri sebagai data pengamatan studi penelitian untuk menyelesaikan skripsi dengan judul:

**ANALISIS REALISASI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)****Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk****Cabang Malang Kawi**

Adapun data yang diperoleh akan dirahasiakan identitasnya serta tidak diperluaskan, hanya sebagai keperluan data pengamatan studi penelitian dari peneliti sendiri.

**2. IDENTITAS PENELITI**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Nama               | : Cahyo Hadi Putranto          |
| b. No Induk Mahasiswa | : 0910440039                   |
| c. Universitas        | : Universitas Brawijaya Malang |
| d. Jurusan            | : sosial ekonomi pertanian     |

**Lampiran 1 (lanjutan)**

**3. IDENTITAS RESPONDEN**

- a. Nama responden : .....
- b. Jenis kelamin responden : .....
- c. Usia responden : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Lama bertani : .....

**4. DAFTAR PERTANYAAN**

**a. Karakteristik Responden**

- 1) Apa jenis tanaman yang Bapak/Ibu budidayakan saat ini?  
 Tebu     Apel     Kentang     Salak
- 2) Berapa luas lahan budidaya yang Bapak / Ibu gunakan saat ini .....
- 3) Status lahan yang digunakan Bapak / Ibu untuk budidaya saat ini  
 milik     sewa     lainnya, .....
- 4) Status pekerjaan bidang pertanian :  
 Pekerjaan utama     Pekerjaan Sampingan
- 5) Bagaimana Bapak / Ibu mengakses KKP-E  
 petani individu     tergabung dalam anggota kelompok tani
- 3) Jika tergabung dalam kelompok tani, apa nama kelompok tani yang bapak/ ibu ikuti .....

**b. Tahap KKP-E**

- 1) Permohonan Kredit Oleh Nasabah
  - a) Bagaimana proses permohonan dalam pengajuan dana kredit KKP-E?

.....

.....

.....

.....

.....

.....





**Lampiran 1 (lanjutan)**

b) Menurut Bapak / Ibu syarat tersebut tergolong

- Sangat rumit
- Rumit
- Mudah
- Sangat mudah

c) Apakah ada diknas teknis setempat yang membantu dalam pemenuhan syarat yang Bapak / Ibu perlukan

- ada,..... k ada

d) Bagaimana peranan diknas teksnis setempat menurut Bapak / Ibu dalam proses peminjaman dana KKP-E ini?

- Tidak membantu
- Kurang membantu
- Membantu
- Sangat membantu

e) Kenapa syarat tersebut harus dibantu oleh diknas teknis setempat:

.....

.....

.....

f) Apakah Bapak / Ibu perlu mencantumkan rencana pencairan kredit dalam persyaratan pengajuan kredit agar penurunan dana sesuai dengan harapan Bapak / Ibu  Ya  Tidak

g) Jika tidak mencantumkan apa alasan yang mendasari Bapak / Ibu untuk tidak mencantumkan rencana pencairan kredit tersebut :

.....

.....

.....

**3) Putusan dan Pencairan dana**

a) Apakah pencairan dana kredit KKP-E yang Bapak / Ibu ajukan sudah sesuai dengan rencana Bapak / Ibu baik secara nominal maupun bulan pencairan dana sampai ke tangan Bapak / Ibu

- ya  tidak



**lampiran 1 (lanjutan)**

b) Kalau pencairan belum sesuai dengan harapan Bapak / Ibu, menurut Bapak / Ibu kenapa bisa demikian dan apa yang akan Bapak / Ibu lakukan : .....

.....  
 .....

c) Apakah ada perjanjian Akad kredit antara pihak BRI dengan Bapak / Ibu sebelum dana kredit di turunkan :

ya                       tidak

d) Siapa saja yang harus bertanda tangan dalam perjanjian akad kredit tersebut: .....

.....  
 .....

e) Apakah pencairan dana yang Bapak / Ibu ajukan selalu dalam bentuk uang     ya                       tidak

f) Jika tidak selalu bentuk uang, pencairan dalam bentuk apa saja :

.....  
 .....

g) Bagaimana cara penurunan dana yang Bapak / Ibu ajukan

- Langsung ke nasabah yang bersangkutan
- Disalurkan melalui Kelompok Tani
- Disalurkan melalui diknas teknis setempat, .....

h) Bagaimana proses pencairan dan penurunan dana KKP-E yang Bapak / Ibu ajukan : .....

.....  
 .....



**lampiran 1 (lanjutan)**

i) Menurut Bapak / Ibu proses tersebut tergolong

- Sangat sulit
- Sulit
- Mudah
- Sangat mudah

4) Monitoring

a) Apakah selama Bapak / Ibu meminjam dana KKP-E ada kegiatan monitoring  ya  tidak

b) Siapa yang melakukan kegiatan tersebut : .....

.....

.....

.....

c) kegiatan apa saja yang dilakukan selama proses monitoring berlangsung .....

.....

.....

.....

.....

5) Pengembalian dan Pelunasan Dana KKP-E

a) Berapa besarnya bunga yang harus Bapak / Ibu bayarkan saat pelunasan kredit yang Bapak / Ibu ajukan : .....

b) Yang menjadi perantara pengembalian dana kredit yang Bapak / Ibu ambil

- Bapak / Ibu sendiri
- Kelompok tani
- Diknas teknis lain yang terkait, .....

c) Jika yang menjadi perantara pengembalian bukan Bapak / Ibu sendiri, kenapa bisa demikian : .....

.....

.....



**lampiran 1 (lanjutan)**

d) Jika Penurunan dana yang Bapak / Ibu ajukan tidak berupa uang, bagaimana dan dengan apa Bapak / Ibu melunasi dana yang Bapak / Ibu pinjam?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

e) Apakah Bapak / Ibu membuat rencana pengembalian kredit untuk pihak BRI  ya  tidak

f) Bila iya, apakah dalam proses pengembalian dana yang Bapak / Ibu pinjam selalu sesuai dengan rencana tersebut :  ya  tidak

g) Jika tidak, kenapa hal tersebut bisa terjadi

.....  
 .....  
 .....

h) Jika tidak sesuai, apakah ada sanksi dari pihak BRI?  Ya  tidak

i) Bila ada sanksi, sanksi apa yang diberikan kepada Bapak / Ibu

.....  
 .....

j) Jika tidak ada sanksi, solusi apa yang disepakati antara Bapak / Ibu dengan pihak BRI maupun pihak diknas teknis setempat yang bersangkutan : .....

.....  
 .....



**Lampiran 1 (lanjutan)**

**c. Data Hasil Produksi dan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mengakses KKP-E dan pengaruhnya dalam pengembalian modal pinjaman**

1) Apakah Menurut Bapak / Ibu setelah mengakses KKP-E terdapat perbedaan dari hasil panen dari sebelum mengakses KKP-E?

Ya                       tidak

2) Perbedaan hasil panen sebelum dan sesudah mengakses KKP-E cenderung  Naik                       menurun

3) Hasil produksi dari lahan yang Bapak / Ibu budidayakan sebelum mengakses KKP-E sebesar ..... dan hasil produksi setelah mengakses KKP-E menjadi .....

4) Hasil budidaya yang Bapak / Ibu peroleh di jual dengan harga berapa .....

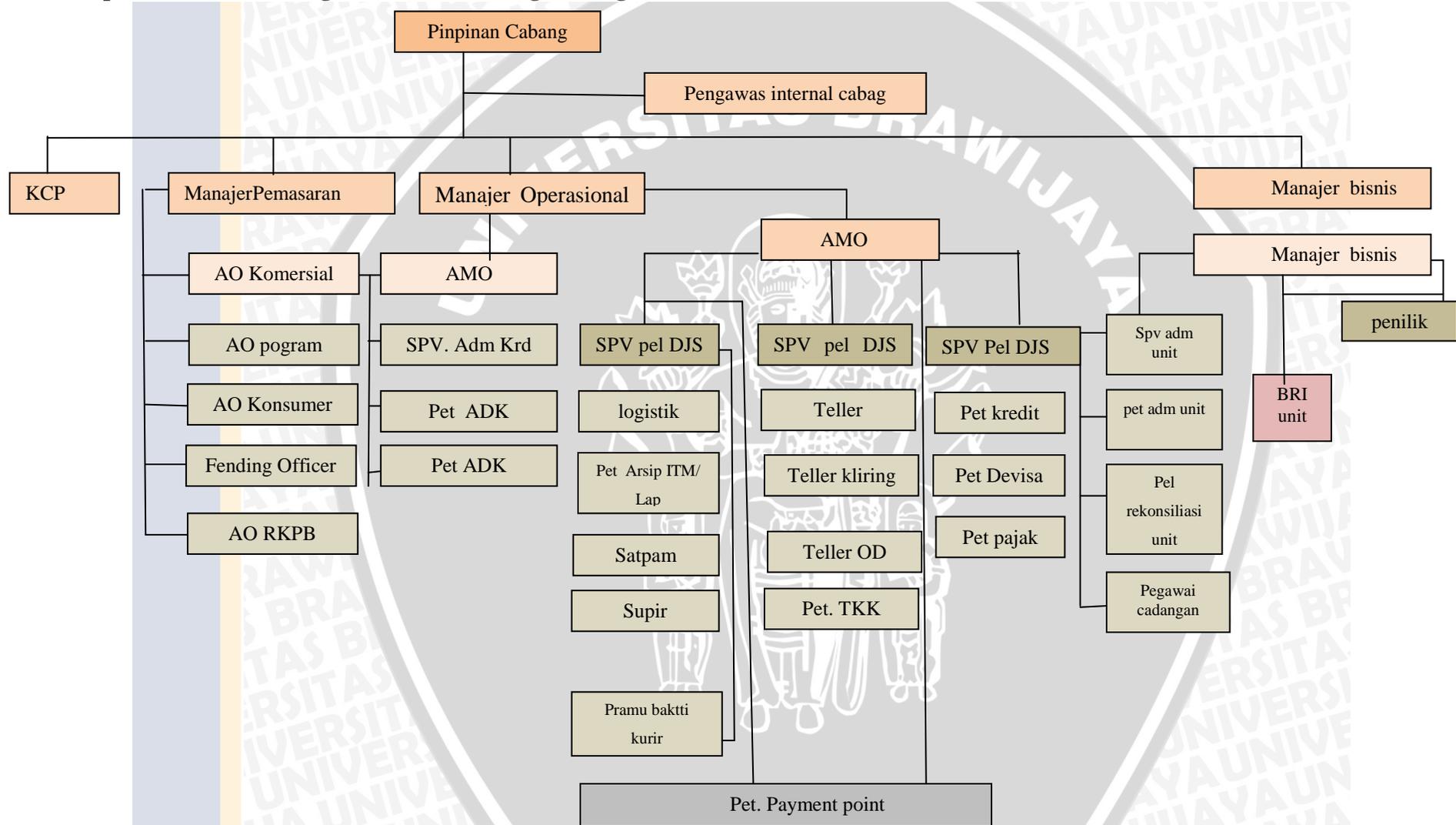
5) Sedangkan biaya total yang diperlukan untuk mengelola lahan yang Bapak gunakan untuk budidaya sebelum mengakses KKP-E sebesar ..... dan setelah mengakses KKP-E menjadi sebesar .....

6) Rincian biaya yang bapak/ ibu pakai saat budidaya dilakukan sebelum mengakses KKP-E adalah.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....





Lampiran 2. Struktur Organisasi BRI Cabang Malang Kawi



## Lampiran 3. Data Responden

responden	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan	Lama bekerja	Tingkat pendidikan	Frekuensi menerima KKP-E
1.	Laki-laki	48	AO BRI	23 thn	S1	-
2.	Laki-laki	39	PPL	19 thn	S1	-
3.	Laki-laki	18	Petani	2 thn	SMP	1
4.	Laki-laki	28	Petani	4 thn	SD	1
5.	Laki-laki	29	Petani	6 thn	SD	1
6.	Laki-laki	28	Petani	11 thn	SD	1
7.	Laki-laki	26	Petani	4 thn	SMA	1
8.	Laki-laki	36	Petani	22 thn	TK	1
9.	Laki-laki	33	Petani	5 thn	SMA	1
10.	Laki-laki	33	Petani	21 thn	SD	1
11.	Laki-laki	33	Petani	22 thn	SD	1
12.	Laki-laki	35	Petani	27 thn	SD	1
13.	Laki-laki	35	Petani	11 thn	SD	1
14.	Laki-laki	38	Petani	22 thn	TK	1
15.	Laki-laki	37	Petani	22 thn	SD	1
16.	Laki-laki	32	Petani	4 thn	SMA	1
17.	Laki-laki	41	Petani	24 thn	TK	1
18.	Laki-laki	44	Petani	8 thn	SD	1
19.	Laki-laki	48	Petani	14 thn	SD	1
20.	Laki-laki	49	Petani	21 thn	TK	1
21.	Laki-laki	49	Petani	10 thn	SD	1
22.	Laki-laki	42	Petani	24 thn	SD	1
23.	Laki-laki	52	Petani	23 thn	SD	1
24.	Laki-laki	52	Petani	18 thn	TK	1
25.	Laki-laki	54	Petani	28 thn	SD	1
26.	Laki-laki	53	Petani	20 thn	TK	1
27.	Perempuan	34	Petani	16 thn	SMP	1
28.	Laki-laki	56	Petani	22 thn	S1	1
29.	Laki-laki	49	Petani	28 thn	SMA	1
30.	Laki-laki	41	Petani	26 thn	SMA	1
31.	Perempuan	33	Petani	23 thn	TK	1
32.	Laki-laki	44	Petani	23 thn	SMA	1
33.	Laki-laki	48	Petani	28 thn	SMA	1
34.	Laki-laki	49	Petani	33 thn	SMA	1
35.	Laki-laki	32	Petani	14 thn	SMA	1
36.	Laki-laki	40	Petani	11 thn	S1	1
37.	Laki-laki	38	Petani	11 thn	S1	1
38.	Laki-laki	39	Petani	13 thn	S1	1
39.	Laki-laki	58	Petani	3 thn	S1	1

#### Lampiran 4. Simulasi Angsuran KKP-E Apel

No	Bulan	Bunga	Pokok KMK	Perkiraan Bunga		Angsuran
			Sisa pokok	Bunga	pokok	
	Oct 12		500.000.000		-	
1	Nov 12	4%	500.000.000	1.698.630	-	1.698.630
2	Des 12	4%	500.000.000	1.643.833	-	1.643.833
3	Jan 13	4%	500.000.000	1.698.630	-	1.698.630
4	Feb 13	4%	500.000.000	1.698.630	-	1.698.630
5	Mar 13	4%	500.000.000	1.534.247	-	1.534.247
6	Apr 13	4%	425.000.000	1.698.630	75.000.000	76.698.630
7	Mei 13	4%	425.000.000	1.397.260	-	1.397.260
8	Jun 13	4%	425.000.000	1.443.836	-	1.443.836
9	Jul 13	4%	425.000.000	1.397.260	-	1.397.260
10	Agt 13	4%	425.000.000	1.443.836	-	1.443.836
11	Sep 13	4%	425.000.000	1.443.836	-	1.443.836
12	Oct 13	4%	325.000.000	1.397.260	100.000.000	101.397.260
13	Nov 13	4%	325.000.000	1.104.110	-	1.104.110
14	Des 13	4%	325.000.000	1.068.493	-	1.068.493
15	Jan 14	4%	325.000.000	1.104.110	-	1.104.110
16	Feb 14	4%	325.000.000	1.104.110	-	1.104.110
17	Mar 14	4%	325.000.000	997.260	-	997.260
18	Apr 14	4%	250.000.000	1.104.110	75.000.000	76.104.110
19	Mei 14	4%	250.000.000	821.918	-	821.918
20	Jun 14	4%	250.000.000	849.315	-	849.315
21	Jul 14	4%	250.000.000	821.918	-	821.918
22	Agt 14	4%	250.000.000	849.315	-	849.315
23	Sep 14	4%	250.000.000	849.315	-	849.315
24	Oct 14	4%	150.000.000	821.918	100.000.000	100.821.918
25	Nov 14	4%	150.000.000	509.589	-	509.589
26	Des 14	4%	150.000.000	493.151	-	493.151
27	Jan 15	4%	150.000.000	509.589	-	509.589
28	Feb 15	4%	150.000.000	509.589	-	509.589
29	Mar 15	4%	150.000.000	460.274	-	460.274
30	Apr 15	4%	75.000.000	509.589	75.000.000	75.509.589
31	Mei 15	4%	75.000.000	256.575	-	256.575
32	Jun 15	4%	75.000.000	254.795	-	254.795
33	Jul 15	4%	75.000.000	256.575	-	256.575
34	Agt 15	4%	75.000.000	254.795	-	254.795
35	Sep 15	4%	75.000.000	254.795	-	254.795
36	Oct 15	4%	-	246.575	75.000.000	75.246.575
				<b>34.507.671</b>	<b>500.000.000</b>	<b>534.507.671</b>

### Lampiran 5. Simulasi Angsuran KKP-E Salak

No	Bulan	Rate Bunga	Pokok KMK	Perkiraan bunga KMK		Angsuran
			Sisa pokok	Bunga	pokok	
	Feb 13		50.000.000		-	
1	Mar 13	4%	50.000.000	153.425	-	153.425
2	Apr 13	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
3	Mei 13	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
4	Juni 13	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
5	Juli 13	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
6	Agt 13	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
7	Sep 13	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
8	Okt 13	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
9	Nov 13	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
10	Des 13	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
11	Jan 14	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
12	Feb 14	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
13	Mar 14	4%	50.000.000	153.425	-	153.425
14	Apr 14	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
15	Mei 14	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
16	Juni 14	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
17	Juli 14	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
18	Agt 14	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
19	Sep 14	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
20	Okt 14	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
21	Nov 14	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
22	Des 14	4%	50.000.000	164.384	-	164.384
23	Jan 15	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
24	Feb 15	4%	50.000.000	169.863	-	169.863
25	Mar 15	4%	45.833.333	153.425	4.166.667	4.320.092
26	Apr 15	4%	41.666.667	155.709	4.166.667	4.322.375
27	Mei 15	4%	37.500.000	136.986	4.166.667	4.303.653
28	Juni 15	4%	33.333.333	127.397	4.166.667	4.294.064
29	Juli 15	4%	29.166.667	109.589	4.166.667	4.276.256
30	Agt 15	4%	25.000.000	99.087	4.166.667	4.265.754
31	Sep 15	4%	20.833.333	84.932	4.166.667	4.251.599
32	Okt 15	4%	16.666.667	68.493	4.166.667	4.235.160
33	Nov 15	4%	12.500.000	56.621	4.166.667	4.223.288
34	Des 15	4%	8.333.333	41.096	4.166.667	4.207.763
35	Jan 16	4%	4.166.667	28.311	4.166.667	4.194.978
36	Feb 16	4%	-	14.155	4.166.667	4.180.822
				<b>5.075.804</b>	<b>50.000.000</b>	<b>55.075.804</b>

**Lampiran 6. Data Rincian Biaya produksi Dan Hasil Produksi Petani Sebelum dan Sesudah Mengakses KKP-E**

**6.1 Data Rincian Biaya Produksi Dan hasil Produksi Petani Tebu Sebelum Mengakses KKP-E**

jenis	Responden ke																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bibit	126	127	127	126	126	125	126	127	126	126	126	129	128	128	125	125	126	125	128	125	128	126	124	128
Za	8	7	7	8	8,5	7	7	8,5	8,5	8	7	7	7	8	7	7	8,5	8,5	8,5	7	7	8	8	7
Ponska	5	4	4	5,5	5,5	4	5,5	4,5	4,5	4,5	5	5	4	5	4	4	5,5	5	4,5	5	4,5	4,5	5,5	5,5
P. Organik	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
T.K	8	8,5	9	9	9,5	8	8,7	8,5	8,5	8,5	8,8	8	8,7	8,5	8,5	8,8	8	8	9	8,5	9	8,5	8,5	
Pestisida	400	500	450	450	480	400	420	430	400	400	500	500	400	410	470	425	490	500	490	450	435	400	460	410
Biaya lain	4	2	4	5	3	3	4	4	3	4	3	2	5	4	2	4	3	4	3	3	4	4	3	2
Prod Tebu	1	1,2	1,1	0,98	0,985	1,025	0,98	1,05	1	1,05	1,2	1	1	1,2	1	1,05	1,05	0,98	0,985	1	1,2	1,025	1,1	0,98
Rendemen	5,2	5,3	5	4,4	5,6	4,7	5,5	6	4,8	5,4	4,8	6,8	5,3	5,3	5,1	4,4	5	5,4	5,3	6,2	4,8	5	5	6,4

Keterangan : Bibit : Dalam Kwintal  
 Za : Dalam Kwintal  
 Ponska : Dalam Kwintal  
 P.organik : Dalam Kwintal  
 Pestisida : Dalam Ribu Rupiah  
 T.K : Dalam Juta rupiah  
 Prod tebu : Dalam Ton

## Lampiran 6 (lanjutan)

## 6.2 Data Rincian Biaya Produksi Dan hasil Produksi Petani Tebu Setelah Mengakses KKP-E

jenis	Responden ke																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bibit	126	127	127	126	126	125	126	127	126	126	126	129	128	128	125	125	126	125	128	125	128	126	124	128
Za	1	-	-	1	1,5	-	-	1,5	1,5	1	-	-	-	1	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-	1	1	-
Poska	1		-	1,5	1,5	-	1,5	0,5	0,5	0,5	1	1	-	1	-	-	1,5	1	0,5	1	0,5	0,5	1,5	1,5
P. Organik	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
T.K	4	4,5	5		5,5	4	4,7	4,5	4	4,5	4,5	4,8	4	4,7	4,5	4,5	4,8	4	4	5	4,5	5	4,5	4,5
Pestisida	400	500	450	450	480	400	420	430	400	400	500	500	400	410	470	425	490	500	490	450	435	400	460	410
Biaya lain	4	2	4	5	3	3	4	4	3	4	3	2	5	4	2	4	3	4	3	3	4	4	3	2
Prod Tebu	1	1,2	1,28	1	1	1,075	1,08	1,2	0,97	1,875	1	0,985	1,28	1	1,005	1,075	1	1,2	0,97	0,985	1	1,08	1,2	1,87
Rendemen	5	4,6	4,3	4,4	4,5	5,1	4,7	5,8	4,9	6	4,6	4,9	4,4	4,4	4,5	4,6	5,3	4,4	5,9	4,6	6,2	4,9	4,5	4,5

Keterangan :

- Bibit : Dalam Kwintal  
 Za : Dalam Kwintal  
 Ponska : Dalam Kwintal  
 P.organik : Dalam Kwintal  
 Pestisida : Dalam Ribu Rupiah  
 T.K : Dalam Juta rupiah  
 Prod tebu : Dalam Ton



### Lampiran 6 (lanjutan)

Keterangan	: Bibit	: dalam biji	Ppk. Daun	: dalam liter
	Ppk. Kandang	: dalam m <sup>3</sup>	Pestisida	: dalam rupiah
	Ppk. Urea	: dalam kg	T.K	: dalam rupiah
	Ppk SP-36	: dalam kg	Prod apel	: dalam ton
	Biaya lain	: dalam rupiah		

### 6.5 Data Rincian Biaya Produksi Dan hasil Produksi Petani Kentang Sebelum Mengakses KKP-E

Jenis	Sebelum mengakses				Setelah mengakses			
	Petani ke				Petani ke			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Bibit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ppk. kandang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ppk. Za	350	350	350	350	350	350	350	350
Ppk. SP-36	750	750	750	750	750	750	750	750
Ppk. KCL	500	500	500	500	500	500	500	500
Ppk. NPK	250	250	250	250	250	250	250	250
Kapur pertanian	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fungisida	130	130	130	130	130	130	130	130
Insektisida	10	10	10	10	10	10	10	10
T.K olah tanah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
T.K tanam	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
T.K Penyiangan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
T.K Pembumbunan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
T.K olah HPT	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
T.K Panen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
T.K Pengangkutan	800.000	800.000	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000

**Lampiran 6 (lanjutan)**

Biaya lain-lain	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Produksi Kentang	16	16	16	16	18	18	18	18

**Keterangan**

- |                 |               |                  |                |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Bibit           | : dalam kg    | T.K olah tanah   | : dalam rupiah |
| Ppk.kandang     | : dalam kg    | T.K tanam        | : dalam rupiah |
| Ppk. Za         | : dalam kg    | T.K Penyiangan   | : dalam rupiah |
| Ppk. SP-36      | : dalam kg    | T.K Pembumbunan  | : dalam rupiah |
| Ppk. KCL        | : dalam kg    | T.K olah HPT     | : dalam rupiah |
| Ppk. NPK        | : dalam kg    | T.K Panen        | : dalam rupiah |
| Kapur pertanian | : dalam kg    | T.K Pengangkutan | : dalam rupiah |
| Fungisida       | : dalam kg    | Biaya lain-lain  | : dalam rupiah |
| Insektisida     | : dalam liter | Produksi Kentang | : dalam ton    |

**Lampiran 7. Perhitungan rata-rata Pengeluaran dan Pendapatan petani  
Sebelum dan Sesudah Mengakses KKP-E**

**7.1 Data rata-rata pengeluaran petani tebu sebelum dan sesudah mengakses  
KKP-E**

No	Jenis	Sebelum mengakses			Sesudah mengakses			
		Banyak (kw)	Nominal	Jumlah	Banyak (kw)	Nominal	Jumlah	
1	Bibit	126,2	30.000	3.786.000	126,2	30.000	3.786.000	
2	Pupuk ZA	7,625	140.000	1.067.500	0,625	140.000	87.500	
	Ponska	4,75	230.000	1.092.500	0,75	230.000	172.500	
	Organik	25	50.000	1.250.000	5	50.000	250.000	
3	pestisida			444.166			444.166	
4	Pekerja			8.583.333			4.583.333	
5	Biaya lain			3.416.666			3.416.666	
6	Angsuran KKP-E						7.383.000	
		Total pengeluaran			<b>19.730.165</b>	Total pengeluaran		<b>20.123.165</b>

**7.2 Data rata-rata keuntungan petani tebu sebelum dan sesudah mengakses  
KKP-E**

No	Jenis	Sebelum mengakses	Sesudah mengakses
1.	Total pengeluaran	Rp. 19.730.165	Rp. 12.740.165
2.	Produksi tebu	1.047,5 kw	1.048,75 kw
3.	Rendemen	5,275	5,425
4.	Produksi gula	55,256 kw	56,895 kw
5.	Harga lelang gula	Rp. 8.500/kg	Rp. 8.500/kg
6.	Penerimaan	Rp. 46.967.600	Rp. 48.360.750
10.	Pendapatan	<b>Rp.27.237.435</b>	<b>Rp.28.237.590</b>

## Lampiran 7 (lanjutan)

## 7.3 Data rata-rata pengeluaran petani apel sebelum dan sesudah mengakses

## KKP-E

No	Jenis	Sebelum mengakses			Sesudah mengakses			
		Banyak	Nominal	Jumlah	Banyak	Nominal	Jumlah	
1	Bibit	400	3.500	1.400.000	400	3.500	1.400.000	
2	Pupuk Kandang	67 m <sup>3</sup>	15.000	1.005.000	67 m <sup>3</sup>	15.000	1.005.000	
	Urea	80 kg	1.410	112.800	80 kg	1.410	112.800	
	Sp 36	36 kg	2.055	133.575	36 kg	2.055	133.575	
	KCl	26 kg	2.550	66.300	26 kg	2.550	66.300	
	Daun	10 ltr	54.000	540.000	10 ltr	54.000	540.000	
4	Pekerja		20.000	1.800.000		20.000	1.800.000	
5	Biaya lain			1.450.000			1.450.000	
6	Angsuran KKP-E						8.497.260	
		Total pengeluaran			<b>9.507.675</b>	Total pengeluaran		<b>18.004.917</b>

## 7.4 Data rata-rata penerimaan petani apel sebelum dan sesudah mengakses

## KKP-E

No	Jenis	Sebelum mengakses	Sesudah mengakses
1	Modal dari KKP-E	-	Rp.50.000.000
2	Produksi apel	10 ton	15 ton
3	Harga apel perkilo	Rp.8.000	Rp.8.000
4	Penerimaan	Rp. 80.000.000	Rp.170.000.000
6	Keuntungan	<b>Rp. 70.492.325</b>	<b>Rp. 151.995.083</b>

## Lampiran 7 (lanjutan)

## 7.5 Data rata-rata pengeluaran petani salak sebelum dan sesudah mengakses KKP-E

No	Jenis	Banyak	Sebelum mengakses		Sesudah mengakses	
			harga	Jumlah	Nominal	Jumlah
1	Bibit	2.000 kg	6.000	12.000.000	6.000	12.000.000
2	Pupuk Kandang	20.000 kg	300	6.000.000	300	6.000.000
	ZA	350 kg	1.300	455.000	1.300	455.000
	SP 36	750 kg	1.600	1.200.000	1.600	1.200.000
	KCl	500 kg	1.750	875.000	1.750	875.000
	NPK	250 kg	2.500	625.000	2.500	625.000
3	Kapur	3.000 kg	400	1.200.000	400	1.200.000
4	Pestisida	130 kg	50.000	6.500.000	50.000	6.500.000
	Fungisida Insektisida	10 ltr	250.00	2.500.000	250.000	2.500.000
5	Tenaga Kerja					
	Olah tanah	100 hok	15.000	1.500.000	15.000	1.500.000
	Tanam	25 hok	15.000	375.000	15.000	375.000
	Penyiangan	50 hok	15.000	750.000	15.000	750.000
	Pembumbunan	50 hok	15.000	750.00	15.000	750.00
	Olah HPT	72 hok	15.000	1.080.000	15.000	1.080.000
	Panen	50 hok	15.000	1.250.000	15.000	1.250.000
Angkut	50/kg	16.000	800.000	18.000	900.000	
6	Biaya lain-lain			243.000		243.000
7	Angsuran KKP-E			-		6.229.527
Total pengeluaran				<b>38.103.000</b>		<b>44.432.527</b>

## 7.6 Data rata-rata pendapatan petani kentang sebelum dan sesudah mengakses KKP-E

No	Jenis	Sebelum mengakses	Sesudah mengakses
1	Modal awal dari KKP-E	-	Rp.50.000.000
2	Produksi kentang	16 ton	18 ton
3	Harga kentang perkilo	Rp.4.000	Rp.4.000
4	Penerimaan	Rp. 64.000.000	Rp.122.000.000
6	Keuntungan	<b>Rp. 25.897.000</b>	<b>Rp. 77.567.473</b>